



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**(RKPD)**

**TAHUN 2023**

**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**BUKU I (BAB I s.d VII)**







## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR       TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang       : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1479);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.



24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran RPD.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. prioritas pembangunan daerah;
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (5) Rancangan akhir RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### Pasal 4

- (1) Penjabaran RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPD.
- (3) Penyusunan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

## Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab VII : Penutup

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-137
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-144
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-6
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .....	IV-12
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	<b>V-1</b>
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>VI-1</b>
6.1. Indikator Kinerja Utama .....	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Daerah.....	VI-3
6.3. Inovasi Daerah.....	VI-183
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>VII-1</b>

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR ..... TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Tahun 2023 ini merupakan RKPD tahun pertama yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1479);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
- o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);
- r. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan operasional tahunan daerah. Peraturan perundangan tersebut mengarahkan pada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, tahapan, dan tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sesuai peraturan-peraturan perundangan tersebut, ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Semua dokumen perencanaan harus disinkronkan dan diselaraskan sehingga dapat terwujud sinergi, keterkaitan, konsistensi, dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut perencanaan pembangunan juga harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan, perlu diupayakan terwujudnya hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu :

1. Hubungan RKPD dengan RPD

Dokumen RPD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah.

2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dokumen RKPD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja PD. Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.

3. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Lampung dan RKP

Dokumen RKPD Kabupaten mengacu, disinkronkan dan diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi Lampung dan RKP (Nasional). Sinkronisasi dilakukan terkait dengan tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan, dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, dan RAPBD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA PD sebagai lampiran Ranperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai :

- a. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan

- pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- b. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
  - c. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
  - d. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
  - e. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja; dan
  - f. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Lampung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
  - 1.4. Maksud dan Tujuan
  - 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
- BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
  - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
  - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
- BAB III    KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV    SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
  - 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
- BAB V     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
- BAB VI    KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
- BAB VII   PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### Aspek Geografi

Kabupaten Lampung Barat terletak antara koordinat  $04^{\circ}51'26''$  –  $05^{\circ}20'26''$  LS dan  $103^{\circ}50'13''$  –  $104^{\circ}33'49''$  BT dengan luas 2.064,40 km<sup>2</sup> atau sebesar 6,0% dari luas Provinsi Lampung, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.1.  
Peta Administrasi Lampung Barat



Sumber : RTRW Lampung Barat, 2019

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geografis merupakan wilayah penghubung ke daerah-daerah di Pulau Sumatera. Di sebelah utara jalan lintas tengah menuju Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, lintas barat menuju pesisir barat ke arah Bengkulu Selatan. Keberadaan jalan lintas ini membuat Kabupaten Lampung Barat menjadi daerah lintasan yang menunjang lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah-daerah di Pulau Sumatera.



Gunung yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat antara lain Gunung Seminung (1.804 m), Gunung Kawit Kerambai (1.777 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), Gunung Pematang Beringin (1.680 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Pesagi (2.127 m) dan Gunung Tanjung Jati (1.658 m). adapun bentuk wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi, mulai dari daerah datar di sebelah selatan hingga daerah bergunung di sebelah utara dengan kemiringan lahan mulai dari relatif landai (0 - 15%) hingga curam (> 40%).

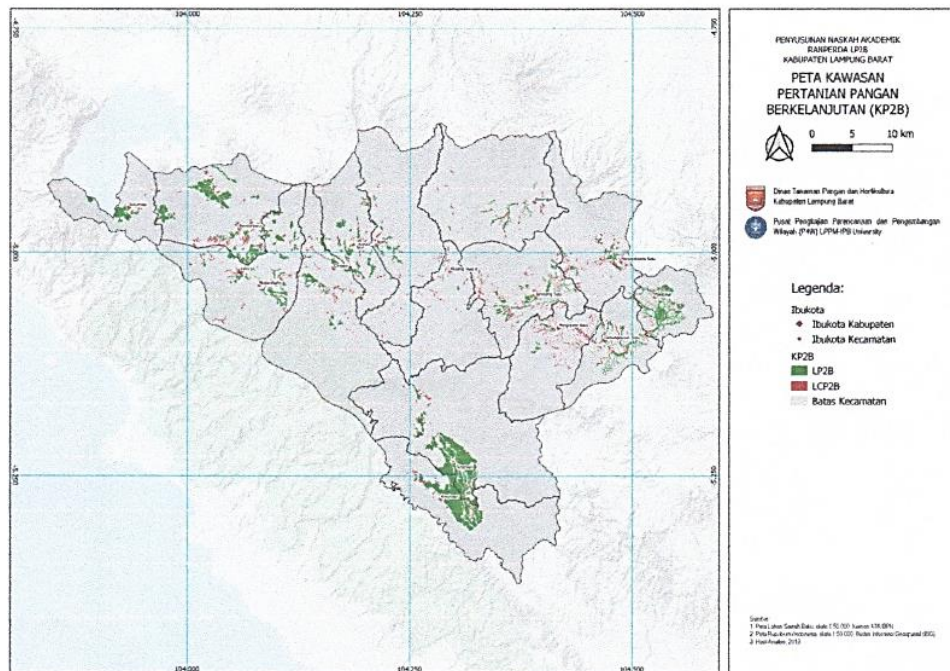
Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur yaitu Way Besai dan Way Semangka yang mengalir ke arah selatan. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (sediment load) menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Hal ini praktis mengakibatkan daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (run off) makin besar, sungai - sungai yang mengalir ke sebelah timur dan selatan menjadi terganggu kestabilannya.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah daerah perbukitan dan pegunungan yang terletak di ujung selatan Bukit Barisan. Secara keseluruhan daerah ini merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, daerah ini memegang peranan penting dalam sistem hidrologi Provinsi Lampung, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar dan mempengaruhi keadaan iklim secara keseluruhan. Sungai-sungai tersebut diantaranya adalah Way Besay (DAS Tulang Bawang), Way Semangka (DAS Semangka), dan Way Warkuk (DAS Musi).

Gambar 2.2.

PETA LUAS SEBARAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN





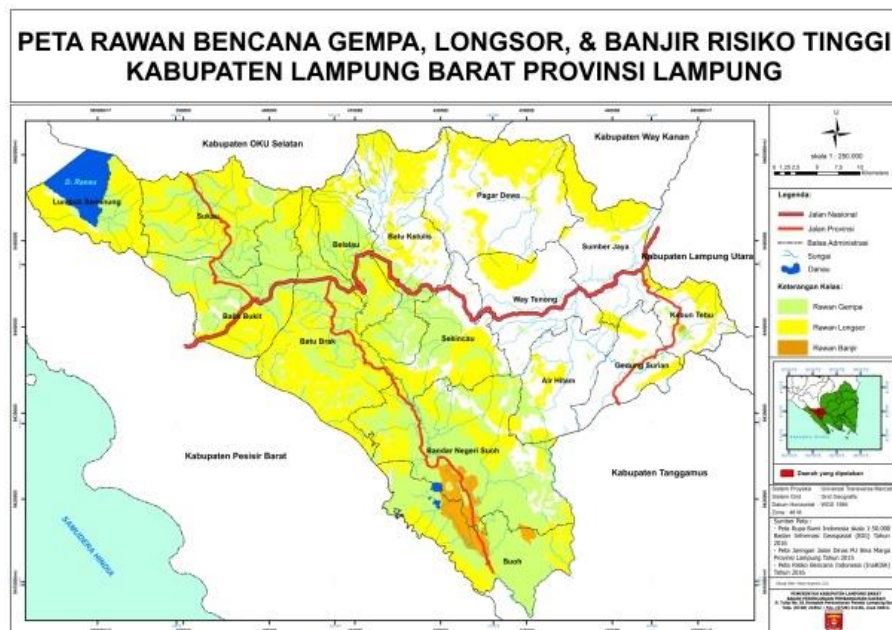
tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan.

Secara geologi Lampung Barat dilalui oleh Sesar Semangka yang merupakan salah satu sesar utama di Pulau Sumatera. Adanya patahan ini mengakibatkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain :

- a. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.
- b. Iklim : curah hujan yang tinggi.
- c. Keadaan topografi : lereng yang curam.
- d. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatis.
- e. Tutupan lahan yang mengurangi tahanan geser, misalnya tanah kritis.
- f. Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor.

Gambar 2.4.  
Peta Rawan Bencana



Sumber : RTRW Lampung Barat, 2019

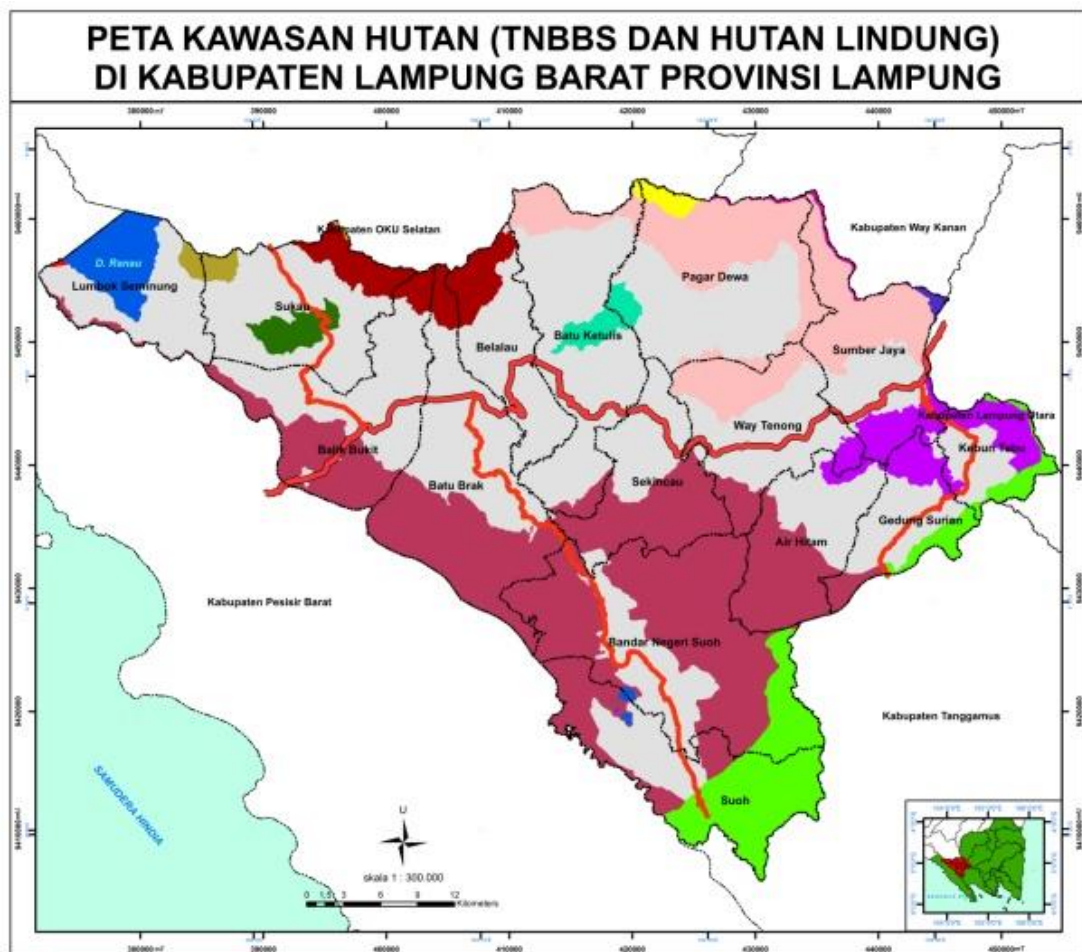
Wilayah Rawan Banjir; banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir



buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Gambar 2.5.  
Peta Kawasan Hutan



Sumber : RTRW Lampung Barat, 2019

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar.

Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi; Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara regional terletak pada Zona Sumber Gempabumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Lampung Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempabumi. Analisis regional menunjukkan kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarah tenggara-baratlaut dan timurlaut-baratdaya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempabumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada sistem patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (unconsolidated), yang pada umumnya berumur Kuartar. (Peta Seismotektonik Indonesia).

Gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan gempa dangkal (dengan hiposenter 0-90 kilometer) dengan kekuatan 5 dan 6 skala Richter. Sejarah terjadinya gempa bumi menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk wilayah gempa bumi yang merusak (Wilayah /Samudera Indonesia). Pusat-pusat gempa berada pada arah barat dan barat daya wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Wilayah yang merupakan daerah resiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Barat yaitu :

- a. Daerah di sekitar zona patahan, seperti di sepanjang Sesar Semangko dari Teluk Karang berak sampai Liwa,
- b. Daerah pada sebaran litologi berupa aluvial dan batuan berumur Kuartar,
- c. Daerah permukiman padat penduduk,
- d. Daerah dengan bangunan-bangunan permanen ataupun bangunan yang tidak tahan gempa,

Rencana Kawasan Strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 adalah :

- a. Kawasan Agropolitan; mempunyai nilai strategis ekonomi dan merupakan kawasan strategis kabupaten
- b. Kawasan Kebun Raya Liwa; mempunyai nilai strategis lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; mempunyai nilai strategis lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi
- d. Kawasan PLTP Suoh; mempunyai nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang merupakan kawasan strategis kabupaten.

### Aspek Demografi

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Jumlah Penduduk Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Balik Bukit	21.703	20.456	42.159
2	Sumber Jaya	12.545	11.801	24.436
3	Belalau	6.487	6.063	12.550
4	Way Tenong	17.821	17.092	34.913
5	Sekincau	9.931	9.134	19.065
6	Suoh	9.783	8.852	18.635
7	Batu Brak	7.892	7.309	15.201
8	Sukau	13.153	12.304	25.457
9	Gedung Surian	8.820	8.300	17.120
10	Kebun Tebu	10.705	10.204	20.909
11	Air Hitam	6.462	5.849	12.311
12	Pagar Dewa	9.187	8.145	17.332
13	Batu Ketulis	7.116	6.388	13.504
14	Lumbok Seminung	4.426	3.931	8.357
15	Bandar Negeri Suoh	13.521	11.914	25.435
	Jumlah	159.552	147.742	307.294

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) semester Tahun 2021

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Lampung Barat pada tahun 2021 mulai mengalami kenaikan setelah sebelumnya pada tahun 2020 berkontraksi sebesar -1,14%. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 2,58% dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.7.482,44 milyar rupiah.

Selanjutnya Perbandingan rasio perubahan TPT dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Perkembangan TPT

No	Uraian	Lampung Barat		Nasional	
		Pertumbuhan Ekonomi	TPT	Pertumbuhan Ekonomi	TPT
1	Tahun 2018	5,14	2,74	5,17	5,34
2	Tahun 2019	5,20	1,66	5,02	5,28
3	Tahun 2020	-1,14	2,13	-1,67	7,07
4	Tahun 2021	2,58	2,83	2,58	6,49
5	Rasio Perubahan 2 Tahun terakhir	144,19%	24,73%	164,73%	-8,94%



Selanjutnya Perbandingan rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perbandingan rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional

No	Uraian	Lampung Barat		Nasional	
		Pertumbuhan Ekonomi	persentase penduduk miskin	Pertumbuhan Ekonomi	persentase penduduk miskin
1	Tahun 2018	5,14	13,54	5,17	9,66
2	Tahun 2019	5,20	12,92	5,02	9,22
3	Tahun 2020	-1,14	12,52	-1,67	9,78
4	Tahun 2021	2,58	12,82	2,58	9,71
3	Rasio Perubahan 2 Tahun terakhir	144,19%	2,34%	164,73%	-0,72%

### **PDRB PERKAPITA**

Pada tahun 2021, PDRB Per kapita Lampung Barat ADHB mencapai 24,61 juta rupiah bertambah 1,20 juta rupiah lebih dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 23,41 juta rupiah lebih.

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan perkapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indicator PDRB perkapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **Pertumbuhan PDRB**

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2021 sebesar RP.5,05 triliun rupiah, meningkat tahun 2020 yang sebesar Rp.4,92 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 2,58%. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 sebesar RP.7,48 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp.7,13 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 4,92%.

Kontribusi terbesar pembentukan PDRB ADHB tahun 2021 disumbangkan melalui sektor / Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 47,23% dan sektor / lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85%. Sedangkan sektor / lapangan usaha terendah adalah Pengadaan listrik dan gas sebesar 0,01%.

Tabel 2.4.  
PDRB Kabupaten Lampung Barat (dalam miliar rupiah)

Sektor PDRB	PDRB ADHK		PDRB ADHB	
	2020	2021	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.379,61	2.383,04	3.405,56	3.533,85
B. Pertambangan dan Penggalian	117,48	113,80	186,12	182,10
C. Industri Pengolahan	237,72	250,46	377,07	400,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,87	0,93	1,01	1,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,59	5,71	8,22	8,46
F. Konstruksi	205,68	224,08	284,75	320,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	610,86	665,11	870,03	961,79
H. Transportasi dan Pergudangan	130,40	131,40	187,84	192,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56,38	56,15	96,06	96,23
J. Informasi dan Komunikasi	193,54	205,69	229,66	238,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	87,27	91,21	132,83	146,09
L. Real Estate	229,13	232,58	317,70	324,00
M,N. Jasa Perusahaan	8,67	8,78	13,23	13,40
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300,66	316,68	485,22	509,35
P. Jasa Pendidikan	212,18	216,60	320,95	334,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,03	77,45	110,89	116,42
R, S, T, U. Jasa lainnya	75,24	73,65	104,75	103,20
PRODUK DOMESTIK	4.926,30	5.053,32	7.131,89	7.482,44

REGIONAL BRUTO				
Laju		2,58%		4,92%
JUMLAH PENDUDUK	302.139	303.931	302.139	303.931
PDRB PERKAPITA	16.304.747	16.626.537	23.604.665	24.618.877

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

### INFLASI

Indeks harga konsumen pada bulan Januari 2019 sebesar 137,77 persen dan pada bulan Desember 2019 sebesar 142,28 persen. Dengan kata lain, selama tahun 2019, terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 3,53 persen.

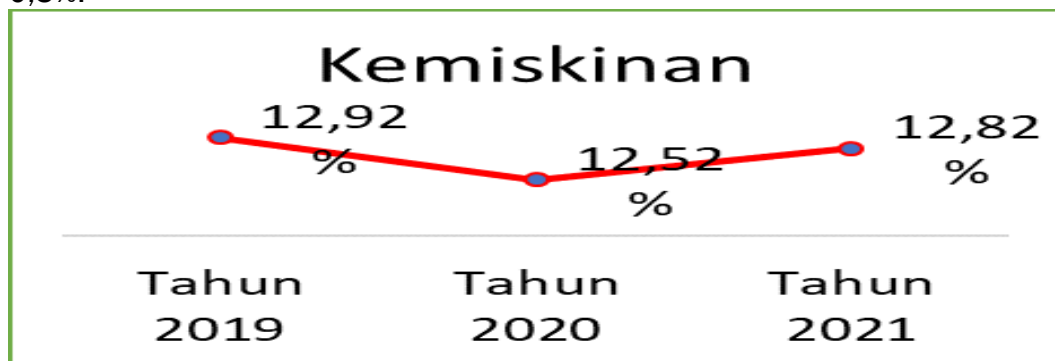
Tabel 2.5.  
Tingkat Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Barat

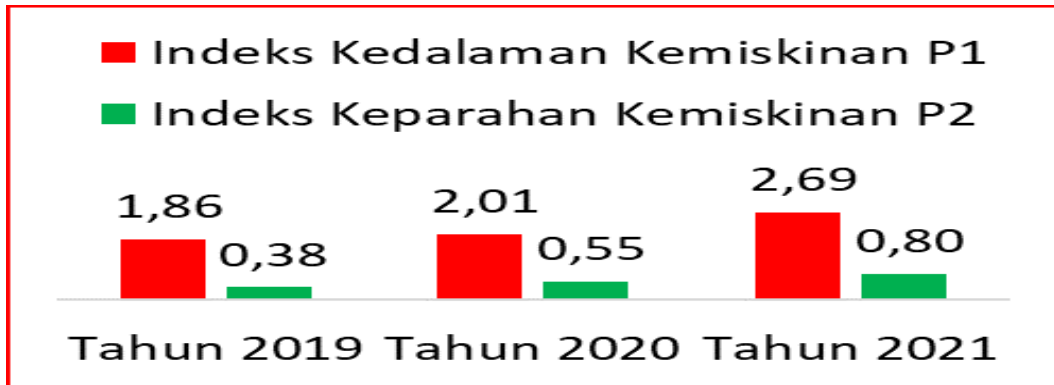
Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Tingkat Inflasi Tahunan	3,14	2,92	3,53	-

Sumber : BPS, 2020

### KEMISKINAN

Salah satu indikator yang penting adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2021 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan sebesar 12,82% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 39.360 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 12,52% setara dengan 38.120 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan sebanyak 0,3%.





Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan Lampung Barat tahun 2020 sebesar 2,01 menjadi 2,69 pada tahun 2021, atau bertambah sebesar 0,68.

Secara umum, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020, namun dampak pandemic *covid19* berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan, yaitu pada tahun 2021 menjadi 12,82%. Hal ini disebabkan dengan banyaknya masyarakat yang harus kehilangan mata pencaharian sebagai akibat banyaknya sector lapangan kerja yang berhenti beroperasi ataupun harus mengalami kebangkrutan akibat pandemic, hal ini juga berdampak pada sector lapangan kerja informal dimana banyak pelaku usaha harus kehilangan usahanya dikarenakan terjadinya penurunan konsumsi masyarakat secara ekstrem. Rangkaian permasalahan tersebut menyebabkan kemampuan ekonomi masyarakat secara ekonomi menurun secara drastis.

Upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi: (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan (4) Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keempat strategi tersebut diimplementasikan dalam program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah terkait. Pada tahun 2021, Kabupaten Lampung Barat ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem, dengan nilai angka kemiskinan ekstrem pendataan tahun 2020 sebesar 5,38% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 16.770 jiwa. Penanganan kemiskinan ekstrem akan menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Barat namun dengan berfokus pada pekon-pekon yang menjadi lokus penanganan melalui upaya spesifik dan terintegratif antar lintas sector terkait yang berfokus pada strategi: (1) menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan (2) meningkatkan penghasilan dan produktivitas warga miskin, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Presiden RI yaitu kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

## INDEKS GINI

Indeks gini Lampung Barat pada tahun 2020 sebesar 0,295, menurun sebesar -0,001 dari tahun 2019. Dimana indeks gini Lampung Barat pada tahun 2019 adalah 0,296.

Indeks gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat, indeks gini yang mendekati angka 0 (nol) mengindikasikan bahwa semakin kecil ketimpangan yang terjadi. Rendahnya indeks gini di Lampung Barat dapat disebabkan karena mayoritas mata pencaharian masyarakat di Lampung Barat adalah pada sector pertanian, dengan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Lampung Barat sebesar 47.23% (Tahun 2021) dan masyarakat yang bekerja pada sector pertanian sebanyak 74,32% (Tahun 2021). Kondisi ini berpengaruh pada keseragaman tingkat pendapatan di masyarakat.

### 2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

#### ANGKA MELEK HURUF

Tabel 2.6.  
Angka Melek Huruf

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Angka Melek Huruf			
	Laki-Laki	98,01	98,26	-
	Perempuan	98,67	96,77	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf (AMH) merupakan indicator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Berdasarkan data susenas BPS angka melek huruf kabupaten lampung barat yang terakhir yaitu pada tahun 2020 sebesar 97,58% dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa dari 100% penduduk ada sekitar 2,42% penduduk lampung barat yang buta huruf. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna memberantas buta huruf, antara lain adalah dengan adanya Program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C) yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya yang tinggal di daerah perdesaan.

#### ANGKA PARTISIPASI KASAR

Tabel 2.7.  
Angka Partisipasi Kasar

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	APK SD	98,68	107,90	108,86
2	APK SMP	99,12	87,40	85,84
3	APK SMA	95,50	74,56	72,59

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan dari aplikasi APK dan APM Kemdikbud, pada tahun 2019 APK SD sebesar 98,68 persen, APK SMP sebesar 99,12 persen dan APK SMA sebesar 95,50 persen. Pada tahun 2020 APK SD sebesar 107,90 persen, APK SMP sebesar 87,40 persen dan APK SMA sebesar 74,56 persen. Sedangkan pada tahun 2021 APK SD sebesar 108,86 persen, APK SMP sebesar 87,40 persen dan APK SMA sebesar 72,59 persen.

### ANGKA PARTISIPASI MURNI

Tabel 2.8.  
Angka Partisipasi Murni

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	APM SD	88,55	99,39	99,41
2	APM SMP	79,12	79,36	78,99
3	APM SMA	59,45	62,28	61,22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Angka partisipasi murni menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni akan selalu lebih rendah dibanding angka partisipasi kasar karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil. Indikator angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini memberikan gambaran kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

### RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Tabel 2.9.  
Rata-Rata Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	RLS	7,85 tahun	8,06 tahun	8,07 tahun

Sumber: BPS, 2022

### HARAPAN LAMA SEKOLAH

Tabel 2.10.  
Harapan Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	HLS	12,24	12,25	12,26

Sumber: BPS, 2022

## ANGKA PUTUS SEKOLAH

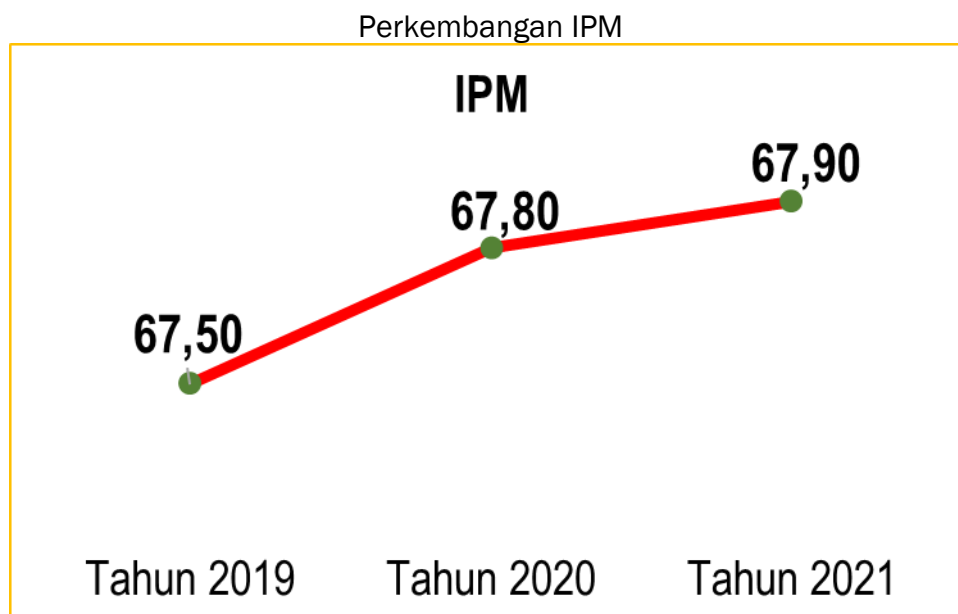
Tabel 2.11.  
Angka Putus Sekolah (jumlah kasus)

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Usia 7 - 12 Tahun (SD) (orang)	66	8	106
2	Usia 13 -15 Tahun (SMP) (orang)	16	3	165

Data pada tabel di atas jumlah yang dihitung adalah jumlah anak putus sekolah pada masing-masing jenjang usia (jenjang sekolah). Jumlah anak putus sekolah tertinggi ada pada jenjang usia 13-15 Tahun (SMP).

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan indikasi yang semakin membaik. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), kategori sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), dan kategori rendah ( $IPM < 60$ ). Berdasarkan kategori tersebut, IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 yang mencapai angka 67,90 masih termasuk dalam kategori sedang.



Sumber : BPS, 2021

IPM Lampung Barat tahun 2021 sebesar 67,90 poin menempati urutan ke 8 dari 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Pencapaian AHH Lampung Barat tahun 2020 adalah 67,58 tahun bertambah sebesar 0,07 tahun menjadi 67,65 pada tahun 2021.



Pada tahun 2020, RLS Lampung Barat adalah 8,06 tahun bertambah sebesar 0,01 tahun menjadi 8,07 tahun pada tahun 2021.

Pada tahun 2020, HLS Lampung Barat adalah 12,25 tahun bertambah sebesar 0,01 tahun menjadi 12,26 tahun pada tahun 2021.

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita Lampung Barat adalah Rp.9.929.000 bertambah sebesar Rp.40.000 menjadi Rp.9.969.000 pada tahun 2021.

#### **TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)**

Tabel 2.12.  
Perkembangan TPT Kabupaten Lampung Barat

Tahun	TPT (%)
2017	0,96
2018	2,74
2019	1,66
2020	2,13
2021	2,83

Sumber : BPS, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 2,83% atau sebesar 5.453 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar 2,13%.

Pencapaian TPT Lampung Barat tahun 2020 yaitu 2,13% merupakan TPT paling rendah artinya pengangguran terbuka di Lampung Barat merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

#### **TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)**

Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 192.567 jiwa atau sekitar 83,23% dari jumlah keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas. Ini berarti jumlah angkatan kerja di Lampung Barat jauh lebih besar daripada bukan angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Lampung Barat 83,48% dari jumlah keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas. Ini berarti jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebesar -0,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun untuk Penyerapan Tenaga Kerja terbesar masih ada di Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Pada tahun 2021 sebesar 43,03%.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib**

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

##### **1. Urusan Pendidikan**

Pembangunan Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga swasta dan masyarakat. Negara sebagai penyelenggara pembangunan di bidang pendidikan harus memiliki semangat kerja keras dan dedikasi tinggi dalam semangat pengabdian, untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat dengan sikap jujur, integritas dan penuh keteladanan dalam membangun pendidikan.

Pemerintah kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan maupun penyediaan fasilitas pendidikan yang ada. Hal ini seiring dengan adanya program wajib belajar 9 tahun yang semakin memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Diharapkan, upaya yang ada ini dapat mengarah pada perbaikan pendidikan penduduk. Beberapa indikator pendidikan yang akan digunakan untuk melihat perkembangan

pembangunan di bidang pendidikan adalah angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang ada.

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Tabel 2.13.  
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Peserta PAUD	5.931	5.835	5531	Orang
2. Jumlah Bangunan PAUD	224	391	399	Unit
3. Jumlah Tenaga Pendidik PAUD	386	556	498	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari TK, Kober, SPS, TPA. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia tiga sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Keadaan PAUD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019 dengan jumlah peserta didik sejumlah 5.931 orang mengalami penurunan jumlah siswa menjadi 5.835 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 5.531 orang. Dari tabel data diatas menandakan penurunan minat masyarakat Lampung Barat untuk menyekolahkan anak-anaknya dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).

Tabel 2.14.  
Jumlah Sekolah PAUD Formal (TK)

Sekolah Taman Kanak-Kanak	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Siswa	4.173	4.027	3.792	Orang
2. Jumlah Bangunan Sekolah TK				Unit
1. Bangunan Baik	95	257	266	Unit
2. Bangunan Tidak Baik	0	2	0	Unit
3. Jumlah Pengelola Sekolah TK				Unit
1. Negeri	18	18	18	Unit
2. Swasta	82	83	85	Unit
4. Jumlah Ruang Kelas Sekolah TK	224	259	266	Ruang Kelas

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Sejalan dengan perkembangan jenjang pendidikan usia dini, data sekolah taman kanak-kanak menunjukkan ketidak stabilan jumlah siswa yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2019 ketahun 2021. Jika dilihat pada kondisi bangunan sekolah, bangunan sekolah TK dengan kondisi baik di tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya untuk merehabilitasi bangunan sekolah merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dibiayai baik melalui APBD Kabupaten Lampung Barat maupun melalui sumber anggaran lainnya sebagai langkah penyediaan bangunan sekolah yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan.

- PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Tabel 2.15.  
Jumlah Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar

Pendidikan Dasar	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Siswa SD	28.789	28.669	28.064	Orang
2. Jumlah Bangunan SD	1572	1631	1.664	Unit
1. Bangunan Baik	1205	1620	1656	Unit
2. Bangunan Rusak	367	11	8	Unit
3. Jumlah Pengelola SD	213	215	216	Unit
1. Negeri	177	178	179	Unit
2. Swasta	36	37	37	Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SD	1572	1631	1664	Ruang
5. Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat	1938	2.339	2.148	Orang
1. < S1	331	555	404	Orang
2. ≥ S1	1607	1784	1744	Orang
6. Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik	1:15	1:13	1:13	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dari tabel diatas perkembangan siswa SD pada tahun 2019 sejumlah 28.789 orang dan tahun 2020 sejumlah 28.669 orang, pada tahun 2021 sejumlah 28.064 siswa. Dari data ini dapat diartikan bahwa perkembangan siswa SD Menurun. Perkembangan bangunan SD Pada Tahun 2019 sejumlah 1.572, pada tahun 2020 sejumlah 1.631 unit dan pada tahun 2021 sebesar 1.664 unit. Dari data bangunan SD sampai dengan ruang kelas SD meningkat hal ini dikarenakan komintmen pemerintah daerah maupun pusat dalam mendukung pembangunan Pendidikan. Perkembangan Tenaga Pendidik

berijazah  $\geq$  S1 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 1.607 menjadi 1.744 pada tahun 2021 dan jumlah tenaga pendidik mengalami peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 1938 menjadi 2.148 pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari rasio siswa per tenaga pendidik pada tahun 2019 dengan rasio 1 orang guru mengajar 15 siswa dan pada tahun 2021 dengan rasio 1 orang guru mengajar 13 siswa, hal ini dapat diartikan bahwa guru SD dilampung barat sudah terpenuhi berdasarkan jumlah.

Tabel 2.16.  
Jumlah Sarpras Pendidikan Menengah Pertama

Pendidikan Menengah Pertama	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Siswa SMP	10467	10525	10.586	Orang
2. Jumlah Bangunan SMP	443	452	472	
1. Bangunan Baik	339	449	464	Unit
2. Bangunan Tidak Baik	104	3	8	Unit
3. Jumlah Pengelola SMP	55	57	60	Unit
1. Negeri	46	48	48	Unit
2. Swasta	9	9	12	Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SMP	443	459	472	Ruang
5. Jumlah Tenaga Pendidik SMP	913	1.305	1.117	Orang
1. < S1	48	254	116	Orang
2. $\geq$ S1	865	1051	1001	Orang
6. Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik	1:12	1:8	1:11	
7. Jumlah Sekolah SMP Sederajat Memiliki Fasilitas Laboratorium	52	56	56	Unit
1. Negeri	44	48	48	Unit
2. Swasta	8	8	8	Unit
8. Jumlah Sekolah SMP Sederajat Memiliki Fasilitas Komputer	55	57	60	Unit
1. Negeri	46	48	48	Unit
2. Swasta	9	9	12	Unit
9. Jumlah Sekolah SMP Sederajat Memiliki Fasilitas Internet				Unit
1. Negeri	-	-	-	Unit
2. Swasta	-	-	-	Unit

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dari tabel diatas perkembangan siswa SMP mengalami peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 10467 dan pada tahun 2021 sejumlah 10.586, Jumlah bangunan pada tahun 2019 sejumlah 443 dan pada tahun 2021 sejumlah 472. Dilihat dari jumlah pembangunan SMP dilampung barat selalu meningkat setiap tahunnya hal ini dikarenakan komitmen kabupaten lampung barat dalam peningkatan mutu Pendidikan.

- PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

Tabel 2.17.  
Jumlah Sarpras Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
<b>1. Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja</b>				
1. Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja	3	3	3	Unit
2. Jumlah Kelas Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja	3	3	3	Ruang
3. Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja				Orang
4. Jumlah Tenaga Pengajar Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja	6	6	6	Orang
<b>2. Pendidikan Kesetaraan</b>				
<b>1. Pendidikan Kesetaraan Paket A</b>				
1. Jumlah Siswa	124	124	106	Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar	12	12	12	Orang
<b>2. Pendidikan Kesetaraan Paket B</b>				
1. Jumlah Siswa	444	393	362	Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar	23	23	23	Orang
<b>3. Pendidikan Kesetaraan Paket C</b>				
1. Jumlah Siswa	600	909	787	Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar	29	29	29	Orang
<b>3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)</b>				
<b>1. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat</b>				
1. Jumlah Peserta Pusat Kegiatan Belajar	1168	1326	1255	Orang

Pendidikan Non Formal		Tahun			Satuan
		2019	2020	2021	
	Masyarakat				
	2. Jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	64	64	64	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Pendidikan non formal adalah langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah ataupun masyarakat yang akan meningkatkan kompetensinya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan ataupun untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya pendidikan non formal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

- Rasio Sekolah dan Siswa

Tabel 2.18.  
Rasio jumlah sekolah terhadap jumlah siswa

JENJANG	2020	2021
SD	1:134	1:130
SMP	1:185	1:177

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Sesuai dengan Permendikbud nomor 23 Tahun 2013, Pasal 2 Poin 2 dengan perbandingan rasio siswa dengan rombongan belajar untuk jenjang SD/MI minimal 20, dan tidak lebih dari 32 orang, untuk SMP/MTs minimal 20, dan tidak melebihi 36 orang maka jika di ansumsikan jumlah rombel SD/MI sebanyak 6 tingkat maka standar rasio sekolah terhadap jumlah siswa 1:120 dan untuk SMP/MTs sebanyak 3 tingkat maka standar rasio sekolah terhadap jumlah siswa per sekolah adalah 1:60. Berdasarkan data tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel maka untuk rasio sekolah terhadap jumlah siswa di Kabupaten Lampung Barat sudah terpenuhi .

- Data Tenaga Pendidik Bersertifikat

Tabel 2.19.  
Tenaga Pendidik Bersertifikat Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Penerima	Golongan per Jenjang Pendidikan	Jumlah Penerima per Golongan
1	TK	32	III IV	27 5
2	Pengawas	24	IV	24



No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Penerima	Golongan per Jenjang Pendidikan	Jumlah Penerima per Golongan
3	SD	830	II	1
			III	402
			IV	427
4	SMP	316	II	1
			III	176
			IV	139
Jumlah				1.202

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total guru PNS sejumlah 1.796 orang yang sudah bersertifikat pendidik sejumlah 1.202 orang atau 66,93% guru sudah memiliki sertifikat sertifikasi.

### CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Bidang urusan Pendidikan yang menjadi urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Kabupaten Lampung Barat yaitu :

- a. Pendidikan Dasar
- b. Pendidikan Kesetaraan
- c. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.20.  
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 - 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	85,92 %	100%	92,43 %	100%	88,98 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau	100%	15%	100%	45,98 %	100%	31,01 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan						
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	64%	100%	86.45 %	100%	40%

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

## 2. Urusan Kesehatan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja urusan Kesehatan Tahun 2021. Indikator pencapaian pembangunan urusan Kesehatan pada tahun 2021 tertuang pada penjelasan di bawah ini

### Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014).

AKI menunjukkan kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Target Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 AKI di Indonesia saat ini masih berada pada angka 305/100.000 KH dan Provinsi Lampung pada angka 210/100.000 KH. AKI Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017 - 2021 tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.21.  
Angka Kematian Ibu

Tahun	Angka Kematian Ibu
2017	104,5 /100.000 KH
2018	88,7 /100.000 KH
2019	69,1/100.000 KH
2020	72,4/100.000 KH
2021	145,6/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Adapun perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian Ibu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2017 - 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.22.  
Perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian ibu

Target 2021	Realisasi				
	2021	2020	2019	2018	2017
121	145,6 8 kasus	72,4 4 kasus	69,1 4 kasus	88,7 5 kasus	> 102 6 kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Capaian AKI di tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus kematian ibu di tahun 2021 sebanyak 8 kasus dengan AKI 145,6/100.000 KH jika dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai AKI ini menjadi perhatian serius mengingat target akhir RPJMD yaitu AKI 110 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 152,91%.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan ibu yang berdampak pada terjadinya kasus kematian ibu secara garis besar :

- a. Kematian yang terjadi akibat dari 3 keterlambatan: terlambat mengambil keputusan, terlambat untuk mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat untuk mendapatkan penanganan.
- b. Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di lingkungannya.
- c. Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan ibu antara kabupaten dan provinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah.
- d. Keterbatasan kepemilikan jaminan pemeliharaan Kesehatan
- e. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya akses pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan menyumbang 3 kasus kematian Ibu

Faktor - faktor yang berkontribusi untuk menurunkan kasus kematian ibu :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin di luar kuota.
- c. Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan program, dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai dengan di daerah sulit menjadikan pemberian pelayanan kesehatan dalam hal ini untuk ibu hamil/bersalin jadi lebih mudah terjangkau.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga bidan.
- e. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah & pusat terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui program BOK dan Jampersal yang digunakan untuk pemberian akses bagi ibu hamil yang akan melakukan persalinan.

- f. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten terutama bagi ibu hamil yang rumah tinggalnya jauh dari fasyankes dan meningkatkan jumlah persalinan di fasyankes serta menurunkan kasus komplikasi yang bias menimbulkan kematian baik bagi ibu , bayi baru lahir & Ibu Hamil yang rumah tinggalnya jauh dari faskes.
- g. Peningkatan sarana dan ketersediaan tenaga Spesialis Obstetri dan Gynecology pada fasyankes rujukan ( RSUD Alimuddin Umar)

Angka Kematian Bayi (AKB)

Tabel 2.23.  
Angka Kematian Bayi

Tahun	Angka Kematian Bayi
2017	2.96/1.000 KH
2018	3,02/1.000 KH
2019	3.63/1.000 KH
2020	2.90/1.000 KH
2021	4,55/1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Tabel 2.24.  
Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi

Target 2021	Realisasi				
	2021	2020	2019	2018	2017
4,1	4,55 25 kasus	2,9 /1000KH 16 kasus	3,6/1000KH 21 kasus	3,02/1000KH 17 kasus	2,96/1000KH 17 kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Pada tahun 2021 jumlah kelahiran hidup sebanyak xx dengan kasus kematian bayi sebanyak 25 kasus sehingga secara statistik AKB tercatat sebesar 4,5 / 1.000 KH . Angka ini melampaui jika dibandingkan dengan target AKB pada RPJMD Tahun 2021 yakni 4,1/1000 KH. Kasus kematian bayi di Lampung Barat secara keseluruhan terjadi pada periode neonatus atau usia 0-28 hari dengan antara lain Asfiksi, BBLR, kelainan kongenital, aspirasi dan pneumonia sebagai penyebab kematian.

Faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan ibu & anak yang berdampak pada meningkatnya kasus kematian secara garis besar:

- a. Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di lingkungannya.
- b. Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan anak antara kabupaten dan provinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah.

- c. Masih rendahnya pengetahuan & kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya.

Faktor - faktor yang berkontribusi untuk menurunkan kasus kematian bayi:

- a. Adanya kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin luar kuota.
- c. Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan program, dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai dengan di daerah sulit menjadikan pemberian pelayanan kesehatan jadi lebih mudah terjangkau.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga bidan seperti pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR.
- e. Meningkatnya komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui program BOK dan adanya kegiatan DAK Jampersal yang memberikan kemudahan akses untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan.
- f. Peningkatan sarana dan ketersediaan tenaga Spesialis Obstetri & Gynecology pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan ( RSUD Alimuddin Umar)

Upaya yang dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain:

- a. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan program KIA secara memadai, peningkatan jumlah tenaga dan pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan.
- b. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon.
- c. Perbaiki sistem pencatatan & pelaporan program KIA (PWS KIA)

- Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Tabel 2.25.  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
Kasus Balita Gizi Buruk	6	2	2	1	1
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	6	2	2	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Berdasarkan jumlah kasus Balita Gizi Buruk pada tahun 2021 yakni sebanyak 1 kasus dan telah mendapatkan perawatan, maka capaian cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan telah mencapai 100% sesuai target RPJMD Tahun 2021

Tabel 2.26.  
Data stunting di Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Prosentase Stunting	Target Nasional	Keterangan
1	2018	32,96%	28%	Hasil Riskesdas Kementerian Kesehatan Tahun 2018
2	2019	22,23%	27,7%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019
3	2020	-	-	Tidak ada Survei Status Gizi (SSGI) di Tahun 2020
4	2021	22,7%	24,4%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat selisih yang signifikan antara data stunting tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya, data prevalensi stunting Tahun 2020 adalah hasil input data kasus stunting oleh petugas gizi di setiap puskesmas ke dalam aplikasi EPPBGM, dikarenakan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI). Upaya penanganan untuk percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Lampung Barat telah dimulai di tahun 2022 ini, dengan telah ditetapkan 12 (dua belas) pekon lokus yang menjadi prioritas penanganan di tahun 2022. Rencana penanganan stunting dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait terutama untuk mengintervensi persoalan yang menjadi berkontribusi pada tingginya kasus stunting baik yang menjadi persoalan gizi spesifik (pada sector kesehatan) ataupun persoalan gizi sensitif terutama pada cakupan layanan yang terhitung masih sangat rendah, antara lain: pelaksanaan BKB, ketahanan pangan keluarga melalui program KRPL di pekon, Family Development Service (FDS) bagi KPM PKH, dan program lainnya

Faktor yang menentukan keberhasilan dan penghambat keberhasilan upaya meningkatnya gizi masyarakat, antara lain:

- 1) Faktor penunjang keberhasilan
  - a. Adanya program & kegiatan dari pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan status gizi masyarakat
  - b. Berjalannya program perbaikan gizi antara lain pemberian obat gizi (tabelt tambah darah pada ibu hamil, tambah darah remaja putri, pemberian kapsul vitamin A serta balita dan ibu nifas dan pemberian mineral mix untuk balita gizi buruk ) serta pemberian PMT untuk balita KEP dan ibu hamil KEK.
  - c. Adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang memberikan daya ungkit terhadap program gizi dalam pemberian dan dukungan terhadap kegiatan penyediaan dana transportasi untuk

- kegiatan luar gedung Puskesmas seperti penyuluhan gizi di posyandu, sekolah kelas ibu hamil & pemberian PMT lokal dan bahan baku lokal.
- d. Kabupaten Lampung Barat memiliki 260 posyandu.

2) Faktor penghambat keberhasilan

- a. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai gizi keluarga dan diperburuk dengan status ekonomi masyarakat sehingga meskipun ada kesadaran namun secara pembiayaan tidak mampu.
- b. Jumlah posyandu yang masih sangat kurang dibandingkan target yang harusnya ada berpengaruh terhadap daya jangkau petugas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk balita.
- c. Peran aktif masyarakat masih rendah dalam mengakses pelayanan kesehatan untuk balita di posyandu.
- d. Pengetahuan, keterampilan dan kesanggupan beberapa tenaga masih kurang dalam tata laksana gizi buruk.
- e. Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program gizi di Lampung Barat.
- f. Peran lintas sektor yang masih sangat kurang, pemahaman yang ada selama ini adalah bahwa masalah gizi di masyarakat adalah semata-mata tanggung jawab Dinas Kesehatan.

3) Upaya yang dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain:

- a. Melaksanakan pelatihan Tata Laksana Anak Gizi Buruk bagi petugas kesehatan di puskesmas.
- b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, & kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- c. Melakukan pelacakan balita gizi buruk.
- d. Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan posyandu.
- f. Pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa tablet besi) dan balita (berupa makanan pendamping ASI) dari keluarga miskin.

- Angka Kesakitan

Angka Kesakitan adalah insidensi dari suatu penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. Morbiditas berhubungan dengan terjadinya atau terjangkitnya penyakit di dalam populasi.

A. PENYAKIT MENULAR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indicator program masing-masing jenis penakit menular yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan, capaian indicator tersebut secara rinci dalam uraian di bawah ini

- TBC

Tabel 2.27.

Angka Penemuan BTA (+) di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2021

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS BARU YANG DITEMUKAN	TARGET KASUS	CDR (%)	SR (%)
1	2017	237	380	62,37	
2	2018	281	1.267	22,18	
3	2019	279	996	28,01	92%
4	2020	207	980	20,9	91,47%
5	2021	230	530	43,39%	23,14%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Capaian CDR TBC pada Tahun 2021 adalah sebesar 43,39% artinya sebanyak 230 kasus baru yang ditemukan dan diobati dari 530 target kasus yang harus ditemukan. Masih rendahnya CDR ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah sebagian besar petugas pengelola program TBC di Puskesmas merangkap sebagai petugas surveilan dan laboratorium, dimana pada tahun 2021 ini lebih banyak terfokus pada upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Untuk Succes Rate (SR) pada tahun 2020 adalah sebesar 91,47 % sudah mencapai target yaitu 90%. Sedangkan untuk Succes Rate pada tahun 2021 baru mencapai 23,14% dikarenakan belum semua kasus belum dapat dievaluasi keseluruhan. Hal tersebut disebabkan kasus yang ditemukan oleh petugas pada TW II sampai IV masih belum dapat dievaluasi keseluruhan dikarenakan masih dalam masa pengobatan.

- HIV

Tabel 2.28.

Jumlah Penderita HIV Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	KASUS BARU (ORG)	KOMULATIF (ORG)	MENINGGAL (ORG)	KET
2016	0	34	5	-
2017	0	29	7	17 Pindah
2018	0	5	0	-
2019	1	6	0	-
2020	3	9	0	0
2021	1	10	0	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022



- DBD

Tabel 2.29.  
Jumlah Penderita DBD Kabupaten Lampung Barat TAHUN 2014 – 2021

No	Puskesmas	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sumber Jaya	0	1	5	0	5	0	16	0
2	Gedung Surian	0	0	2	0	0	2	1	0
3	Fajar Bulan	0	2	0	0	0	7	8	0
4	Sekincau	0	0	0	0	0	1	6	0
5	Srimulyo	0	0	0	2	0	0	2	0
6	Kenali	0	1	1	0	1	3	1	0
7	Batu Brak	0	0	5	0	0	8	4	0
8	Liwa	0	24	50	5	5	22	29	6
9	Buay Nyerupa	0	3	11	0	0	25	15	1
10	Lombok	0	0	1	0	0	7	2	0
11	BNS	0	0	0	0	1	0	0	0
12	Pagar Dewa	0	0	0	0	2	3	4	0
13	Kebun Tebu	0	0	0	0	3	5	5	1
14	Air Hitam	NA	NA	0	1	0	2	0	0
15	Batu Ketulis	NA	NA	1	0	0	10	3	0
Kabupaten		0	31	76	8	18	95	96	8

Sebagai salah satu penyakit zoonosis yang terkait dengan kualitas lingkungan mengakibatkan upaya promotif dan preventif yang dilakukan di tatanan rumah tangga melalui upaya penyehatan lingkungan maupun intervensi pada keluarga dengan resiko masalah kesehatan menjadi upaya kunci keberhasilan program pengendalian DBD di masyarakat.

Penyediaan regimen obat maupun laboratorium obat akan meningkatkan kemungkinan deteksi dan penalaksanaan menjadi lebih akurat.

- MALARIA

Tabel 2.30.  
Angka Insidens Malaria Per Diobati Per Mil Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017- 2021

No	TAHUN	API
1.	2017	0,03
2.	2018	0,017
3.	2019	0,015
4.	2020	0
5.	2021	0

API malaria Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah 0, dimana selama tahun 2021 tidak ada kasus malaria di Kabupaten Lampung Barat baik kasus import maupun kasus indigenious/local.

Keberhasilan eliminasi malaria pada tahun 2018 berdampak pada tidak ditemukannya kasus positif malaria. Keterlibatan aktif masyarakat untuk menjaga kondisi tersebut menjadi kunci tidak terjadinya penularan local malaria di Kabupaten Lampung Barat.

- PENYAKIT KECACINGAN

Tabel 2.31.

Capaian Pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 - 2021

NO	PUSKESMAS	2018	2019	2020	2021
1	SUMBER JAYA	98,7	100,00	100,00	100%
2	BUNGIN	101,3	73,28	100,00	100%
3	FAJAR BULAN	104,9	100,00	100,00	100%
4	SEKINCAU	97,5	100,00	100,00	101,86%
5	SRIMULYO	92,7	99,64	99,69	99,69%
6	KENALI	97,7	99,01	98,99	98,84%
7	BATU BRAK	96,0	100,00	100,00	100%
8	LIWA	98,2	133,18	103,31	100%
9	B. NYERUPA	100,8	100,00	100,00	100%
10	LOMBOK	78,8	86,14	106,13	89,69%
11	B.N.SUOH	99,5	100,00	100,00	100%
12	PAGAR DEWA	96,8	100,64	100,00	100%
13	KEBUN TEBU	102,2	100,00	97,33	99,71%
14	BATU KETULIS	99,2	99,84	100,00	99,01%
15	AIR HITAM	99,2	100,00	100,00	100%
KABUPATEN		98,8	101,77	99,94	99,26%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

- PENYAKIT TIDAK MENULAR

Tabel 2.32.

Kasus Kesakitan Penyakit Tidak Menular (20 besar penyakit)

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Hipertensi	8.036	Hipertensi	4.210	Hipertensi	18.864
Obesitas	3.641	Obesitas	1.017	Diabetes Mellitus	3.022
Diabetes Mellitus	2.106	Diabetes Mellitus	758	Obesitas	1.891
Asma Bronkiale	1.338	Asma Bronkiale	644	Asma Bronkiale	676
Kecelakaan Lalin	753	Osteoporosis	336	Kecelakaan Lalin	623
Gagal jantung	326	Kecelakaan Lalin	269	Osteoporosis	222

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Osteoporosis	291	Penyakit jantung coroner	66	Penyakit jantung coroner	122
Stroke	279	PPOK	64	PPOK	97
PPOK	185	Gagal jantung	61	Stroke	80
Penyakit jantung coroner	120	Stroke	23	Gagal jantung	64
Penyakit tiroid	83	Penyakit tiroid	15	Cedera Lain	27
Tumor payudara	63	Tumor payudara	14	Penyakit tiroid	20
Ginjal kronik	31	Retinoblastoma	8	Cedera akibat KDRT	9
Retinoblastoma	16	SLE	7	Tumor payudara	6
SLE	14	Ginjal kronik	7	Ginjal kronik	3
Thalassemia	8	Thalassemia	5	Kanker serviks	2
Leukimia	4	Kanker serviks	2	Leukimia	2
Kanker serviks	4	Leukimia	1	SLE	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

- Sumber Daya Kesehatan

Tabel 2.33.  
Data Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2019		2020		2021	
		Milik Pemda	Milik Swasta	Milik Pemda	Milik Swasta	Milik Pemda	Milik Swasta
1	Rumah Sakit Umum	1	0	1	0	1	0
2	RSIA	1	0	1	0	1	0
3	Apotek	0	18	0	18	0	28
4	Laboratorium Kesehatan	0	0	0	0	0	0
5	Puskesmas Rawat Inap	12	0	15	0	15	0
6	Puskesmas Non Rawat Inap	3	0	0	0	0	0
7	Puskesmas Pembantu	37	0	37	0	37	0
8	Puskesmas keliling	21	0	21	0	21	0
9	Ambulance	13	0	13	0	13	0
10	Klinik Pratama	0	0	0	4	0	4
Jumlah		88	18	88	22	88	32

Tabel 2.34.  
Jumlah tenaga medis di fasilitas kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun  
2021

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Perawat	Bidan	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Teknologi Laboratorium	Tenaga Teknik Biomedica	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasia	Apoteker
1	Lombok	0	2	0	0	8	21	1	1	1	0	0	0	1	1
2	Buay Nyerupa	0	2	0	0	17	26	4	0	1	0	0	0	1	1
3	Liwa	0	2	1	0	24	35	3	2	2	0	0	0	2	1
4	Batu Brak	0	2	0	0	28	27	0	2	1	0	0	0	0	2
5	Kenali	0	1	0	0	15	26	1	1	1	0	0	0	0	1
6	Bandar Negeri Suoh	0	2	0	0	17	34	0	1	1	0	0	0	1	1
7	Srimulyo	0	2	1	0	15	27	3	1	1	0	0	0	0	2
8	Batu Ketulis	0	2	0	0	10	23	1	2	1	0	0	0	0	1
9	Sekincau	0	2	0	0	10	35	1	1	1	0	0	0	0	2
10	Pagar Dewa	0	2	1	0	8	22	0	1	2	0	0	0	1	2
11	Fajar Bulan	0	2	1	0	25	45	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Air Hitam	0	2	0	0	18	32	0	1	3	0	0	0	1	1
13	Bungin	0	2	0	0	22	28	0	1	2	0	0	0	1	1
14	Kebun Tebu	0	2	1	0	21	28	1	1	1	0	0	0	0	1
15	Sumber Jaya	0	3	0	0	22	28	3	2	2	0	0	0	1	1
16	RSUD Alimudin Umar	12	9	1	1	111	34	37	17	10	0	0	0	6	7
17	RSIA Bunda	1	3	0	0	12	28	2	2	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	13	42	5	1	383	499	57	37	31	0	0	0	15	27

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022.

## Data Capaian SDGs

Tabel 2.35.  
Capaian SDGs Sektor Kesehatan

Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target (2021)	Realisasi 2021
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1(a)	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)	Dinas Kesehatan	Persen	15 %	16,1 %
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula					
2.2.1*	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	24 %	22,7 %
2.2.1(a)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	Dinas Kesehatan	Persen	24 %	5,57%
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen (Wasting)	7,8 %	7,5 %
			Persen (Obesitas)	-	-
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	42 %	14,78%
2.2.2(b)	Persentase remaja yang mengkonsumsi Fe (zat besi)	Dinas Kesehatan	Persen	52 %	92,20%
2.2.2(c)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	40 %	79,31%

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target (2021)	Realisasi 2021
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup					
3.1.1(a)	Kasus Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Kasus	6 kasus	8 kasus
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persen	95%	94,29%
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	93%	94,03%
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000)					
3.2.1(a)	Kasus Kematian Balita	Dinas Kesehatan	Kasus	23 kasus	25 kasus
3.2.2(a)	Kasus Kematian Neonatal	Dinas Kesehatan	Kasus	20 kasus	20 kasus
3.2.2 (b)	Kasus Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	Kasus	23 kasus	25 kasus
3.2.2(c)	Persentase kab/kota yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persen	95%	95,3%
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya					
3.3.1(a)	Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun	Dinas Kesehatan	Persen		
3.3.2(a)	Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/case notification rate) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Persen	172	74,8
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	API per 1000 pddk	<1	0
3.3.3(a)	Angka kesakitan positif malaria (API) per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	API per 1000 pddk	0	0
3.3.4*	Insiden hepatitis B per 100.000 populasi.	Dinas Kesehatan	Persen		

Laporan Data Pemantauan Covid-19 Di Lampung Barat Tahun 2021  
(Laporan Berdasarkan Buku Pedoman Revisi 5, Kemenkes )

Data tanggal 31 Desember 2021

No	Puskesmas	Kasus Suspek		Kasus Probable			Kasus Konfirmasi					Selesai Isolasi		Kontak Erat		Pelaku Perjalanan			Discarded	Kematian
		Baru	Dalam Pantauan	Baru	Lama	Total	Kasus Baru			Kasus Lama	Total	Konfirmasi	Kasus Baru	Dalam Pantau An	Kasus Baru	Screening	Total	Jumlah Kasus	Konfirmasi	
							Ber Gejala	Tidak Ber Gejala	Jumlah											
1	Liwa	0	0	0	1	1	0	0	0	805	805	772	0	0	0	6327	6.327	2410	33	
2	Pagar Dewa	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196	190	0	0	0	3665	3.665	444	6	
3	Batu Ketulis	0	0	0	0	0	0	0	0	143	143	137	0	0	0	2604	2.604	453	6	
4	Kenali	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	101	0	0	0	1933	1.933	291	4	
5	Batu Brak	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204	192	0	0	0	3629	3.629	797	12	
6	Buay Nyerupa	0	0	0	1	1	0	0	0	134	134	124	0	0	0	2524	2.524	249	10	
7	Lombok	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	51	0	0	0	4421	4.421	421	1	
8	Sumber-jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172	167	0	0	0	2991	2.991	680	5	
9	Sekincau	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	207	0	0	0	4436	4.436	905	21	
10	Air Hitam	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	58	0	0	0	2505	2.505	425	3	
11	Kebun Tebu	0	0	0	0	0	0	0	0	302	302	293	0	0	0	3085	3.085	1011	9	
12	G. Surian	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	93	0	0	0	1886	1.886	566	8	
13	Srimulyo	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	152	0	0	0	5400	5.400	309	3	
14	BN Suoh	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	70	0	0	0	3743	3.743	162	7	
15	Fajar Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	177	0	0	0	3953	3.953	535	10	
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.102</b>	<b>53.102</b>	<b>9658</b>	<b>138</b>	

Pada Tahun 2021 terjadi lonjakan kasus Covid 19 yang cukup tinggi terutama pada periode bulan Juni sampai dengan September 2021 dan menurun pada bulan Oktober hingga pada bulan Desember tidak lagi terdapat kasus Covid 19 positif terkonfirmasi. Tingginya kasus Covid 19 terjadi di seluruh kabupaten di Indonesia. Vaksinasi, tracing, testing dan treatment serta

penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat menjadi kunci keberhasilan penurunan kasus Covid

Tabel 2.36.  
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 - 2021

No.	Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	98,9 %	100%	87.5 %	100%	92,44%
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	92,3 %	100%	85.1 %	100%	93,33%
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	96,7 %	100%	86.6 %	100%	92,04%
4	Setiap balita mendapatkan yankes sesuai standar	100%	55,3 %	100%	82.5 %	100%	50,32%
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	96,6 %	100%	52.9 %	100%	88,39%
6	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	19,5 %	100%	8.3 %	100%	24,5%



No.	Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	56,01%	100%	27.1%	100%	58,05%
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	34,9%	100%	19.1 %	100%	28,1%
9	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	29,9%	100%	74.2 %	100%	124,95%
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	71,2%	100%	92.5 %	100%	98,85%
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	36.3 %	100%	71,06%
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS,	100%	100%	100%	76.4 %	100%	83,69%

No.	Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	waria/trans gender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar						

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian target SPM Bidang Kesehatan antara lain: (1) keterbatasan jenis SDM Kesehatan pada 14 puskesmas dari total 15 UPT Puskesmas yang ada berdampak terhadap capaian program yang dijalankan oleh puskesmas sehingga mempengaruhi capaian kinerja SPM secara keseluruhan; (2) Keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan yang paling pokok terlebih lagi pada tahun 2020 dan 2021 yang dipengaruhi oleh dampak pandemic covid19 di mana terdapat realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran.

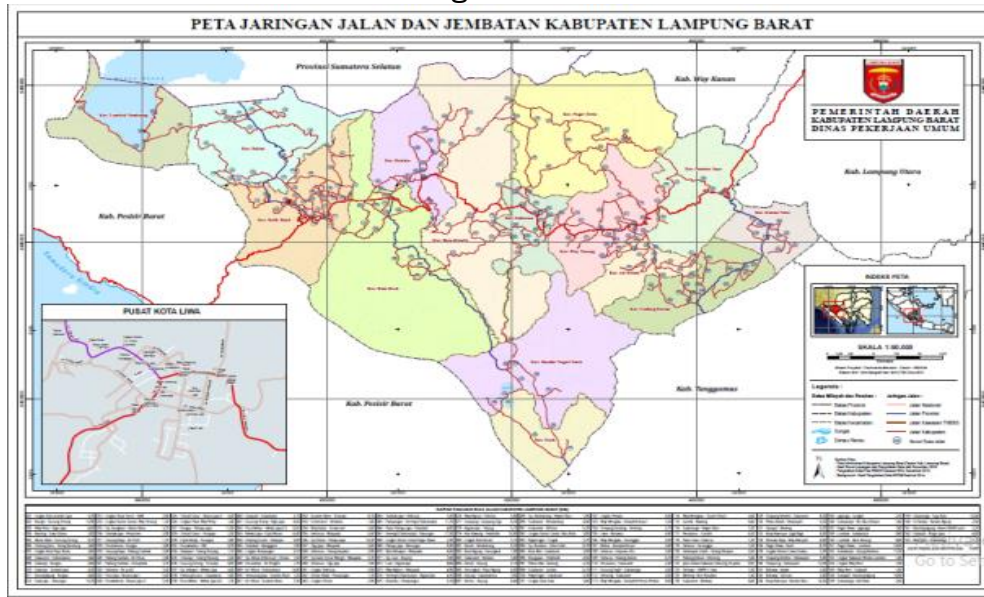
### 3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 5 sasaran.

#### Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan dan jembatan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang.

Gambar 2.6.  
Peta Jaringan Jalan dan Jembatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, 2020

Tabel 2.37.  
Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan				
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota	724	724	724	Km
1. Kondisi Baik	331,82	338,542	354,04	Km
2. Kondisi Sedang	118,40	116,447	124,52	Km
3. Kondisi Rusak Ringan	63,68	109,667	133,68	Km
4. Kondisi Rusak Berat	210,10	159,827	111,76	Km
2. Panjang Jalan Desa	382,46	382,46	382,46	Km
1. Kondisi Baik	129,761	141,391	151,528	Km
2. Kondisi Sedang	26,91	26,91	26,91	Km
3. Kondisi Rusak Ringan	28,1	28,1	28,1	Km
4. Kondisi Rusak Berat	197,689	186,059	175,922	Km

Jalan dan Jembatan		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
2. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan					
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota					Km
1. Di Aspal		313,13	325,087	338,855	Km
2. Di Beton		180,11	182,344	199,959	Km
3. Kerikil		70,14	83,618	61,781	Km
4. Tanah		140,61	132,951	121,066	Km
3. Jembatan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan					
1. Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota		180	180	180	Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik		109	111	144	Unit
2. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Sedang		58	58	26	Unit
3. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Ringan		5	3	3	Unit
4. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Berat		8energi baru	8	7	Unit
2. Jumlah Jembatan Desa		3	3	3	Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik		2	2	3	Unit
4	Kondisi Jalan Mantap	62,18	62,84	66,10	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jalan kabupaten Lampung Barat dengan total panjang 724 km dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk tahun 2021 kondisi jalan mantap ditargetkan 66,09 persen terealisasi sebesar 66,10 persen. Total panjang jalan desa 382,46 km, jalan desa kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,65 persen pada tahun 2021. Dan untuk target jalan mantap pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen.

#### Irigasi

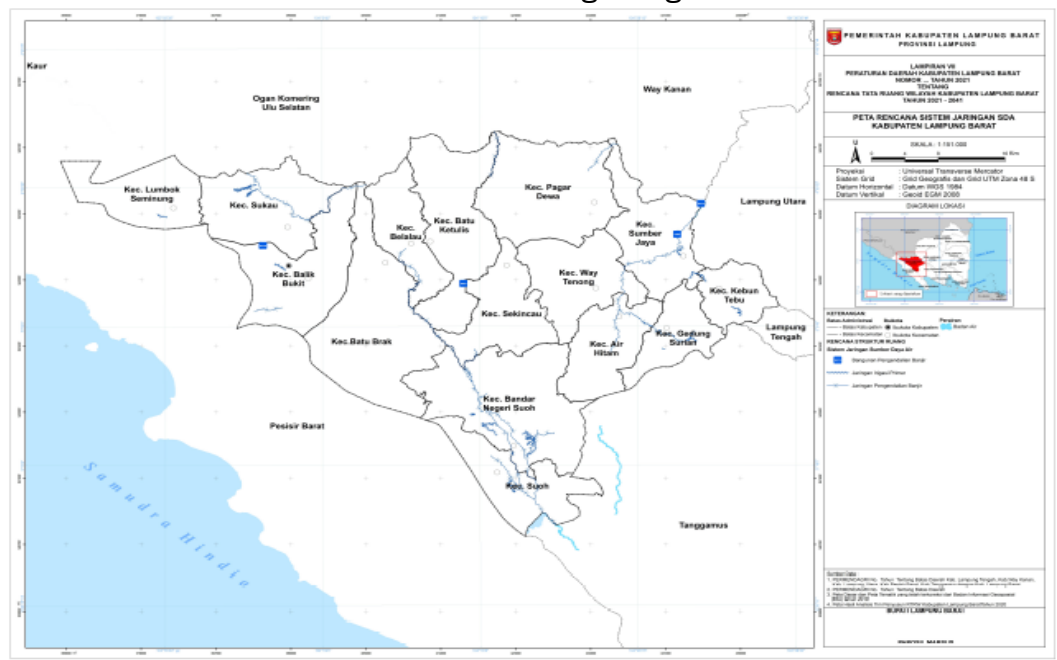
Pada bidang pertanian, air merupakan faktor utama penentu kelangsungan produksi pertanian, guna menjamin keberlanjutan peningkatan produksi pertanian tentunya sumber daya air melalui jaringan irigasi dengan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) sangatlah penting. Data jaringan irigasi/pengairan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.38.  
Kondisi Jaringan Irigasi/Pengairan

Jaringan Irigasi/Pengairan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis	126.371	126.371	126.371	Meter
1. Panjang Saluran Irigasi Primer				
1. Saluran Kondisi Baik	62.447	67.910	70.368	Meter
2. Saluran Kondisi Sedang	27.897,35	24.346,40	18.752,5	Meter
3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	15,021,65	13.109,60	10.097,5	Meter
4. Saluran Kondisi Rusak Berat	21.005	21.005,	27.153,5	Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi	118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	5.425,2	5425,2	5425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis	11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Gambar 2.7.  
Peta Jaringan Irigasi



Total daerah irigasi adalah 11.442,51 ha dengan area tanam 5.307 ha dengan indeks pertanaman sebesar 121,02 persen dengan rata-rata produksi panen 5,25 ton per hektar. Faktor produksi ini sangat dipengaruhi oleh sistem pengairan irigasi yang ada. Dari data diatas menunjukkan bahwa tahun 2021 panjang saluran irigasi teknis 126.371 meter dan pada tahun 2021 panjang saluran teknis tetap sedangkan saluran dengan kondisi baik pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen.

#### Sumber daya air

Lampung Barat dialiri dua sungai yaitu Way Besay dan Way Semangka serta memiliki danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Panjang sungai Way Semangka ± 95,47 km, dengan hulu sungai berada di gunung Pesagi dan gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan bermuara di Teluk Semaka (Kabupaten Tanggamus). Beberapa anak sungai yang mengalir menuju sungai Semaka yang berada di Kabupaten Lampung Barat antara lain: Way Kegeringan, Way Lebuy, Way Hantatai, Way Haru, Way Maraman, Way Meneng, Way Ngarip, Way Melebui Balak, Way Andarumon, Way Pampangan, Way Bumbon, Way Bata, Way Laga, dan Way Pasir. Sedangkan beberapa anak sungai bermuara ke Way besai. Anak-anak sungai tersebut berpotensi untuk pengembangan mikrohidro (kapasitas <10 MW), pemanfaatan air baku untuk irigasi, dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Adapun data sempadan sungai dan danau sebagai berikut :

Tabel 2.39.  
Kondisi Sempadan Sumber Air

Sempadan Sumber Air		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Nama Sungai					
1	Way. Semangka	48,63	48,63	48,63	Meter
2	Way. Giham	15,6	15,6	15,6	Meter
3	Way. Samang	11,36	11,36	11,36	Meter
4	Way. Pahayu	11,13	11,13	11,13	Meter
5	Way. Uluhan	10,86	10,86	10,86	Meter
6	Way. Laai	9,97	9,97	9,97	Meter
7	Way. Warkuk	19,07	19,07	19,07	Meter
8	Way. Tenung	17,5	17,5	17,5	Meter
9	Way. Kelahok	7,14	7,14	7,14	Meter
10	Way. Campang	15,71	15,71	15,71	Meter
11	Way. Pepuk	12,57	12,57	12,57	Meter
12	Way. Penjaringan	12,46	12,46	12,46	Meter
13	Way. Kejadian	12,33	12,33	12,33	Meter
14	Way. Sepanas	12,31	12,31	12,31	Meter
15	Way. Subukau	11,68	11,68	11,68	Meter
16	Way. Panas	10,86	10,86	10,86	Meter
17	Way. Cawang Kiri	11,01	11,01	11,01	Meter
18	Way. Anderlung	10,22	10,22	10,22	Meter
19	Way. Simpang Balak	9,67	9,67	9,67	Meter
20	Way. Mayus	9,33	9,33	9,33	Meter
21	Way. Haru	8,23	8,23	8,23	Meter
22	Way. Ramelai	6,18	6,18	6,18	Meter
23	Way. Setunggau	6,01	6,01	6,01	Meter
24	Way. Penayuhan	5,18	5,18	5,18	Meter
25	Way. Besai	5	5	5	Meter
26	Way. Menterang	4,33	4,33	4,33	Meter
27	Way. Malbui Lunik	4,04	4,04	4,04	Meter
28	A. Simpang Balak	3,96	3,96	3,96	Meter
29	Way. Hantatai	3,92	3,92	3,92	Meter
30	Way. Bunguyan	3,63	3,63	3,63	Meter
31	Way. Tembilang	3,57	3,57	3,57	Meter
32	Way. Buyuk	3,47	3,47	3,47	Meter

Sempadan Sumber Air		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
33	Way. Simpang Kanan	2,53	2,53	2,53	Meter
34	Way. Besay	2,17	2,17	2,17	Meter
35	Way. Laga	11,81	11,81	11,81	Meter
36	Way. Haru	11,12	11,12	11,12	Meter
37	Way. Simpang Balak	17,82	17,82	17,82	Meter
38	Way. Kabul	17,06	17,06	17,06	Meter
39	W. Campang Limau	15,08	15,08	15,08	Meter
40	W. Simpang Balak	14,83	14,83	14,83	Meter
41	W. Simpang Lunik	11,97	11,97	11,97	Meter
42	W. Siring Gading	10,32	10,32	10,32	Meter
43	W. Hitam	10,04	10,04	10,04	Meter
44	W. Mayus	9,33	9,33	9,33	Meter
45	W. Seburas	18,02	18,02	18,02	Meter
46	W. Baru Lunik	8	8	8	Meter
47	W. Robok	6,82	6,82	6,82	Meter
48	W. Sanyir	16,48	16,48	16,48	Meter
49	W. Labuhan Baringin	6,3	6,3	6,3	Meter
50	W. Haru	16,2	16,2	16,2	Meter
51	W. Petay	6,2	6,2	6,2	Meter
52	W. Campang	6,06	6,06	6,06	Meter
53	W. Buyuk Lunik	5,99	5,99	5,99	Meter
54	W. Keruh	5,75	5,75	5,75	Meter
55	Way. Kelat	4,78	4,78	4,78	Meter
56	W. Panas	4,42	4,42	4,42	Meter
57	W. Panas	4,05	4,05	4,05	Meter
58	W. Pihiton Lunik	4,04	4,04	4,04	Meter
59	W. Kabul	13,57	13,57	13,57	Meter
60	W. Pematang Hening	13,53	13,53	13,53	Meter
61	W. Ngingi	13,43	13,43	13,43	Meter
62	W. Lirikan	12,52	12,52	12,52	Meter
63	W. Tangkuluk	12,34	12,34	12,34	Meter
64	W. Ringkih	12,32	12,32	12,32	Meter
65	W. Buyuk	11,69	11,69	11,69	Meter



Sempadan Sumber Air		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
2. Panjang Sungai**					
	1. Panjang Sungai Berturap	8.800	9.510	9.910	Meter
	2. Panjang Sungai Tidak Berturap	454.720	454.010	453.610	Meter
3. Lebar Sungai		12	12	12	Meter
4. Nama Danau/Situ					
1.	Danau Ranau	30.000.000	30.000.000	30.000.000	m2
2.	Danau Lebar	1.323.000	1.323.000	1.323.000	m2
3.	Danau Belibis	705.000	705.000	705.000	m2
4.	Danau Asam	135.000	135.000	135.000	m2
5. Keliling Danau					
	1. Keliling Danau Berturab (M)	2.010	2.111	2.233	Meter
	2. Keliling Danau Tidak Berturab (M)	25.550	25.439	25.317	Meter
6. Nama Rawa					
1.	Rowo Rejo	5.106	5.106	5.106	m2
2.	Rawa Kalong	3.106	3.106	3.106	m2

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

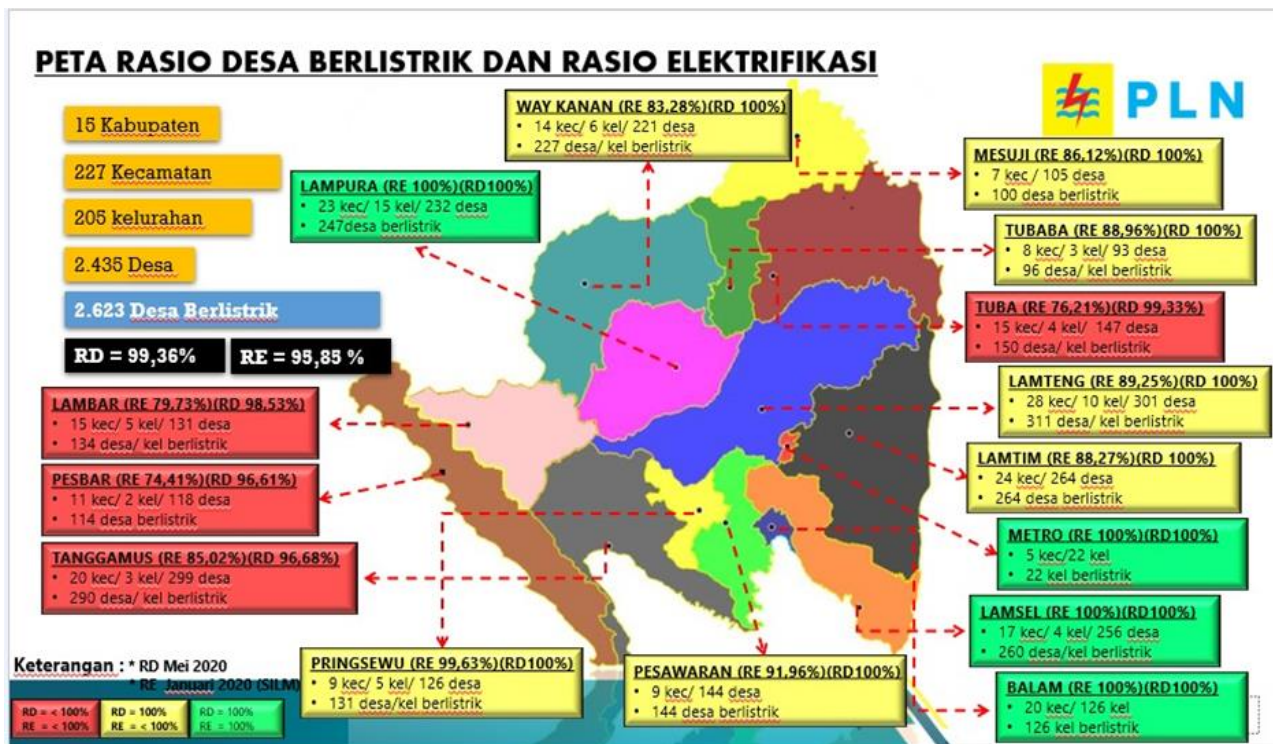
Tabel 2.40.  
Data Potensi Sungai untuk Pembangkit Listrik

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI		ELEVASI (mdpl)	PRAKIRAAN DEBIT (m3/detik)	PRAKIRAAN DAYA LISTRIK
		KECAMATAN	PEKON			
1	2	3	4	5	6	7
1	Way Besai	Sumber Jaya	di seluruh pekon di sumber jaya	700 - 1600	8	90,4 Mw
2	Way Petai	Sumber Jaya	Sp. Sari	-		
3	Way Semangka	Belalau - Batubrak- Suoh		200 - 1800		
4	Way Warkuk	Sukau	Pagar Dewa			
5	Way Basongan	Pagar Dewa	Basongan			
6	Way Labuhan Balak	Batubrak	Sukabumi	350 - 1700		

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI		ELEVASI (mdpl)	PRAKIRAAN DEBIT (m3/detik)	PRAKIRAAN DAYA LISTRIK
		KECAMATAN	PEKON			
1	2	3	4	5	6	7
7	Way Giham	Belalau - Sekincau	Sidomulyo, Hujung, Luas, Pampangan, Mabar Jaya, Giham, Sekincau	200 - 700		
8	Way Umpu	Pagar Dewa	Basungan	700 - 800		
9	Way Canggung	Batubrak	Canggung	0 - 400		
10	Way Pahiton	Belalau	Waspada, Turgak	120 - 200		
11	Way Bunbum	Batubrak	Kenali, Sukarame, Sukabumi, Pekon Balak	200 - 800		
12	Way Randayan	Belalau		700 - 800		
13	Way Mabuibalak	Belalau		300 - 800		
14	Way Pilla	Belalau		700 - 1700		
15	Way Labuhan Baringin	Belalau		400 - 1700		
16	Way Rebangan	Belalau		300 - 400		
17	Way Hamtatai	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	400 - 700		
18	Way Panas	Suoh	Suoh, Banding Agung, Sukamarga	700 - 900		
19	Way Hitam	Sumber Jaya	Seluruh Desa di Sumber Jaya	1000 - 1700		
20	Way Kutai China	Bandar Negeri Suoh				86.08 KW
21	Way Laga	Suoh				35.87 KW
22	Way Lebuohon	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	298	5,8	258 KW
23	Way Besai	Air Hitam	Gunung Terang- Semarang Jaya	814- 824	16,1	1.183 MW
24	Way Haru	Suoh	Tugu Ratu	241- 242	10,8	423 KW
25	Way Seburas	Belalau	Serungkuk	806- 774	6	1 MW
26	Way Beringin	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya			19.13 Kw

Tabel 2.41.  
Potensi Energi Panas Bumi di Lampung Barat

No	Nama Lapangan	Lokasi	Potensi Lapangan ( MWe )				Klasifikasi Temperatur
			Sumber Daya			Cadangan	
			Spekulatif	Hipotetis	Mungkin	Terduga	
1	DANAU RANAU (Kec. Lumbok Seminung)	Lampung Barat	-	-	210	-	Tinggi
2	PURUNAN (Kec. Air Hitam)	Lampung Barat	25	-	-	-	Tinggi
3	G. SEKINCAU (Kec. Sekincau)	Lampung Barat	-	-	-	-	Tinggi
4	BACINGOT (Kec. Sekincau)	Lampung Barat	-	-	378	-	Tinggi
5	PAJAR BULAN (Kec. Way Tenong dan Kec. Sumber Jaya)	Lampung Barat	100	-	-	-	Tinggi
<b>Total Potensi Panas Bumi Kab. Lampung Barat = 713 MWe</b>			<b>125</b>	<b>-</b>	<b>588</b>	<b>-</b>	



Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggu, bahkan terhenti. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasarana publik yang rusak. Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan dalam segi pengendalian banjir.

Tabel 2.42.  
 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga

Sumber air baku untuk SPAM IKK	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2021	Satuan
1. Kapasitas Terpasang	225	225	225	Liter/detik
1. Produksi	130	172	196	Liter/detik
2. Idle capacity	95	53	29	Liter/detik

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. Sistem penyediaan air minum digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang meliputi kebutuhan air bersih penduduk (domestik), fasilitas umum, dan kebutuhan air

di sektor pariwisata. Oleh karena itu, maka perlu diperhitungkan beberapa faktor yang dapat menunjang atau menyebabkan bertambahnya kebutuhan air bersih. Faktor tersebut antara lain :

1. Pertambahan jumlah penduduk.
2. Tingkat sosial ekonomi penduduk.
3. Keadaan sosial ekonomi dari daerah setempat.
4. Rencana daerah pelayanan dan kemungkinan perluasannya.
5. Keadaan sistem penyediaan air minum eksisting.

Proyeksi kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan beberapa komponen sebagai berikut. a. Kebutuhan air untuk rumah tangga (Domestik) Penyediaan air baku untuk keperluan rumah tangga dihitung berdasarkan :

1. Jumlah penduduk
2. Persentase jumlah penduduk yang akan dilayani
3. Cara pelayanan air
4. Konsumsi pemakaian air (Lt/orang/hari)

Dalam setiap peyediaan air bersih, sangat sulit untuk menghindari terjadinya kemungkinan kehilangan air dari sistem. Kehilangan air dapat disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor non teknis. Faktor teknis meliputi kebocoran pipa, kerusakan meter air, dan lain-lain (faktor alat). Sedangkan faktor non teknis meliputi kesalahan pencatatan/pembacaan alat, kesalahan perhitungan, dan lain-lain (faktor manusia).

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan serasi. Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Tabel 2.43.  
Jumlah Perumahan

Perumahan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi				
1. Jumlah Rumah Layak Huni	82.980		83.410	Unit

Perumahan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	6.724	6.246	6.294	Unit

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan air bersih yang layak dan sanitasi yang memadai saat ini masih terus diupayakan. Ketersediaan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar adalah tanggung bersama agar kebutuhan dasar tersebut dapat dirasakan. Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selanjutnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang tepat untuk suatu rumah tangga, harus direncanakan dengan benar agar distribusi air dalam rumah berjalan lancar dan efisien. Untuk Kabupaten Lampung Barat data rumah tangga memiliki air bersih tahun 2021 sebagaimana data di bawah ini :

Tabel 2.44.  
Jumlah Rumah Tangga Memiliki Air Bersih

Rumah Tangga Memiliki Air Bersih	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan	48.870	70.375	73.736	Rumah Tangga
2. Persentase Rumah Tangga Terlayani Sistem Perpipaan	81,26	83,75	87,75	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Sistem distribusi air bersih merupakan sistem pemipaan yang disiapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan guna mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju outlet (keluaran). Sistem distribusi air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak konsumsi. Dalam sistem penyediaan air bersih terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu kualitas air yang akan didistribusikan, sistem penyediaan air yang akan digunakan, pencegahan pencemaran air dalam sistem, laju aliran dalam pipa, kecepatan aliran dan tekanan air. Komponen utama dari sistem distribusi air bersih adalah sistem jaringan pipa. Adapaun kemungkinan terjadinya permasalahan pada jaringan pipa seperti kebocoran, terjadinya kerusakan pipa atau komponen lainnya, besarnya energi yang hilang dan penurunan tingkat pelayanan penyediaan air bersih untuk konsumen.

Tabel 2.45.  
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan Permukiman Kumuh	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	13	13	12	Kawasan
2. Luas Kawasan Permukiman Kumuh	28	28	15,498	Ha
3. Jumlah Bangunan Rumah	89.704	89.704	89.694	Unit

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Penataan Kawasan Kumuh masuk dalam tujuan global kesebelas, yaitu: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan, dengan sasaran global hingga tahun 2030 adalah menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2021 adalah seluas 15,498 Ha, yang tersebar di 12 kawasan pada 8 Kecamatan.

Tabel 2.46.  
Akses sanitasi

Uraian	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi Layak	90,20	90,89	91,26	%
Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi Aman	0	0,43	0,43	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat, pada target rumah dengan sanitasi tahun 2021 yaitu 90,82% jika dibandingkan dengan realisasi 100% yang terdiri dari akses sanitasi aman 0,43%, akses sanitasi layak 91,26 dan akses sanitasi dasar/belum layak 8,31%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 97,04% maka kenaikannya 2,96%. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 92,30%.

## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan tingkat keamanan dan angka kriminalitas yang rendah dibandingkan daerah lainnya, namun demikian Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Lampung Barat.

Tabel 2.47.  
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kotentraman, Keindahan)	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Pelanggaran K3	592	532	2.231	Kasus

Sumber : Data Kantor Sat Pol PP 2022

Secara umum jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain: (a) kasus pelanggaran terkait pajak restoran; (b) kasus pelanggaran terkait pemeliharaan dan penertiban hewan ternak; (3) kasus pelanggaran terkait IMB; (4) kasus pelanggaran terkait perijinan usaha; (5) kasus pelanggaran terkait pembuangan sampah; (6) kasus pelanggaran terkait penerapan Perda KTR; dan (7) kasus pelanggaran terkait penerapan protocol kesehatan di masyarakat. Terdapat peningkatan kasus pelanggaran K3 yang sangat signifikan di tahun 2021, hal ini disebabkan banyaknya kasus pelanggaran oleh masyarakat terkait dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbup Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan pengawasan dalam rangka penerapannya di masyarakat pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, terdapat 1.532 kasus pelanggaran oleh masyarakat.

Tabel 2.48.  
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2021

NO	JENIS PERDA / PERBUP	JUMLAH KASUS	PROSES PENYELESAIAN KASUS					DALAM PROSES (BELUM P21/SP 3)	KET.
			NON YUSTISI (PEMBINA AN)	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	0	0	-	-	-	-	-	Pajak Restoran
2.	Perda No 1	0	0	-	-	-	-	-	



NO	JENIS PERDA / PERBUP	JUMLAH KASUS	PROSES PENYELESAIAN KASUS					DALAM PROSES (BELUM P21/SP 3)	KET.
			NON YUSTISI (PEMBINAAN)	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3		
	Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010								
3.	Perda No 2 Tahun 2012 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak	3	3	-	-	-	-	-	Kec. Balik Bukit dan Sukau
4	Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	0	0	-	-	-	-	-	
5	Perda No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	0	0	-	-	-	-	-	
6	Perda NO 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum	434	434	-	-	-	-	-	
7.	Perda No 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	28	28	-	-	-	-	-	IMB
8.	Perda No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok	234	234	-	-	-	-	-	Iklan rokok, poster, banner, baliho dan merokok pada wilayah KTR
9.	Peraturan	1.532	1.532	-	-	-	-	-	Kecamat

NO	JENIS PERDA / PERBUP	JUMLAH KASUS	PROSES PENYELESAIAN KASUS					DALAM PROSES (BELUM P21/SP 3)	KET.
			NON YUSTISI (PEMBINAAN)	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3		
	Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbup Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19								an se-Kabupaten Lampung Barat
<b>Jumlah</b>		<b>2.231</b>	<b>2.231</b>						

Tabel 2.49.  
Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum	2.799	2.462	2.462	Orang
1. Jumlah Aparat Pamong Praja	123	158	158	Orang
2. Jumlah Aparat Linmas	372	-	-	Orang
3. Jumlah Petugas Patroli Satpol PP	10	10	10	Orang
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	2.294	2.294	2.294	Orang
2. Jumlah Sarana dan Ketertiban Umum	1.170	1.170	1.170	Unit
1. Jumlah Pos	15	15	15	Unit

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
Keamanan				
2. Jumlah Pos Kamling	1.155	1.155	1.155	Unit
3. Jumlah Kendaraan Operasional	16	16	16	Unit
1. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	5	5	5	Unit
2. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4	11	11	11	Unit

Sumber : Data Kantor Sat Pol PP 2022

### Pencapaian SPM

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  
Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Lampung Barat yaitu:

Berikut adalah capaian pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, realisasi pelaksanaan masih perlu ditingkatkan khususnya pada indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat agar dapat mencapai realisasi sesuai target nasional.

Tabel 2.50.  
Capaian Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	100%	100%	100%	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		informasi rawan bencana						
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	-	-
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	-	-
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol.PP 2021

Tabel 2.51.  
Kejadian Bencana

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kebakaran	48	14	22
2	Longsor	11	24	14
3	Banjir	6	15	13
4	Angin Kencang	2	4	5
5	Abrasi Pantai	-	-	-
6	Korban tenggelam	1	1	2
7	Jembatan rusak/putus	1	-	-
8	Gempa Bumi	-	3	12
9	Pohon Tumbang	5	4	6
10	Serangan Gajah	1	1	1
11	Orang Hilang	2	1	2

Sumber : Data Sat PolPP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan BPBD

## 5. Urusan Sosial

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang menjadi agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Upaya penanganan yang diberikan dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat terentaskan dari status kemiskinannya, untuk itu dibutuhkan kerjasama terintegrasi antar sector terkait. Sasaran dari program penanggulangan kemiskinan adalah masyarakat yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adapun dalam penanganannya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bekerja sama dengan lembaga ataupun individu dalam hal ini yang tercatat sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Tabel 2.52.  
Jumlah PMKS Kabupaten Lampung Barat

No.	PMKS	Tahun (Orang)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Anak				
a.	Anak balita terlantar	30	18	18	1
b.	Anak terlantar	209	38	38	4
c.	Anak Jalanan	0	0	0	1
d.	Anak yang berhadapan dengan hukum	10	0	0	0
e.	Anak dengan kedisabilitasan	99	144	144	98
f.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	2	12	12	0
g.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	12	12	10
2.	Wanita				
a.	Wanita rawan sosial ekonomi	473	204	204	915
3.	Lanjut Usia Terlantar	0	0	0	3
4.	Penyandang Cacat				
a.	Penyandang disabilitas	398	493	493	665
5	Tuna Sosial	0	0	0	0
a.	Tuna Susila	0	0	0	0
b.	Gelandangan	0	0	0	0
c.	Pengemis	0	0	0	0
d.	Pemulung	16	0	0	1
e.	Bekas warga binaan	12	0	0	1
6	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya				
a.	Korban penyalahgunaan napza	4	0	0	3
7	Keluarga				
a.	Fakir miskin	18,565 (RT)	34,384 (RT)	34,384 (RT)	151,517 (jiwa)

No.	PMKS	Tahun (Orang)			
		2018	2019	2020	2021
b.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	2	0	0	
8	Masyarakat				
a.	Korban Trackfiking	0	0	0	0
b.	Korban tindak kekerasan	1	0	0	1
c.	Pekerja migran bermasalah sosial	1	0	0	0
d.	Korban bencana alam	10	3	825	10
e.	Korban bencana sosial	3	20	20	861
f.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	0	0	0
g.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0
h.	Kelompok minoritas	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2022

Tabel 2.53.  
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	PSKS	Tahun (Org)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pekerja sosial profesional	98	-	-	19
2.	Pekerja sosial masyarakat	142	136	136	136
3.	Taruna Siaga Bencana	157	120	120	120
4.	Lembaga kesejahteraan sosial	26	12	12	36
5.	Karang Taruna	73	95	95	136
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	1
7.	Keluarga Pioner	70	0	0	0
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	21	0	0	55
9.	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	52	0	0	36
10.	Penyuluh Sosial	31	0	0	0
11.	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	15	15	15	15
12.	Dunia usaha	203	125	125	380

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2021

Tabel 2.54.  
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Sosial Tahun 2019 - 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	4,08 %	100 %	89.25 %	100 %	20,30 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	21.05 %	100%	0%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	77,16 %	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2022

Terkait dengan realisasi pencapaian hasil pelaksanaan SPM sampai dengan tahun 2021, berdasarkan data pada tabel di atas, dibandingkan dengan indikator lainnya hanya pada indicator pertama yaitu jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, yang memiliki tingkat capaian yang kecil. Pada beberapa penyandang disabilitas telah diupayakan upaya rehabilitasi yang berfokus pada pemberian alat bantu berupa kursi roda dan fasilitasi untuk kemandirian dalam perekonomian dengan pemberian bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat.

## 6. Urusan Tenaga kerja

Capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat untuk urusan tenaga kerja diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja ialah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2.55.  
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

URAIAN	2019	2020	2021
ANGKATAN KERJA	179.361	190.632	192.567
- BEKERJA	176.375	186.579	187.114
- PENGANGGURAN	2.986	4.053	5.453
BUKAN ANGKATAN KERJA	46.236	37.717	38.808
- SEKOLAH	12.750	12.899	14.309
MENGURUS RUMAH - TANGGA	28.816	19.608	19.791
- LAINNYA	4.670	5.210	1.472

Sumber : Dinas PM PTSP Naker 2022 ( BPS Lampung Barat)

Berdasarkan tabel diatas Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah Angkatan kerja tanpa diikuti perluasan dan penciptaan lapangan kerja pada berbagai sektor mengakibatkan adanya peningkatan jumlah pengangguran.

Tabel 2.56.  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

URAIAN	2019	2020	2021
TPT	1,66 %	2,13%	2,83%

Sumber : Dinas PM PTSP Naker 2022 ( BPS Lampung Barat)

Berdasarkan tabel diatas tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya adanya pandemic covid-19, adanya kesenjangan jumlah Angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Tabel 2.57.  
Persentase Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2021

STATUS PEKERJAAN	JUMLAH
BERUSAHA SENDIRI	32.029
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	55.014



STATUS PEKERJAAN	JUMLAH
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	3.526
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	18.272
PEKERJA BEBAS	15.419
PEKERJA TIDAK DIBAYAR	62.854
BUKAN ANGKATAN KERJA	38.808
TOTAL	225.922

Sumber : Dinas PM PTSP Naker 2022  
(BPS Lampung Barat)

## 7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.58.  
Data Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun s.d Tahun 2021

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Kasus				4	24
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum		6	-	-	2	7
(a) Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	1	-	-	0	0
(b) Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	5	-	-	2	7
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	12	9	16	4	17
(a) Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Orang	2	4	0	0	4
(b) Jumlah Anak Sebagai Korban	Orang	10	5	16	4	13
(c) Jumlah Anak Sebagai Saksi	Orang	-	-	-	0	0
B. Laporan Pengaduan		15	5	20	6	20

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan						
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan		5	-	-	2	7
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	5	-	-	2	1
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	-	-	-	0	6
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan		10	5	20	4	13
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	10	5	20	4	13
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum	Kasus	-	-	-	0	0

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ditindak Lanjuti						
C. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	Unit	1	1	1	1	3
1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/ P2TP2A	Unit	1	1	1	1	1
2. LPAI ( Lembaga perlindungan anak Indonesia)		-	-	-	-	1
3. KPAI ( Komisi Perlindungan anak Indonesia)		-	-	-	-	1

Sumber Data: Dinas KBPP&PPPA Tahun 2022

Tabel di atas menjelaskan tentang data kondisi terkait upaya perlindungan perempuan dan anak berdasarkan laporan pengaduan kasus yang diterima oleh pemerintah daerah. Jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan perubahan secara fluktuatif, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan kasus yang tercatat dalam tabel di atas dapat disebabkan adanya kesadaran masyarakat di Kabupaten Lampung Barat untuk melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ada di masyarakat. Namun juga dapat diartikan bahwa telah terjadi peningkatan kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan serta meningkatnya persoalan perempuan dan anak yang harus berhadapan dengan hukum. Menumbuhkan dan mendorong kesadaran peran serta masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam pencegahan dan mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak sampai dengan saat ini masih harus terus dilakukan secara intensif dan terintegratif dengan pihak-pihak terkait mengingat masih banyak ditemui adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.59.  
Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Eksekutif dan Legislatif Tahun 2019  
- 2021

Tahun	Jumlah Perempuan sebagai anggota DPRD		Jumlah Perempuan sebagai Aparat Negeri Sipil (ASN)	
	Jumlah (org)	%	Jumlah (org)	%
2019	5	14,28	1.938	50,54
2020	5	14,28	1.992	52,35
2021	6	17,14	2.017	53,32

Sumber: Data Dinas PPKBPPPA, Tahun 2022

Sampai dengan tahun 2021, jumlah perempuan yang berpartisipasi di lembaga legislatif masih rendah yaitu hanya 6 orang dari total 35 orang anggota legislatif Kabupaten Lampung Barat, jumlah ini hanya 17,14% belum memenuhi kuota minimal perempuan di lembaga legislatif yaitu 30%. Sedangkan untuk partisipasi di lembaga eksekutif, perempuan di Lampung Barat sudah mencapai 53,32% dari total ASN di Lampung Barat.

Tabel 2.60.  
Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2018 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
IPG (%)	92,74	92,55	92,95	93,00
IDG (%)	63,84	68,21	68,24	-

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan capaian indikator pembangunan manusia (IPM) antara IPM Perempuan dan IPM laki-laki. Perhitungan dilakukan dengan menghitung komponen IPM yang terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi (pengeluaran per kapita). IPG Lampung Barat mencapai 93,00% di tahun 2021, capaian ini menunjukkan bahwa untuk perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki sudah hampir mendekati setara.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur terlaksananya kesetaraan gender dengan melihat partisipasi politik dan ekonomi. Partisipasi pada sector ekonomi dengan mengukur partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan. Data terakhir dirilis BPS, IDG Kabupaten Lampung Barat sebesar 68,24%. Ketercapaian ini sejalan dengan data yang disajikan sebelumnya khususnya pada partisipasi perempuan dalam politik, dimana jumlah perempuan dalam Lembaga legislatif baru mencapai 17,14% di tahun 2021.

## 8. Urusan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan

budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

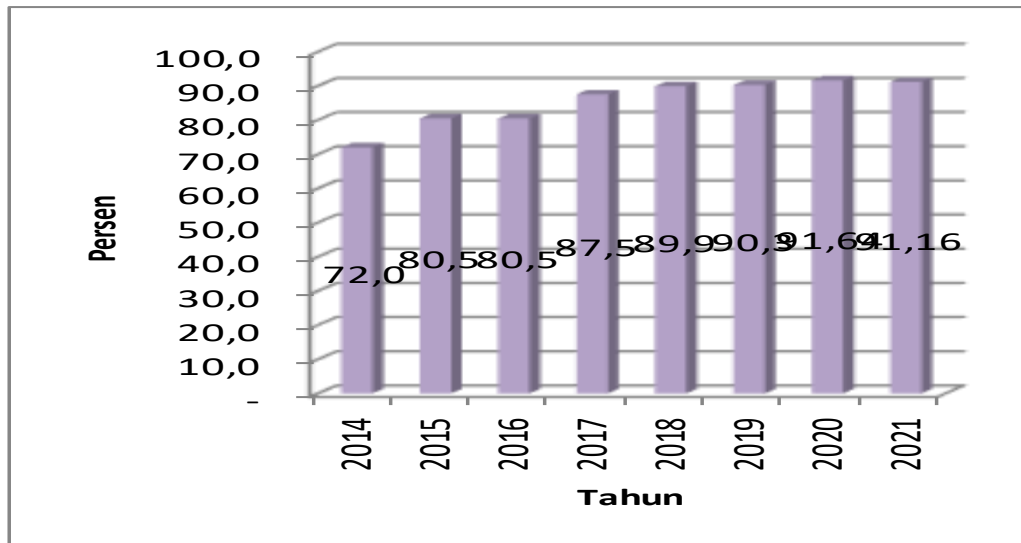
Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, salah satunya memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat beranekaragam. Potensi sumberdaya alam tersebut sangat menunjang pembangunan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Lampung Barat yang merupakan faktor utama penggerak ekonomi masyarakat terutama dalam rangka mencukupi kebutuhan termasuk pangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, dimana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaagaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi

Gambar 2.8.  
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2022

Bila dilihat dari prosentase AKE bahwa ketersediaan pangan berdasarkan pola pangan harapan (kualitas) di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 Mengalami penurunan sebesar 0.48 Point Tahun 2020 (91,64 Point).

Dengan memiliki ketersediaan energi sebesar 3.900 kalori/kapita/hari dari angan kecukupan gizi (2.400 kalori/kapita/hari) dengan skor PPH 91,62 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan didominasi oleh kelompok padi-padian (1708 kalori), kelompok Gula (84 kalori), kelompok sayur/buahan ( 420 kalori ), Pangan hewani ( 333 kalori), minyak dan lemak ( 952 kalori), kelompok umbi-umbian (25 kalori) serta diikuti kelompok kacang-kacangan dengan kontribusi energi sebesar ( 48 kalori). Sedangkan kelompok pangan yang memiliki skor dibawah skor maksimal PPH yaitu kelompok umbi umbian sebesar 0,5 (skor maksimal 2,50), kelompok pangan hewani sebesar 27,8 (skor maksimal 24), kelompok kacang-kacangan sebesar 4,0 (skor maksimal 10) dan kelompok buah biji berminyak sebesar 0 ( skor maksimal 1).

Meskipun ketersediaan energi berdasarkan NBM (kuantittas) telah mencapai 3.900 kalori/kapita/hari dari angka kecukupan gizi (2.400 kalori/kapita/hari) namun secara kualitas (skor PPH 96,62) belum ideal.Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum mencapai skor maksimal hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan.

1. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang. Faktor penyebab utama lebih didominasi dari ketersediaan/produksi lokal padi-padian (beras), gula (gula Pasir) dan buah (pisang dan pepaya) Meskipun

menurut catatan BPS Kabupaten Lampung Barat ( Lampung Barat dalam angka 2019 )

- Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal, yaitu kelompok umbi-umbian ( 0,5 ), serta diikuti kelompok kacang – kacangan dengan kontribusi energi sebesar ( 4,0 ). Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relaif masih rendah. Berkaitan dengan capaian kinerja untuk Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada kurun waktu 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.  
Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan  
Tahun 2019 - 2021

	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Skor PPH Ketersediaan	89,1	90,29	90,1	91,62	91,1	91,16

Berdasarkan target yang ditetapkan, realisasi skor PPH ketersediaan telah melebihi taraget yang ditetapkan, namun jika dibandingka capaian tahun 2021 terhadap tahun 2020 terdapat penurunan skor PPH yaitu dari 91,62 menjadi 91,16. Pada tabel berikut ini akan dijelaskan terkait dengan pencapaian skor PPH Ketersediaan di Tahun 2021 beserta penjelasan terkait tantangan yang dihadapi.

Tabel 2.62.  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2021

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	2.559	106,6	0,5	53,32	25,00	25,0	+
2.	Umbi-umbian	137	5,7	0,5	2,85	2,50	2,5	+
3.	Pangan Hewani	190	7,9	2,0	15,87	15,87	24,0	-
4.	Minyak dan Lemak	231	9,6	0,5	4,80	4,80	5,0	-
5.	Buah/biji berminyak	49	2,0	0,5	1,02	1,00	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	114	4,7	2,0	9,49	9,49	10,0	-
7.	Gula	491	20,5	0,5	10,23	2,50	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	229	9,6	5,0	47,76	30,00	30,0	+
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	4.000	166,7		145,35	91,16	100,0	

AKE = 2400 kkal/kap/hari

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan didominasi oleh kelompok padi-padian (2.559 kalori), kelompok gula (491 kalori), minyak dan sayur (231 kalori) serta sayuran dan buah (229 kalori). Sedangkan kelompok

pangan yang memiliki skor dibawah skor maksimal PPH Ketersediaan, yaitu kelompok pangan hewani (15,87) dengan skor maksimal 24,0, kelompok minyak dan lemak (4,80) dengan skor maksimal 5,0 dan kelompok kacang-kacangan (9,49) dengan skor maksimal 10,0.

Meskipun ketersediaan energi berdasarkan NBM (kuantitas) telah mencapai 4.000 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (2.400 kalori/kapita/hari), namun secara kualitas (skor PPH Ketersediaan 91,16) belum ideal. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Beberapa komposisi skor PPH Ketersediaan untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum mencapai skor maksimal. Hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan.
2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang. Faktor penyebab utama lebih didominasi dari ketersediaan/produksi lokal padi-padian (beras), gula (gula pasir) dan buah (pisang dan pepaya) meskipun menurut catatan BPS Kabupaten Lampung Barat (Lampung Barat Dalam Angka Tahun 2020).
3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 mencapai 4.000 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kalori.

Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal pangan nabati yaitu sebesar 79,06 kalori/kapita/hari dan sisanya berasal dari pangan hewani.

Total ketersediaan protein adalah sebesar 95,54 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yakni 63 gram/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan lemak sebesar 59,57 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yakni 48,88 gram/kapita/hari.



Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Tabel 2.63.  
Data Kelompok Tani/Gapoktan Lumbung Pangan Masyarakat  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Pekon	Nama Lumbung Kelompok Tani Gapoktan	Tahun Berdiri
1	Sukau	Suka Mulya	Talang Jawa	2013
2	Sumberjaya	Sukajaya	Cinta Karya	2014
3	Gedung Surian	Mekar Jaya	Kerawang Kuning	2014
4	BNS	Bandar Agung	Sumber Barokah	2013
5	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Gumelan Jaya	2009
6	Kebun Tebu	Purajaya	Jaya Bersama	2010
7	BNS	Suoh	Pertani Jaya 4	2010
8	Sukau	Suka Mulya	Sinar Kukusan	2013
9	Sukau	Buay Nyerupa	Lembah Pesagi	2015
10	Balik Bukit	Bahway	Lembah Pesagi	-
11	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Dwi Tunggal	2014
12	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Triguna 45	2014
13	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Triguna 6	2014
14	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Purwa Mandiri	2014
15	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Triguna 9	2014
16	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Mekar Makmur 2	2014
17	Kebun Tebu	Cipta Mulya	Mekar Arum	2014
18	Gedung Surian	Cipta Waras	Sri Rahayu	2013
19	Gedung Surian	Cipta Waras	Tri Mukti	2014
20	Gedung Surian	Cipta Waras	Daya Guna	2014
21	Gedung Surian	Cipta Waras	Setia Karya I	2013
22	Gedung Surian	Cipta Waras	Setia Karya II	2013
23	Gedung Surian	Cipta Waras	Mandiri	2014
24	Gedung Surian	Cipta Waras	Tani Abadi	2014
25	Gedung Surian	Tri Mulyo	Mekar Sari	2014
26	Gedung Surian	Gedung Surian	Karya Mekar	2014
27	Suoh	Rowo Rejo	Sri Karya Makmur	2003
28	Pagar Dewa	Sumber Agung	Karya Bakti	2010

No	Kecamatan	Pekon	Nama Lumbung Kelompok Tani Gapoktan	Tahun Berdiri
29	Air Hitam	-	-	-
30	Way Tenong	-	-	-
31	Lumbok Seminung	-	-	-
32	Batu Brak	-	-	-
33	Batu Ketulis	-	-	-
34	Sekincau	-	-	-
35	Belalau	-	-	-

Sasaran kelompok bantuan gabah pengisian gabah sampai dengan tahun 2021 sebanyak 37 kelompok penerima bantuan pengisian lumbung pangan masyarakat dari 41 target remstra di tahun 2022.

Selain penyaluran gabah untuk pengisian lumbung pangan masyarakat, pada tahun 2021 ini Kabupaten Lampung Barat juga melaksanakan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian (Ketahanan Pangan) untuk Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya di Wilayah Sentra Produksi Padi yang terdiri dari 4 komponen yaitu:

1. Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 30-60 ton
2. Lantai Jemur dengan luas minimum 100m<sup>2</sup>
3. Rice Milling Unit (RMU) dengan kapasitas >0,5 ton/jam
4. Rumah RMU

Selain dana DAK tersebut pemerintah daerah juga menyediakan dana sebagai pendamping untuk pengisian lumbung pangan untuk pembelian:

1. Gabah sebanyak 7.000 kg
2. Timbangan duduk sebanyak 1 unit
3. Alat ukur kadar air sebanyak 1 unit

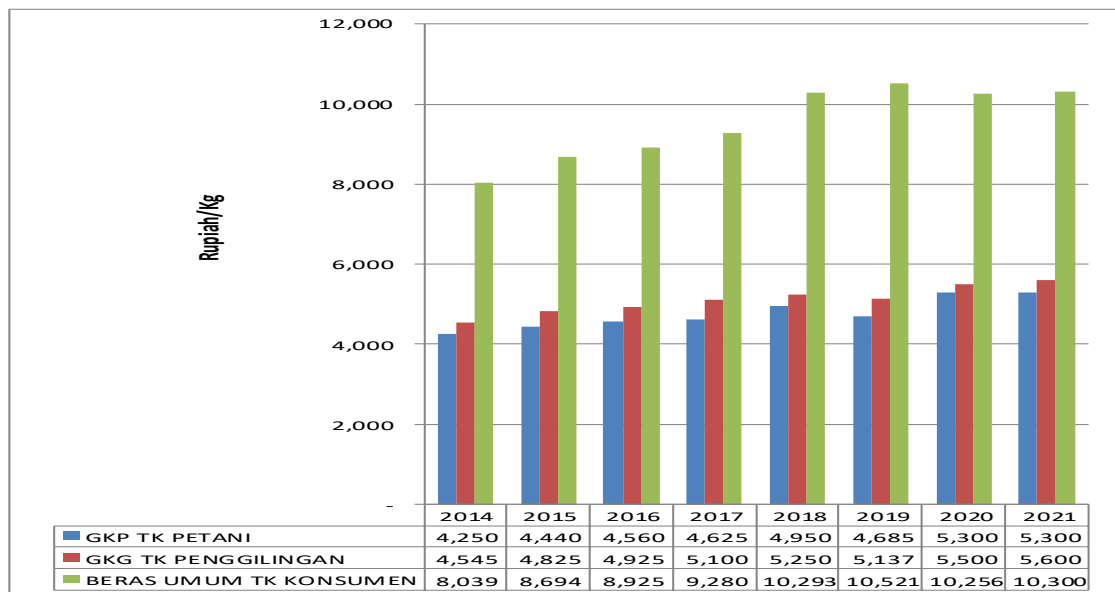
Kelompok penerima manfaat dari kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian T.A. 2021 ini adalah GAPOKTAN AL-HIDAYAH Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit sesuai Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/349/KPTS/III.09/2020 tanggal 4 September 2020.

#### Aspek Akses Pangan

Pada aspek ini memberikan gambaran tentang kemudahan akses pangan bagi masyarakat, hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat akan komoditi pangan. Kesetabilan harga pada tingkat konsumen tidak terlepas dari kestabilan pasokan pangan baik yang bersumber dari produksi dalam daerah dan yang berasal dari luar daerah. Jika dilihat dari tingkat produksi beras Lampung Barat selama tahun 2021 yang mencapai 129.556. Ton, dengan jumlah beras yang masuk ke Lampung Barat sebesar 3.600 Ton maka tingkat pasokan pangan pokok (beras) sebesar 132.556 Ton. Pada tahun 2021 di Lampung Barat harga rata - rata beras medium

ditingkat konsumen sebesar Rp.10.521/kg, dengan tingkat koefisien variasi (CV) di 1,1 %, Tingkat kesetabilan harga gabah ditingkat petani merupakan vaktor penentu dari tingkat kesetabilan harga dan daya beli masyarakat, dikarenakan mayoritas penduduk lampung barat berprofesi sebagai petani (baik petani Sawah maupun perkebunan ) pada tahun 2021 harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani yang ditargetkan Rp.5.300/kg (sesuai dengan HPP Pemerintah ) mencapai Rp. 4.856/kg . hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan harga pangan pokok (beras) dan gabah pada tabel berikut:

Gambar 2.9.  
Perkembangan harga gabah dan beras di tingkat petani



#### Aspek Pemanfaatan Pangan

Konsumsi energi rata-rata pada tahun tahun 2021 sebesar 2.287,7 Kkal/kapita/hari. Terjadi peningkatan konsumsi energi jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 2.156,9 Kkal/kapita/hari. Dari hasil survey diketahui bahwa konsumsi energi terbesar berasal dari kelompok padi-padian dengan jumlah 1196,3 Kkal/kapita/hr.

Selanjutnya diikuti oleh kelompok minyak dan lemak dengan jumlah konsumsi energi rata-rata 423,1 Kkal/kap/hr dan pangan hewani sebesar 155,6 Kkal/kap/hr). Meskipun konsumsi pangan hewani menurun dibandingkan tahun 2020 namun kontribusi total energi meningkat karena konsumsi bahan pangan lainnya meningkat. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok lainnya yang menyumbang energi rata-rata sebesar 20,4 Kkal/kapita/hari.

Tabel 2.64.  
Konsumsi Energi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari) aktual	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari) Ideal	Tingkat Kecukupan Energi (%)
Padi- padian	1076,4	1075	100,1
Umbi-umbian	167,7	129	130,0
Pangan Hewani	160,0	258	62,0
Minyak dan Lemak	400,0	215	186,0
Buah Biji Berminyak	47,1	64,5	73,0
Kacang-kacangan	93,8	107,5	87,3
Gula	47,5	107,5	44,2
Sayur dan buah	144,3	129	111,9
Lain-lain	20,2	64,5	31,3
Jumlah	2156,9	2150	100,3

Tabel 2.65.  
Konsumsi Energi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari) aktual	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari) Ideal	Tingkat Kecukupan Energi (%)
Padi- padian	1196,3	1.075	111,3
Umbi-umbian	129,1	129	100,1
Pangan Hewani	155,6	258	60,3
Minyak dan Lemak	423,1	215	196,8
Buah Biji Berminyak	22,6	64,5	35,0
Kacang-kacangan	103,3	107,5	96,1
Gula	92,6	107,5	86,1
Sayur dan buah	145,8	129	113,0
Lain-lain	20,4	64,5	31,6
Jumlah	2.288,7	2150	106,5

Jika dibandingkan dengan standar konsumsi energi kualitatif ideal sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari maka konsumsi energi aktual Lampung Barat secara rata-rata 2.288,7 Kkal/kapita/hari sudah melebihi. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 (2.156,9 Kkal/kapita/hari) terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan. Kontribusi energi dari kelompok padi-padian telah melampaui standar ideal sebesar 1.075,0 Kkal/kapita/hari. Begitu juga dengan sumbangan energi dari kelompok minyak dan lemak yang telah melampaui

standar ideal sebesar 215,0 Kkal/ kapita/hari. Kelompok pangan umbi-umbian dan kacang-kacangan hampir mencapai standar ideal yaitu umbi 129,0 Kkal/kapita/hari dan kacang-kacangan 107,5 Kkal/kapita/hari. Meskipun konsumsi energi seluruh kelompok pangan hampir mencukupi bahkan melebihi standar ideal namun masih sama seperti tahun yang lalu beberapa kelompok lain seperti pangan hewani, buah biji berminyak dan kacang-kacangan belum mencapai standar ideal yang diharapkan.

Dari Tabel tersebut dapat digambarkan bahwa kecukupan energi melebihi angka 100% yaitu 106,5%. Jadi tingkat kecukupan energi di seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat telah melebihi 100%. Walaupun secara kuantitatif sudah melebihi 100% namun secara kualitatif masih belum mencapai standar ideal. Hal itu dapat dilihat dari komposisi tingkat kecukupan antar kelompok pangan.

Selain energi, protein merupakan zat gizi yang penting bagi tubuh. Protein hewani dan nabati merupakan zat pembangun dalam tubuh untuk membentuk sel-sel baru. Untuk itu konsumsi protein rumahtangga harus mendapatkan perhatian agar tercukupi sehingga setiap anggota rumahtangga dapat hidup sehat. Konsumsi protein aktual pada Wilayah Perikanan adalah 88,5 gr/kapita/hari, Wilayah Pertanian 53,8 gr/kapita/hari dan Wilayah Lainnya sebesar 67,9 gr/kapita/hari dengan konsumsi rata-rata adalah 59,4 gr/kapita/hari.

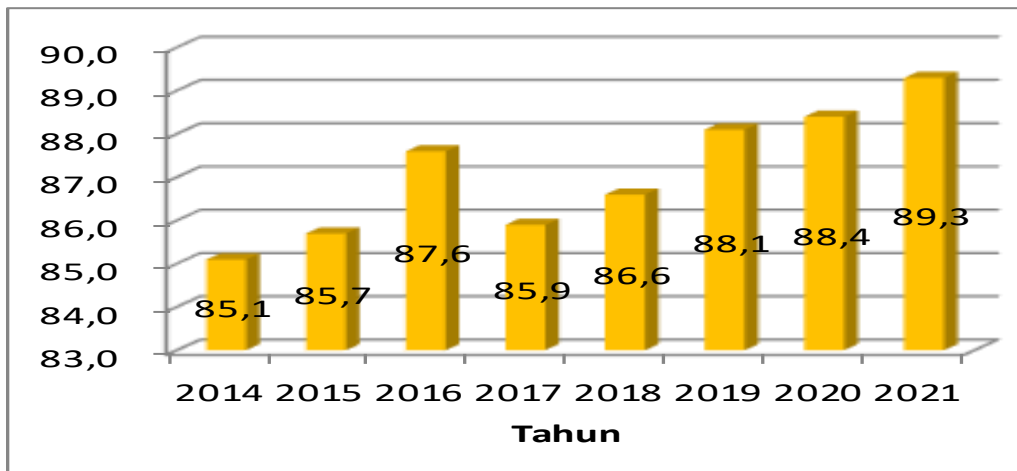
Tabel 2.66.  
Tingkat Konsumsi Protein

Karakteristik Agroekologi	Protein	Ideal (57 gr/kap/hari)	SPM (46.8 gr/kap/hari)
Wilayah Pertanian	53,8	57	51,3
Wilayah Perikanan	88,5	57	51,3
Wilayah Lainnya	67,9	57	51,3
Rata-rata	59,4	57	51,3

#### Pola Pangan Harapan

Untuk mengetahui situasi mutu konsumsi pangan dilakukan perhitungan skor Pola Pangan Harapan. Terwujudnya pola pangan ideal sangat penting karena pola konsumsi yang bermutu gizi seimbang yang dapat menyediakan zat tenaga (energi), zat pembangun (protein) dan zat pengatur (vitamin dan mineral) dalam jumlah yang cukup yang terdiri atas aneka ragam pangan. PPH merupakan standar untuk dapat mencapai pola konsumsi pangan yang beragam atas dasar proporsi sumbangan energi. Skor PPH beserta komposisi konsumsi pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.10.  
Pola Pangan Harapan Aktual Kabupaten Lampung Barat



Tabel 2.67.  
Pola Pangan Harapan Aktual Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap	Skor PPH 2021
1.	Padi-padian	1196,3	52,3	55,6	0,5	26,1	27,8	25,0	2,8	25,0
2.	Umbi-umbian	129,1	5,6	6,0	0,5	2,8	3,0	2,5	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	155,6	6,8	7,2	2,0	13,6	14,5	24,0	-9,5	14,5
4.	Minyak dan Lemak	423,1	18,5	19,7	0,5	9,2	9,8	5,0	4,8	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	22,6	1,0	1,1	0,5	0,5	0,5	1,0	-0,5	0,5
6.	Kacang-kacangan	103,3	4,5	4,8	2,0	9,0	9,6	10,0	-0,4	9,6
7.	Gula	92,6	4,0	4,3	0,5	2,0	2,2	2,5	-0,3	2,2
8.	Sayur dan Buah	145,8	6,4	6,8	5,0	31,8	33,9	30,0	3,9	30,0
9.	Lain-lain	20,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	2.288,7	100,0	106,5	11,5	95,2	101,3	100,0		89,3

Keterangan = \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2150,0 Kkal/Kap/Hari

## 9. Urusan Pertanahan

Sejak dilakukannya reformasi atas tanah tahun 1960-an (Landreform), yaitu dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia terdiri dari:

Hak Milik, yaitu hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia. Pada prinsipnya suatu badan hukum tidak dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah dapat menetapkan badan-badan hukum tertentu untuk dapat mempunyai Hak Milik. Selain badan hukum, orang asing (WNA) juga tidak dapat mempunyai Hak Milik atas tanah.

Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk tanah yang luasnya minimal 5 hektar. Namun jika luasnya 25 hektar atau lebih maka untuk mengusahakannya harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun. Jika Hak Guna Usaha tersebut habis jangka waktu berlakunya maka hak tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun.

Hak Guna Bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu maksimal 30 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 tahun.

Hak Pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak Pakai memberikan wewenang dan kewajiban kepada pemegangnya sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat pertanahan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Perjanjian tersebut bukan merupakan sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

Tabel 2.68.  
Jumlah Jenis Hak Atas Tanah

Jenis Hak Atas Tanah	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Hak Milik	88.304	88.304	101.229	Sertifikat
2. Jumlah Hak Guna Bangunan	36	36	115	Sertifikat
3. Jumlah Hak Pakai	242	242	314	Sertifikat
4. Jumlah Hak-Hak Lain (Hak Wakaf)	85	85	135	Sertifikat

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Tabel 2.69.  
Jumlah Kasus Sengketa Tanah

Kasus Sengketa Tanah	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Selesai	-	-	-	Kasus
2. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Belum Selesai	-	2	2	Kasus

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 sengketa tanah atau yang biasa dikatakan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Pada tahun 2021 terdapat 2 kasus Sengketa tanah yang yang ditangani oleh Bidang Pertanahan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat.

#### 10. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Menjaga agar lingkungan tetap lestari merupakan hal yang vital bagi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia membutuhkan sumber daya alam untuk berkembang biak dan hidup. Semua sumber daya tersebut tersedia di alam. Jika alam rusak maka kehidupan manusia tertanggung. Berdasarkan data lingkungan di Kabupaten Lampung Barat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.70.  
Kinerja Lingkungan Hidup 2019 s.d 2021

NO	LINGKUNGAN HIDUP	SATUAN	TAHUN			KET
			2019	2020	2021	
1	Jumlah Lokasi Pencemaran Kronis					
	1. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah	Lokasi	-	-	-	
	2. Jumlah Lokasi Pencemaran Air	Lokasi	-	-	-	
	3. Jumlah Lokasi Pencemaran Udara	Lokasi	-	-	-	
2	Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik					
	1. Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	1	1	1	Industri Tahu Pekon



NO	LINGKUNGAN HIDUP	SATUAN	TAHUN			KET
			2019	2020	2021	
						Kubu Perahu
	2. Tidak Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	145	145	145	Industri Kecil dan Menengah

Catatan :

1. Belum pernah melakukan pemeriksaan kualitas tanah yang ada di Kabupaten Lampung Barat
2. Kualitas Air masih dibawah baku mutu yang ditetapkan oleh PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air
3. Pemeriksaan Udara dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat di 4 titik zona sampling yaitu perkotaan, pemukiman, transportasi (terminal) dan industri yang hasilnya masih dibawah baku mutu.
4. Lampung Barat belum ada Perusahaan Industri/Pabrik dalam Skala Besar yang dapat merusak lingkungan akan tetapi pada tahun 2013 pabrik tahu di Pekon Kubu Perahu membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk limbah tahu
5. Industri Kecil dan Menengah bergerak dibidang Industri Pengolahan Kopi, Industri Tempe/Tahu Kedelai, Industri Batu Bata dari Tanah Liat dan Industri Konsentrat makanan hewan

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup, 2022

#### 11. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan,

pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

a. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Persebaran Penduduk/ Geografis

Penduduk Kabupaten Lampung Barat tersebar di 15 kecamatan, jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Balik Bukit sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Lumbok Seminung. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk antara jenis kelamin, maka secara umum perbedaan antara jumlah perempuan dengan jumlah laki-laki hanya sedikit demikian juga dengan sebarannya secara geografis perbandingan antara penduduk perempuan dan laki-laki dapat dikatakan seimbang antar wilayah.

Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut, oleh karena itu informasi mengenai jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari jumlah kartu keluarga. Pada tabel berikut di sajikan jumlah penduduk dan kepala keluarga pada tahun 2021

Tabel 2.71.  
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Lk	Pr	Jumlah	
1	Balik Bukit	21.703	20.456	Jumlah	11.559
2	Sumber Jaya	12.545	11.801	42.159	7.247
3	Belalau	6.487	6.063	24.436	3.545
4	Way Tenong	17.821	17.092	12.550	10.314
5	Sekincau	9.931	9.134	19.065	5.798
6	Suoh	9.783	8.852	18.635	5.643

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Lk	Pr	Jumlah	
7	Batu Brak	7.892	7.309	15.201	4.284
8	Sukau	13.153	12.304	25.457	7.107
9	Gedung Surian	8.820	8.300	17.120	5.257
10	Kebun Tebu	10.705	10.204	20.909	6.336
11	Air Hitam	6.462	5.849	12.311	3.998
12	Pagar Dewa	9.187	8.145	17.332	5.565
13	Batu Ketulis	7.116	6.388	13.504	4.073
14	Lumbok Seminung	4.426	3.931	8.357	2.500
15	Bandar Negeri Suoh	13.521	11.914	25.435	7.676
	Jumlah	159.552	147.742	307.294	90.902

Sumber data: Data DKB semester I Tahun 2021

Berkaitan dengan sistem pencatatan administrasi kependudukan, pada tabel berikut dapat dijelaskan Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dari mulai tahun 2018. Sampai dengan tahun 2021, capaian kepemilikan dokumen kependudukan mulai dari KTP-el, kepemilikan KIA dan akta kelahiran 0-18 tahun pada setiap tahun selalu mengalami kenaikan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.72.  
Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d 2021

NO	URAIAN	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Jumlah Penduduk	304.197		305.972		307.190		307.294	
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP-EI	214.961		214.051		215.890		220.270	
3	Jumlah Penduduk Memiliki KTP-EI	212.744	98,97	219.828	102.69	225.240	104.33	231.838	105.25
4	Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP-EI	2.217	1,03	5.777		9.350		11.568	
5	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	103.183		103.185		100.650		100.352	
6	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	95.113	92.17	96.903	93.91	97.757	97.12	106.786	106.41
7	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	8.070	7.82	6.282	6.08	2.893	2.87	6.434	

NO	URAIAN	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
8	Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga	86.761	100	86.704	100	90.170	100	90.902	100
9	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga	-		-		-		-	
10	Jumlah Penduduk Wajib Kartu Identitas Anak (KIA)	92.191		93.724		91.300		87.024	
11	Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	15.000	16.27	39.276	42	60.929	67	69.251	80
12	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	77.191	83.73	54.448	58	30.371	33	17.773	20

Sumber Data: Disdukcapil DKB I 2021

Untuk data capaian yang realisasinya lebih besar dari 100% dapat dikarenakan jumlah KTP-EL dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan melebihi dari jumlah target anak 0-18 tahun (data target direkap per semester), sedangkan akta kelahiran diterbitkan setiap hari sesuai dengan permohonan dari masyarakat, sehingga melebihi target data yang ada, selain itu masih ada tambahan penerbitan akta kelahiran terhadap penduduk pindah datang yang membawa anak berusia 0 – 18 tahun.

## 12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Tabel 2.73.  
Pengukuran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi Masyarakat Desa	Tahun 2021
Persentase Peningkatan Status Pekon	100%
Persentase Kelembagaan Pekon Aktif	100%

Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon yang Sesuai Pedoman	65%
Persentase Pekon yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban yang Sesuai Pedoman Dan Tepat Waktu	75%
Persentase Anggota LHP Dan LPMP Aktif Dalam Perencanaan Pembangunan	80%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP), 2022

### 13. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana merupakan salah indikator pengukuran dalam hal pengendalian penduduk, berikut adalah capaian pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.74.  
Data Keluarga Berencana

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
1. Jumlah Pasangan Usia Subur		79124	87.111	93.824
1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB	Pasang	58.627	64.810	69.078
2. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode				
1. Suntik KB	Orang	22188	24852	26.048
2. Obat/Pil KB	Orang	11859	13735	15.211
3. IUD/Spiral	Orang	8527	8527	8.719
4. Susuk/implant	Orang	14.799	15731	16.764
5. Kondom	Orang	840	1194	1.528
6. Vagina Diafragma	Orang	0	0	0
7. Spermatisida	Orang	0	0	0
8. Vasektomi/MOP	Orang	137	137	137
9. Tubektomi /MOW	Orang	347	634	671
3. Sarana Dan Prasarana KB				
1. Jumlah Alat Peraga KB / genre kit	Kit	6	2	0

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
2. Jumlah Balai KB	Balai Penyuluh KB	15	15	15
3. Unit Pelayanan KB		60	60	91
4. Jumlah Tenaga Klinik KB**	Orang			
5. Jumlah Petugas KB**	Orang	18	19	17
6. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan**	Institusi	136	136	136
7. Jumlah Kelompok Bina Keluarga**	Kelompok			
BKB	Kelompok	112	74	85
BKR	Kelompok	53	42	40
BKL	Kelompok	62	69	33

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2021

Tabel 2.75.  
Pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021
1	Laju pertumbuhan penduduk	0,93
2	Angka kelahiran total (TFR)	2.39
3	Persentase peserta KB Aktif	73,6
4	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	73,6
5	Angka usia kawin pertama	19 th
6	Persentase Pengetahuan PUS tentang/Cara Kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	
7	Persentase Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB -Posyandu-PAUD)	1
8	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	39%
9	Persentase Remaja yang dibina tentang Kesehatan Reproduksi	100%
10	Jumlah Pusat Informasi Konseling - Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-RR) yang aktif	18 kelompok

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2021

#### 14. Urusan Perhubungan

Semua kegiatan apakah itu mengimpor bahan baku, memasarkan hasil produksi, menyediakan tenaga kerja, membutuhkan sistem transportasi yang baik, sistem tersebut adalah sistem transportasi yang menjamin keamanan, keselamatan, kecepatan dan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan jasa transportasi di seluruh wilayah Lampung Barat. Jika penyediaan jasa transportasi lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga pasaran. Dibawah ini ditampilkan data transportasi darat sebagai berikut:

Tabel 2.76.  
Jumlah Transportasi Darat s/d 2021

NO	MODA TRANSPORTASI DARAT & SDP	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	SATUAN
1	Jumlah Moda Angkutan Barang	840	1618	1722	1927	Unit
2	Jumlah Moda Angkutan Umum	38	261	105	309	Unit
3	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum	10	12	60	61	Perusahaan
4	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	1	1	1	1	Unit
5	Jumlah Terminal	2	2	2	2	Unit
6	Penumpang melalui terminal Tipe C	1031	1000	1250	1300	Orang
7	Jumlah Moda Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan (ASDP)	44	41	41	45	Unit
8	Jumlah Dermaga	3	3	3	3	Unit
9	Jumlah Penumpang melalui Dermaga	32	25	25	31	Orang

Sumber Data : Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021

Keterangan :

1. Moda angkutan bertambah dari kendaraan yang KIR
2. Penambahan moda dari angkutan ojek
3. Penambahan perusahaan dari jasa angkutan
4. Tempat Gedung uji tetap 1 unit
5. Jumlah terminal type C tetap 2 unit
6. Bertambah penumpang dari angkutan barang, ojek dan penumpang
7. Moda angkutan sungai bertambah dari peternak ikan kerambah
8. Dermaga tetap 3 unit
9. Bertambah penumpang dari peternak ikan kerambah

## 15. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Perangkat genggam seperti ponsel, smartphone, tablet adalah contoh yang paling umum dari jaringan informasi dan telekomunikasi. Dalam jaringan ini masing-masing disajikan atau diatur oleh setidaknya satu situs pemancar tetap, yang dikenal sebagai BTS. Setiap perangkat pada jaringan nirkabel menggunakan satu set frekuensi yang berbeda dari ponsel lainnya, untuk menghindari gangguan terhadap bandwidth, memungkinkan sejumlah besar perangkat mobile dapat berkomunikasi satu sama lain. layanan komunikasi dan informasi saat ini menjadi kebutuhan baik kota maupun desa/pekon. Berikut disajikan data telekomunikasi di Lampung Barat sebagai berikut.

Tabel 2.77.

Data telekomunikasi

Uraian	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Pekon terhubung jaringan internet	133	134	134	Pekon
2. Jumlah Tower Komunikasi	99	99	101	Unit
3. Jumlah Smartvillage			7	Pekon/ Kel

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

Pada Indikator sasaran Persentase Desa yang terhubung dengan jangkauan Telekomunikasi dan Internet realisasi kinerja sudah mencapai angka 98.5% dari Jumlah 131 Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Lampung Barat, Desa yang sudah terjangkau Internet dan Telekomunikasi sebanyak 134 Desa dan Kelurahan, Sedangkan Batu Api Kec. Pagar dewa, Tembelang Kec. BNS belum ada menara Telekomunikasi (Blank Spot), namun pada Pekon Ujung Rembum Kec. Lumbok Seminung dan Pekon Rigis Jaya Kec. Air hitam terdapat beberapa spot/ area-area tertentu dalam pekon tersebut yang belum terdapat sinyal Telekomunikasi dan Internet

## 16. Urusan Statistik

Tabel 2.78.

Data statistik sektoral

Uraian	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah data Statistik sektoral	500	450	150	Buku

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2022



## 17. Urusan Persandian

Tabel 2.79.  
Data Persandian

Uraian	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45	30	0	
2. Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 kec	15 kec	15 Kec	
3. Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		3 ruang	3 Ruang	
4. Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	

## 18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Sektor Koperasi UKM merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dimana perekonomian Kabupaten Lampung Barat selain sektor pertanian didominasi oleh Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, baik itu pada sektor Perdagangan, Industri Pengolahan maupun sektor Jasa dan lainnya. Oleh karena itu ketiga urusan pemerintahan diatas harus dibangun secara sinergi, berkaitan dan berkelanjutan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Keberadaan usaha koperasi sebagai Badan Hukum resmi yang diakui negara merupakan bukti keseriusan pemerintah membangun ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah bagaimana koperasi yang ada tumbuh menjadi koperasi yang tidak hanya aktif secara administrasi yakni rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, melainkan juga mendorong produktivitas usaha koperasi, sehingga tujuan dibentuknya koperasi yaitu meningkatnya pendapatan anggota bisa tercapai.

Selanjutnya pada sektor UMKM, Permasalahan paling krusial dalam pengembangan Usaha bagi UMKM adalah pertumbuhan UMKM, akses permodalan, pengembangan produk dan pemasaran. Pemerintah dan swasta

melalui Bank yang ditunjuk telah mengucurkan bantuan kredit bagi UMKM yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Mikro lainnya yang menasar pelaku UMKM dalam target kinerjanya. Akan tetapi dilapangan kerap ditemukan kesulitan yang dialami UMKM dalam mengakses program KUR tersebut. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan menghadirkan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Kondisi keberadaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Barat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80.  
Kondisi keberadaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Barat.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021
1.	Jumlah Koperasi sehat	KOP	17	22	27
2.	Jumlah Koperasi Aktif	KOP	42	49	52
3.	Persentase Peningkatan UMKM	%	11,04	10,80	14.08%
4.	Persentase UMKM yang mengakses permodalan	%	510	67	45.37

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Jumlah total koperasi di Lampung Barat sebanyak 165 unit dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 7.796 orang. Pada tabel diatas terlihat bahwa ada peningkatan jumlah koperasi sehat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Koperasi sehat adalah koperasi yang usahanya tumbuh dan berkembang serta kelembagaan koperasi yang juga baik, administrasi yang akuntabel dan tertib. Peningkatan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Lampung Barat saat ini baru mencapai 16,67% dari total seluruh koperasi yang ada. Sementara itu koperasi aktif adalah koperasi yang tertib secara administrasi dan aktivitas usahanya, dibuktikan dengan tingkat kepatuhan koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan forum tertinggi dalam kelembagaan koperasi, pada tahun 2021 jumlah koperasi yang telah melakukan RAT sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) koperasi. Hingga tahun 2021 koperasi aktif di Kabupaten Lampung Barat mencapai 32,09% dari keseluruhan jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi diatas masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan dan perlindungan Koperasi di masa yang akan datang.

Pada sektor UMKM, sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah masalah pertumbuhan UMKM dan permodalan bagi UMKM. UMKM adalah sektor usaha yang sangat penting dan cenderung “survive” dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi dunia, karena UMKM selama ini terbukti cukup resisten terhadap krisis ekonomi. Oleh karenanya perlu sebuah upaya

bagaimana masyarakat terbuka untuk menghasilkan pendapatan dari produk pertanian yang dihasilkan dengan mengolah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Lampung Barat juga mengalami fluktuasi sejak tahun 2019 Pertumbuhan UMKM mencapai 11,04%, mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi sebesar 10,80% dan meningkat kembali di tahun 2021 yakni sebesar 14,08%

Adapun permasalahan permodalan yang dihadapi UMKM juga merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan melalui program KUR dan kredit lunak lainnya. Pada tahun 2019 Persentase UMKM yang mengakses permodalan mencapai angka 510%, pada tahun 2020 mencapai 67% dan ditahun 2021 sebanyak 45,37% UMKM tercatat mengakses kredit yang disediakan pemerintah.

Mengingat kopi adalah produk unggulan di Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah produksi 43,715 ton pada tahun 2021, maka dari seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat, UMKM pengolahan komoditas kopi merupakan bidang usaha UMKM yang paling berkembang di Lampung Barat hamper di seluruh kecamatan memiliki IKM pengolahan kopi yang terus bertumbuh hingga di tahun 2021 jumlah IKM pengolahan kopi mencapai 146 unit IKM.

#### 19. Urusan Penanaman Modal

Pengembangan Investasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan implementasi komitmen Kabupaten Lampung Barat sebagai wilayah konservasi, literasi dan tangguh bencana . Sebagai wilayah konservasi , pembangunan ekonomi harus memberi dukungan terhadap pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya hal ini tercermin dari peluang investasi yang dapat dikembangkan berupa potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta sektor pariwisata.

Tabel 2.81.  
Pencapaian Kinerja Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	220	624	282
Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp.	142.671.845.207,-	113.483.975.551,-	112.921.542.189.-
Jumlah Unit Usaha	Perusahaan	220	624	282

Sumber: Dinas PM PTSP Naker, 2022

Tabel 2.82.  
Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat

Tahun	Realisasi Investasi ( Rp.)
2017	3.167.204.246,-
2018	25.947.491.049,-
2019	142.671.845.207,-
2020	113.483.975.551,-
2021	112.921.542.189,-

Sumber: Dinas PM PTSP Naker, 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dengan semakin kondusifnya iklim Investasi di Indonesia secara umum, namun sejak tahun 2020, dengan mulai terdampaknya Covid - 19 yang dialami hampir seluruh Negara, termasuk wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat, nilai Investasi juga mengalami penurunan karena terhambatnya operasional pembangunan, yang diakibatkan tidak sedikit tenaga kerja yang terlibat dalam proyek-proyek investasi terpapar oleh Covid-19, hingga dapat menghentikan kelanjutan kegiatan pembangunan, contoh berhentinya Proyek PLTMH yang dilaksanakan oleh PT. Lampung Hidro Energy pada tahun 2021.

## 20. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah Olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportivitas. dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter Bangsa karena Bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif.

Sektor Pariwisata sebagai salah satu aset Ekonomi Kabupaten Lampung Barat merupakan sektor yang dipandang memiliki prospek sangat menjanjikan sekaligus mampu memberikan kontribusi pendapatan yang sangat signifikan baik secara makro (ekonomi regional) maupun mikro dikaitkan dengan dampak multiganda yang mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan pendapatan bagi masyarakat dan usaha- usaha skala kecil dan menengah.

Tabel 2.83.  
Kinerja OLAHRAGA

Olahraga	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Prasarana Olahraga				
1. Jumlah Lapangan Bola Voli	80	86	86	Unit
2. Jumlah Lapangan Bola Basket	100	125	125	Unit
3. Jumlah Lapangan Tenis	7	7	7	Unit
4. Jumlah Lapangan Futsal	55	77	77	Unit
5. Jumlah Stadion Sepak Bola	5	5	5	Unit
6. Jumlah Stadion Atletik	49	56	56	Unit
7. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	1	1	1	Unit
8. Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	Unit
9. Jumlah Kolam Renang	4	4	4	Unit
13. Jumlah Rumah Billiard	9	9	9	Unit
14. Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka	3	3	3	Unit
2. Kondisi Prasarana Olahraga				
1. Jumlah Lapangan Bola Voli	80	86	86	Unit/ Rusak
2. Jumlah Lapangan Bola Basket	100	125	125	Unit/ Rusak
3. Persentase Wirausaha Muda Mandiri				
4. Jumlah/Persentase Pelatih Bersertifikasi				%
5. Jumlah Atlet Berprestasi	71	128	26	Atlit
6. Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	21	3	6	Cabor

Sumber : Dinas Pora Pariwisata 2022

Pemerintah daerah pada tahun 2021 telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka memenuhi sarana dan prasaran Olahraga dan memaksimalkan pembinaan untuk Atlit-atlit yang ada di lampung barat tetapi dikarenakan keterbatasan Anggaran dan Pandemi Covid-19 sehingga hasil kurang maksimal. Pada tahun 2021 Cabang Olahraga berprestasi ada 6 Cabang Olahraga dan Atlit berprestasi sebbanyak 26 Orang.

Cabang Olahraga berprestasi antara lain :

a. IPSI

Tabel 2.84.  
Atlit binaan IPSI

Iqbal Dafa	Poin 3 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3
Nur Kholis	Poin 3 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov

	IPSI Lampung 2021 Zona 3
Tofa	Poin 1 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3
Bijai Abdi Guna	Poin 4 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3 Juara Tryout Pencak Silat LAMPUNG vs BEKASI, Bandar Lampung 27-29 Agustus 2021
Endang Sari	Poin 2 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3
Siti Khotijah	Poin 4 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3

b. PELTI

Tabel 2.85.  
Atlit binaan IPSI

Mustika Oliver	Juara II Sirkuit Tenis Junior KU-16 PutriLampung Seri 1 Tahun 2021
Deto Rais Ahdan	Juara III Sirkuit Tenis Junior KU-12 PutriLampung Seri 1 Tahun 2021 Juara III, KU-12 Sirkuit Tenis Junior Seri 2, Lampung Selatan 22-24 Oktober 2021
BD. Elio Gatie	Peringkat 6, KU-14 Sirkuit Tenis Junior Seri 2, Lampung Selatan 22-24 Oktober 2021
Rizki Amanullah	Peringkat 8, KU-14 Sirkuit Tenis Junior Seri 2, Lampung Selatan 22-24 Oktober 2021

c. PASI

Tabel 2.86.  
Atlit binaan IPSI

Novera	Juara II Lari Cepat 100m, Kejuaraan Daerah Atletik U-16 dan U-18 Provinsi Lampung 2021 Juara III, Lompat Jauh, Kejuaraan Daerah Atletik KU_16 dan KU-18 Provinsi Lampung 2021
M. Yafi Jawat	Juara II Lempar Cakram Kejuaran Daerah Atletik KU-16 dan Ku-18 Provinsi Lampung 2021

d. PORKI

Tabel 2.87.  
Atlit binaan PORKI

Wisnu Prayoga	Atlet PON XX 2021
Ida Seridevi	Juara 3 (Medali Perunggu) Cabor Karate pada PON Papua 2021

e. PERTINA

Tabel 2.88.  
Atlit binaan PERTINA

Nico	Juara I, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021
Jovin	Juara I, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021
Edwin	Juara II, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021
Setyo	Juara II, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021
Dewa	Juara III, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021

f. PBSI

Tabel 2.89.  
Atlit binaan PBSI

Andika Azhar Permana	Kejuaraan Bulu Tangkis GLOMPONG CUP I Tahun 2021 Kategori Anak-anak
Andika Pratama	
Bahdum	

Tabel 2.90.  
Jumlah Pemuda Lampung Barat Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional

No	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
1.	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi		Paskibraka Tingkat Provinsi		Seleksi Muhibah Budaya Dan Festival Jalur Rempah Provinsi Lampung Tahun 2021	
	1.	Dona Utari	1	Riko Pirmansyah	1	Nili Roslina
	2.	Lingga Saputra	2	Heditya Dwi Mustika	2	Aldo Patmara
2.	Paskibraka Tingkat Provinsi		3	Muhammad Yafi J.R		
	1.	Riko Pirmansyah	Predikat Pemenang Busana Terbaik Duta Bahasa		Paskibraka Tingkat Provinsi	
	2.	Heditya Dwi Mustika	1	Vina Qurrota Akyuningrum	1	Mojes Wijaya

No	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	3.	Selvia Hestiana	Predikat Peserta Terpilih Kategori Pantomim Pada Jejak Virtual		2	Citra Ayu Septina
3.	Pertukaran Pemuda Antar Negara		1	Yosep Darusman	3	Ayu Marisa
	1.	Andi Hilman Fahmi				
4.		Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi		Pertukaran Pemuda Antar Provinsi		Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
	1.	Bijai Abdi Guna (Ipsi)	1	Bella Neta Fitri	1.	Monika Tri Audina
	2 3	Muhammad Iqbal Ridzaldi (Taekwondo) Adia Tirta (Pasi)			2.	Ahmad Sumantri
5		Pbsi Perorangan Dan Kelompok		Juara 3 Sains Nasional		Sirkuit Tenis Junior
	1	Krisna Surya Ardian	1	Wahyuda Pratama	1.	Mustika Olivera (Juara 2)
	2	Wahyu Ramadan			2.	Okto Akhdan Rais (Juara 3)
	3	Rapi Aditia				
	4	Andika Azhar Perman				Kejuaraan Atletik Usia 16-18
	5	Agil Prasetyo			1.	
	6	M.Hanip			2.	M. Yafi Jawad (Juara 3)
	7	M.Sapik.I.S				
	8	Ma'rup				
	9	Ilham Dinnuklis				Peraih Mendali Perak Olimpiade Pendidikan Agama Islam Tingkat Nasional
	10	Bahdum Amalinda			1.	Wahyuda Pratama
	11	Gustriliya				



No	Tahun 2019		Tahun 2020	Tahun 2021
	12	Suryaningtiy as Sabda Pratiwi		
	13	Yeni Astuti		Duta Museum Lampung Tahun 2021
	14	Nisaul Laliy F		1 Monika Tri Audina
	Penampilan Terbaik Iii Personil Lampung Culture And Tapis Carnaval Festival Kerakatau Th 2019			2 Ahmad Rivando
	1	Dio Praja Kamova		Duta Kopi Indonesia Tahun 2021
	2	Andika Jaya Gusnanda		1 Maulia Noor Faried
	3	Een Firmansyah		
	4	Faisal Hardinata		
	5	Asrul Yuda Pratama		Juara I Duta Pelajar Putra Dan Putri 2021
	6	Irawan		
	7	Nasyiruddin Firdaus		1 Riki Maynaki (Ma Nurul Iman Skincau)
	8	Nabil Saputra		2 Dinda Nurul Meidianti
	9	Agra Datama		(Sma 1 Belalau)
	10	Farel Pratama		
	11	Muhammad Rayhan Gibran A		
	12	Tika Fitriaoktaliza		
	13	Puspa Damar Pinasti		
6.	14	Julia Indiana		
	15	Nayla Oktaria		

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	16	Cindi Adelia	
	17	Mega Aulia	
	18	Nadya Nuruzz Alfatya	
	19	Indah Lestari	
	20	Nayla Alisya Azzahra	
	21	Metalia Relida	
	22	Bagas Kurnia	
	23	Rengga Agroiantama	
	24	Bentar Zamzami	
	25	M Dersi Ispa	
	26	Rizaldi Yosep Kurniawan	
	27	Yandi Rianto	
	28	M Nadia Azka	
	29	Amri	
	30	Satya Firnando	
	31	Yudi Agriyansyah	
	32	Sapringga Winata	
	33	Indah Mutiara Zurian	
	34	Bella Nata Fitri	
	35	Febiola	
	36	Erika	
	37	Erik Sanjaya	
	38	Febi Mahendra Puspa Negara	
	39	Edwarsyah Maas	

No	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	40	Harun Hasan				
	41	Mamak To				
	42	Oka Restu Dinata				
	43	Damro				
	44	Qodri Febriansyah				
	45	Neno Melta Yulendra				
	46	Dhea Adinda				
	47	Rara Firanti				
	48	Ratu Restu Melania				
	49	Ricard Sambera				
	50	Ogi Pratama				
	51	Dedi Edwin				
	52	Seldatri Hairani				
	53	Ari Widodo				
	54	Jevi Narsita Lestari				
	55	Zairi				
	56	Wenny Oktavia				
	Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2019		Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2020		Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2021	
7.	1.	Angga Febriyanto			1.	Syafana Oktarianti
	2.	Dwi Karni			2.	Syafira Hasna 'Apipah
	3.	Delva Sevtia			3.	Indira Chaerani Tria Fhadlika
		Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kesenian Tahun 2019		Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kesenian Tahun 2020		Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kesenian Tahun 2021
					1.	Ahmad Rifanza
					2.	Holmes Sinaga

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
			3. Refi Adesa Dewi
			4. Rully Nurdagidsu
			5. Roberto Alfiano
			6. M. Dimazz R Langga Hernawan
			7. Bilqis Dwina Adinda
			8. Putri Novia Anastasya
			9. Muhammad Desri Izpa
			10. Aluna Refita Ayu
			11. Raben Anggara Dewandika
			12. Cindy Adella
	Jumlah : 80 Orang	Jumlah : 7 Orang	Jumlah : 32 Orang

Sumber : Dinas Pora Pariwisata 2022

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pelopor adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pelopor ini menjadi kegiatan wajib tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta sebagai upaya mendukung program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam upaya meningkatkan Pemuda yang berdaya saing.

Kegiatan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Propinsi /JPI adalah kegiatan rutin tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran putra dan putri akan kecintaanya kepada NKRI dan Khususnya Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di seluruh Indonesia.

Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka adalah kegiatan rutin tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran putra dan putri akan kecintaanya kepada NKRI dan Khususnya Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan Paskibraka tentang baris berbaris di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mendukung Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021.

## 21. Urusan Kebudayaan

Lampung Barat dapat dikatakan istimewa dengan latar sejarahnya pernah menjadi lokasi transmigrasi BRN (Biro Rekonstruksi Nasional) dan terdapat Tugu Soekarno sebagai tanda Perjalanan Bung Karno ke Lampung Barat. Selain Tugu Soekarno juga meninggalkan naskah sejarah "PERJALAN SERIBU MIL PUN HARUS DI MULAI DENGAN SATU LANGKAH PERTAMA" Ir. Soekarno Presiden RI di Sumberjaya, 14 November 1952. Selain itu juga Lampung Barat memiliki komoditas kopi yang sangat penting bagi Indonesia yang tentunya sarat dengan nilai-nilai sejarah. Dengan mempelajari sejarah Lampung Barat kita dapat melihat bagaimana sejarah tidak hanya digerakkan oleh Politik tetapi juga ekonomi.

Tabel 2.91.  
Jumlah Penggiat Seni dan Budaya

Penggiat Seni Dan Budaya	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
<b>Seni Rupa</b>				
Jumlah Kelompok Seni Lukis	2	2	3	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan	10	10	5	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Patung	3	3	3	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Dekorasi		3	3	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Reklame				Kelompok
<b>2. Seni Tari/Gerak</b>				
<b>Tari Kreasi Baru</b>				
Jumlah Kelompok		15	16	Kelompok
Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru		300	330	Orang
<b>Tari Tradisional</b>				
Jumlah Kelompok		10	10	Kelompok
Jumlah Anggota Tari Tradisional		400	400	Orang
<b>3. Seni Suara/Vocal</b>				
Jumlah Kelompok	2	2		Kelompok

Penggiat Seni Dan Budaya	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
Seni Suara/Vocal				
Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal	30	30		Orang
4. Seni Musik Tradisional				
Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional		41	70	Kelompok
Jumlah Anggota Seni Musik Tradisional		287	490	Orang
5. Seni Sastra				
1. Jumlah Kelompok Seni Sastra	2	3	3	Kelompok
2. Jumlah Anggota Seni Sastra	50	75	75	Orang
6. Seni Teater/Drama				
Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama	2	3	3	Kelompok
Jumlah Anggota Seni Teater/Drama	50	75	75	Orang
7. Pagelaran/Pameran Seni Budaya				
Pagelaran Seni Budaya				
Jumlah Pagelaran	3	3	3	Kali
Jumlah Pengunjung				Orang
8. Celugam				
Kerajinan Celugam				
Jumlah pengrajin	5	5	5	IKM Aktif

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Lampung Barat memiliki beragam seni budaya yang harus dilestarikan dan berkembang sehingga bisa lebih dikenal masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel diatas perkembangan data seni dan budaya diKabupaten Lampung Barat

Tabel 2.92.  
Jumlah Cagar Budaya

Cagar Budaya	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jenis Cagar Budaya				
Jumlah Situs Cagar	45	45	45	

Cagar Budaya		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
	Budaya				
	Milik Pemerintah Pusat	9	9	9	Unit
	Milik Pemerintah Daerah	2	2	2	
	Milik Masyarakat	31	31	34	
	Milik Swasta				Unit
	Jumlah Pengunjung		15.000	12.500	Orang
	Jumlah Benda Cagar Budaya				
	Milik Pemerintah Pusat				Unit
	Milik Pemerintah Daerah				
	Milik Masyarakat	287	287	287	
	Milik Swasta				Unit
	Jumlah Bangunan Cagar Budaya	11	11	11	
	Milik Pemerintah Pusat	1	1	1	Unit
	Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	
	Milik Masyarakat	6	6	6	
	Milik Swasta				Unit
2. Penetapan Cagar Budaya					
	Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Pusat/Daerah				
	Sudah Ditetapkan				Unit
	Belum Ditetapkan				Unit
	Jumlah Cagar Budaya Milik Masyarakat/Swasta				
	Sudah Ditetapkan				Unit
	Belum Ditetapkan				Unit

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa situs cagar budaya dilampung barat terdata sejumlah 45 unit dengan jumlah pengunjung 15.000 pada tahun 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 12.500.

Tabel 2.93.  
Jumlah Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Sanggar Kesenian		144	183	Organisasi
2. Jumlah Gedung Kesenian	1	1	2	Unit
3. Jumlah Museum				Unit
4. Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya				Unit

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sarana dan prasarana seni dan budaya yang terdiri dari jumlah sanggar kesenian semakin meningkat dari total 144 organisasi pada tahun 2020 menjadi 183 organisasi pada tahun 2021 dan jumlah Gedung kesenian berjumlah 1 pada tahun 2019 menjadi 2 ditahun 2021, hal ini dikarenakan adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap seni dan budaya dikabupaten lampung barat.

## 22. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pengunjung atau pemustaka. Perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, kewajiban pemerintah adalah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, layanan perpustakaan secara merata, pusat sumber belajar masyarakat, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan untuk pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi –fungsi tersebut berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik melalui program peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan baik tingkat desa, sekolah maupun pengelola perpustakaan daerah. Ketersediaan perpustakaan yang representatif baik dari sisi kelengkapan sarana prasarana dan dukungan sumber daya manusia/pustakawan yang kompeten dalam pengelolaan perpustakaan menjadi suatu keharusan untuk menjalankan fungsi perpustakaan secara optimal. Kabupaten Lampung Barat sudah memiliki perpustakaan daerah walaupun masih nyatu dengan kantor, namun masih perlu ditingkatkan kondisi gedung dan kelengkapan fasilitas perpustakaannya.

Kabupaten Lampung Barat telah mencanangkan sebagai Kabupaten Literasi, upaya yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan perpustakaan



daerah sebagai perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat dengan keterbatasan social yang ada. Kebijakan yang diambil diantaranya dengan melaksanakan penyediaan perpustakaan keliling dengan mobil perpustakaan keliling dari kabupaten dan bentor perpustakaan keliling di kecamatan-kecamatan yang berkeliling ke pekon-pekon di wilayahnya, perpustakaan keliling ini memberikan kemudahan akses untuk masyarakat di pekon yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber informasi. Selain itu juga, telah terbentuk perpustakaan pekon di 12 pekon dan Lamban Baca di seluruh Pekon dan Kelurahan se-Kabupaten Lampung Barat. Dimulai di tahun 2021, telah tersedia perpustakaan online di Lampung Barat yaitu e-Pusda yang dapat diunduh secara gratis dan diakses setiap saat dengan menggunakan gadget berbasis Android, koleksi judul buku yang tersedia di e-Pusda sebanyak 1.878 judul buku.

Tabel 2.94.  
Jenis Perpustakaan

No	JENIS PERPUSTAKAAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	SATUAN
1	Jumlah Perpustakaan Umum	137	137	138	Unit
2	Jumlah Perpustakaan Sekolah	330	331	332	Unit
3	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi	1	1	1	Unit
4	Judul buku	27.981	29.947	30.841	Judul
	Perpustakaan Umum	27.981	29.947	30.841	Judul
5	Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan	14	14	16	Orang
	Perpustakaan Umum	14	14	16	Orang
6	Jumlah Perpustakaan memenuhi standar	33	36	40	Unit
	a. Perpustakaan Umum	1	1	1	Unit
	Perpustakaan sekolah	30	33	37	Unit
	Perpustakaan Pekon	2	2	2	Unit
7	Jumlah pemustaka ke perpustakaan	7.558	2.631	7.154	Orang
	Jumlah pemustaka ke perpustakaan umum	7.558	2.631	7.154	Orang
8	Jumlah Anggota Perpustakaan	4.407	6.277	6.868	Orang
	Jumlah anggota Perpustakaan Umum	4.407	6.277	6.868	Orang

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2022

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat telah berkomitmen untuk mendukung Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi. Dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan minat baca kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat dengan berbagai kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut diantaranya adalah menyediakan ruang khusus untuk anak-anak dengan fasilitas buku-buku untuk anak-anak, Alat Peraga Edukasi untuk anak-anak dan fasilitas audio visual untuk anak-anak. Selain itu juga menyediakan buku-buku referensi untuk anak sekolah, mahasiswa maupun untuk masyarakat umum (baik buku cetak maupun buku digital atau e-book).

Untuk mengembangkan bakat minat anak-anak usia pra-sekolah maupun usia sekolah, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat setiap tahun mengadakan kegiatan berkenaan dengan hari kunjung perpustakaan diantaranya; Lomba mewarnai untuk anak TK/Paud, lomba bercerita rakyat Lampung untuk anak Sekolah Dasar, Lomba berpidato Bahasa Lampung untuk anak Sekolah Lanjutan tingkat pertama dan story telling untuk anak SLTA. Selain lomba yang diikuti oleh peserta orang tua juga ikut mendampingi pada saat anak-anak kegiatan lomba dimaksud, Dengan demikian orang tua dapat menjadi sasaran sosialisasi minat baca untuk dapat membimbing anak-anaknya belajar buku, karena seperti yang kita ketahui bersama orang tua adalah guru pertama dalam lingkungan keluarga.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan mengutamakan pelayanan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah cara yang efektif untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Lampung Barat terbukti dengan pelayanan mobil perpustakaan keliling berjumlah 3 mobil, khusus bentor perpustakaan keliling berjumlah 15 unit untuk pelayanan di tingkat kecamatan Balik Bukit, Belalau, Sekincau, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Bandar Negeri Suoh, Lumbok Seminung, Balik Bukit, Batu Brak, Batu Ketulis, Pagar Dewa, Suoh

Pelayanan Perpustakaan Keliling dapat menyumbangkan tercapainya minat baca masyarakat, karena dapat meningkatkan budaya baca masyarakat sekaligus sosialisasi e-book di wilayah Kecamatan Se-Lampung Barat.

Sasaran strategis Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Gemar Membaca adalah meningkatnya jumlah pengunjung dan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat.

Sedangkan pada indikator meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan, setiap tahun mengalami kenaikan atau penambahan, kecuali saat pandemi covid 19 mengalami penurunan drastis, karena stop pelayanan untuk pengunjung, akan tetapi dengan adanya e-book atau buku digital pemustaka bisa mengakses buku digital dari rumah masing-masing menggunakan android.

Keterangan Tabel di atas:

- 1 Jumlah Perpustakaan Umum  
Jumlah perpustakaan Pekon/Kelurahan dan perpustakaan daerah

- 2 Jumlah Perpustakaan Sekolah  
Perpustakaan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.
- 3 Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi  
STIT Al Mutazam memiliki perpustakaan yang belum berstandar
- 4 Judul Buku  
Perpustakaan Umum  
Data khusus jumlah buku perpustakaan Daerah, tidak termasuk Perpustakaan Pekon/Kelurahan
- 5 Pustakawan Dan tenaga Teknis Pustakawan  
Perpustakaan Umum  
Data khusus Jumlah pustakawan di Perpustakaan Daerah, tidak termasuk perpustakaan Pekon/Kelurahan
- 6 Jumlah Perpustakaan memenuhi Standar  
Perpustakaan Umum  
Perpustakaan Daerah  
Perpustakaan sekolah  
Data untuk sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang memenuhi standar  
Perpustakaan Pekon  
Pekon Padang Tambak dan Pekon Pura mekar
- 7 Jumlah Pemustaka ke perpustakaan  
Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Umum  
Khusus pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan daerah, tidak termasuk perpustakaan Pekon/Kelurahan
- 8 Jumlah Anggota Perpustakaan  
Jumlah anggota Perpustakaan Umum  
Khusus pemustaka yang memiliki KTA (kartu Tanda Anggota) perpustakaan  
Perpustakaan daerah, tidak termasuk perpustakaan Pekon/Kelurahan

## 23. Urusan Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip (file) mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

Ruang lingkup kegiatan kearsipan meliputi:

- a. Penciptaan, penerimaan, pengumpulan arsip
- b. pengendalian, pemeliharaan dan perawatan arsip
- c. penyimpanan dan pemusnahan arsip

Pengelolaan arsip berpedoman kepada aturan Pemerintah yaitu UU nomor 43 tahun 2009 mulai dari menerima warkat, mencatat, mendistribusikan, menyimpan, menata/menemukan kembali arsip, mengadakan perawatan /pemeliharaan, mengadakan atau pun merencanakan penyusutan arsip.

Dengan peningkatan SDM pengelola kearsipan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pengelola kearsipan.

Tabel 2.95.  
Kinerja Kearsipan

Kearsipan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan				-
Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah	49	49	49	orang
Arsip Vital Dan Arsip Statis*				
Jumlah Arsip Vital	-	-	-	-
Jumlah Arsip Statis	895	1.012	1.045	Dokumen

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2022

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### a. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

##### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selalu berusaha untuk mencapai program/kegiatan yang telah direncanakan dengan teralisasinya semua program/kegiatan seperti Kegiatan usaha di bidang perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat antara lain kegiatan penangkapan ikan di perairan umum, budidaya ikan di perairan umum, budidaya ikan di kolam dan mina padi (budidaya ikan di sawah). Kegiatan usaha penangkapan ikan perairan umum di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari penangkapan ikan di danau, sungai, rawa, cekdam dan genangan air lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan perairan umum serta penangkapan ikan perairan umum yang tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan Potensi lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 5.584,7 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 2.349,4 Ha, sementara untuk budidaya mina padi potensi lahan 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 342,39 Ha. Potensi pengembangan perikanan budidaya di darat didominasi 2 (dua) kecamatan, yaitu Sumberjaya dan Kebun Tebu.

Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan perikanan budidaya adalah Perairan Umum Danau

Ranau dengan luas potensi 141,60 Ha yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pengembangan perikanan budidaya di perairan umum Danau Ranau difokuskan untuk pengembangan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak di 3 (tiga) pekon/desa yaitu kagungan, sukabanjar dan tawan sukamulya. Hingga saat ini potensi perairan Danau Ranau yang dimanfaatkan baru mencapai 15,13 Ha dari potensi lahan yang bisa dikembangkan untuk budidaya KJA sebesar 141,60 Ha berdasarkan perencanaan zonasi Dinas Perikanan Lampung Barat. Hingga saat ini jumlah KJA yang ada di perairan umum Danau Ranau yaitu ± 192 (seratus sembilan puluh dua) unit.

Untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat meliputi perairan danau, sungai, waduk, rawa dan galian air lainnya (GAL). Berikut disampaikan data capaian urusan Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.96.  
Realisasi Produksi Usaha Perikanan Tahun 2019-2021

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (tahun)		
		2019 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)
1.	Produksi penangkapan perairan umum	443,6	475,3	586,2
2.	Budidaya Perairan Umum	5.195	5.509,54	6.209,42
3.	Budidaya di kolam	3.837	3.208,70	3.355,98
4.	Mina Padi	306	132,60	370,01

Sumber : Dinas Perikanan 2022

Tabel 2.97.  
Kinerja Perikanan Budidaya Tahun 2019-2021

Perikanan Budidaya	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Budidaya Air Tawar				
a) Jumlah Pembudidaya Air Tawar	5.318	5.424	5.496	Orang
b) Jumlah Produksi	9.338	8.850	9.935	Ton

Sumber : Dinas Perikanan 2021

Tabel 2.98.  
Jumlah Benih, Industri dan Nilai Perikanan Tahun 2019-2021

Benih, Industri dan Nilai Perikanan		Tahun			Satuan
		2019	2020	2021	
1. Balai Benih Ikan					
	a) Jumlah Balai Benih Ikan	1	1	1	Balai
2. Pembenihan Ikan Rakyat					
	a) Jumlah Pembenihan Ikan Rakyat	246	298	356	Unit
	b) Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat	53.027.800	62.750.500	72.078.250	Ton
	c) Nilai Produksi Benih Ikan Rakyat	9.245.635.000	11.164.475.000	13.482.560	Rp.
3. Budidaya Perikanan					
	a) Jumlah Pembudidaya	5.318	5.424	5.496	RTP
	b) Jumlah Produksi Budidaya	9.338	8.850,84	9.935,41	Ton
	c) Nilai Produksi Produksi Budidaya (Rpx1.000)	229.085.500	213.148.864,00	252.240.225	Rp
4. Perikanan Tangkap					
	a) Jumlah Nelayan	2.390	2.388	2.388	RTP
	b) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	443,6	475,3	586,2	Ton
	c) Nilai Produksi Produksi Perikanan tangkap	10.121.280	11.236.420,00	14.021.450	Rp
4. Nilai Tukar Pembudidaya Air Laut					
	a) Jumlah Pembudidaya	0	0	0	Orang
5. Nilai Tukar Pembudidaya Air Tawar					
	a) Jumlah Pembudidaya	5.564	5.722	5.852	Orang

Benih, Industri dan Nilai Perikanan	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
b) Penerimaan Pembudidaya	238.331.135.000	224.313.339.000	265.722.785.000	Rp
c) Pengeluaran Pembudidaya				
(a) Biaya Konsumsi	360.000.000	380.000.000	395.010.000	Rp
(b) Biaya Produksi	178.748.351.250	154.851.749.800	147.783.125.000	Rp
(c) Keuntungan per thn	59.582.783.750	69.461.589.200	117.544.650.000	Rp
6. Volume dan Nilai Ekspor Perikanan				
a) Volume Ekspor	5.602,50	5.882,63	5.366,24	Ton
b) Nilai Ekspor (Rpx1000)	137.451.300	141.667.326	123.490.040	Rp
7. Volume dan Nilai Ekspor Rumput Laut				
a) Volume Ekspor	0	0		Ton
b) Nilai Ekspor	0	0		Rp

Sumber : Dinas Perikanan 2022

## 2. Urusan Pariwisata

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Pasal 1 angka 3 secara normatif memberikan batasan, bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Lampung merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sektor unggulan di bidang Pariwisata. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) potensi wisata Kabupaten Lampung Barat berjumlah 77 destinasi wisata yang terdiri dari 14 objek Wisata Religi, 6 objek Wisata Budaya, 4 objek Wisata Danau, 23 objek Wisata Alam, 18 objek Wisata Sejarah, 5 objek Wisata Agro, 3 objek Wisata Buatan, 5 objek Wisata Cagar Alam.

Sampai dengan saat ini destinasi wisata yang dikelola oleh kelompok Sadar Wisata sebanyak 37 destinasi. Dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mulai dari penambahan amenitas, perbaikan aksesibilitas dan pembinaan atraksi. Maka dalam 3 (tiga) tahun terakhir angka kunjungan pariwisata terus mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Angka kunjungan pariwisata Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 700% yaitu sebesar 110.782 kunjungan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 27.624. Dengan adanya Pandemi Covid-19 maka terjadi penurunan angka kunjungan wisata mencapai 70%. Hal tersebut berdampak terhadap geliat ekonomi pada masyarakat yang saat ini sedang bergiat mengembangkan pariwisata. Namun demikian dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penurunan aktivitas sektor pariwisata masih dapat ditangani oleh masyarakat mengingat kegiatan di sektor pariwisata bukan merupakan mata pencaharian utama. Pada masa pandemi digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pembenahan-pembenahan internal dan penataan destinasi wisata, sehingga diharapkan pada saat pandemi berakhir masyarakat telah bersiap menyambut kunjungan wisatawan dengan mempersiapkan destinasi wisatanya menjadi lebih baik.

Tabel 2.99.  
Data Kunjungan Wisatawan Nusantara

No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pinus Ecopark	Wisata Alam Pohon Pinus	Sukapura Sumberjaya	0	19125	11782	-70	Destinasi Baru
2	Air Terjun Curup Cengkaan	Wisata Air Terjun Cengkaan	Way Petai Sumberjaya	2859	3061	9856	90	
3	Area Jaya	Wisata Alam Puncak Rest Area	Sindang Pagar Sumberjaya	2842	21717	12784	-87	
4	Way Besay Rafting	Wisata Arung Jeram	Sukajaya Sumberjaya	3375	405	761	-88	
5	Bumdes Tirtajaya	Wisata Arung Jeram	Sukajaya Sumberjaya	0	365	981	89	Destinasi Baru
6	Upt. Situs Megalitik Batu Brak	Wisata Sejarah Situs Megalitik Batu Brak	Purawiwitan Kebun Tebu	0	10709	730	-95	Destinasi Baru



No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Puncak Bintang	Wisata Alam Puncak Bukit	Purajaya Kebun Tebu	0	0	529	100	Destinasi Baru
8	Cadas	Wisata Air Terjun Cipta Mulya	Cipta Mulya Kebun Tebu	0	958	1289	3	Destinasi Baru
9	Temiangn Hill	Wisata Alam Negeri Diatas Awan	Trimulyo Gedung Surian	0	10163	6869	-42	Destinasi Baru
10	Kampung Kopi Rigis	Wisata Agro Kampung Kopi	Rigis Jaya Air Hitam	3824	7352	16417	100	
11	Taman Wisata Tri Hita Karana	Wisata Budaya Kampung Bali	Sri Menanti Air Hitam	0	23874	7255	100	Destinasi Baru
12	Maju Jaya	Wisata Bumi Perkemahan Mabar Jaya Dan Air Panas	Sukaraja Way Tenong	3420	1374	7576	50	
13	Curup Tirtomoyo	Wisata Air Terjun	Tambak Jaya Way Tenong	2451	148	2886	100	
14	Cinta Laksana	Wisata Agro Strawberi	Puralaksana Way Tenong	2124	0	572	5	
15	Puralaksana Indah	Wisata Agro Kopi	Puralaksana Way Tenong	3620	0	568	50	
16	Awet Siaga	Wisata Agro Kopi	Sekincau	2429	344	1095	86	

No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Agro Wisata Alam Segar Sari	Wisata Agro Jeruk	Giham Sukamaju Sekincau	0	6097	3901	-30	Destinasi Baru
18	Pampangan Mandiri	Wisata Air Terjun Tresno	Pampangan Sekincau	2247	1070	1774	52	
19	Puncak Jaya Menggala	Wisata Alam Puncak Jaya Menggala	Bakhu Batu Ketulis	0	1654	3460	100	Destinasi Baru
20	Way Sebuga	Wisata Air Terjun Sebuga	Sukarame Belalau	2729	166	284	-94	
21	Way Segening	Wisata Air Terjun Way Segening	Turgak Belalau	3672	194	1765	-80	
22	Hambekhos	Wisata Alam Taman Hambekhos	Kenali Belalau	2994	1709	22	-95	
23	Pesagi Jaya Sakti	Wisata Gunung Pesagi Dan Budaya	Hujung Belalau	0	2288	2690	100	Destinasi Baru
24	Desa Adat Puncak Dalam	Wisata Budaya Kepaksian Buay Bejalan Di Way	Kembahang Batu Brak	0	200	1585	100	Destinasi Baru
25	Bukit Bawang Bakung	Wisata Alam Bukit Bawang Bakung	Negeri Ratu Batu Brak	0	7512	5831	-60	Destinasi Baru
26	Upt. Kebun Raya Liwa	Wisata Kebun Raya Liwa	Kubu Perahu Balik Bukit	56750	45026	7676	21	

No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Kubu Perahu Tnbbs	Wisata Alam Bumi Perkemahan Dan Air Terjun	Kubu Perahu Balik Bukit	2431	489	1260	70	
28	Berlian Muda	Wisata Alam Buatan	Pagar Dewa Sukau	0	6847	9768	100	Destinasi Baru
29	Sukabanjar	Wisata Danau Ranau	Suka Banjar Lumbok Seminung	2824	130	2593	90	
30	Sai Betik	Wisata Danau Ranau Dan Gunung Seminung	Keagungan Lumbok Seminung	2892	4229	5487	50	
31	Jagat Endah Lestari	Wisata Geotermal Kawah Keramikan, Nirwana Dan Danau Lebar	Sukamarga Suoh	2821	3592	2463	-60	
32	Tunas Harapan	Wisata Danau Asam	Gunung Ratu Bandar Negeri Suoh	3100	1610	4458	50	
33	Curup Padae	Curup Padae Dan Kolam Renang	Mutar Alam Way Tenong	0	0	5350	100	Destinasi Baru
34	Lowista	Danau	Lumbok Seminug	0	0	3550	100	
35	Rumah Adat Kepaksian Pernong Dan Lembah Sekala Bekhak	Rumah Adat Kepaksian Pernong Dan Lembah Sekala Bekhak	Pekon Balak Batu Berak	0	0	4350	100	

No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saluy Pitu	Saluy Pitu						
36	Peduli Seminung	Pendakian Gunung Seminung	Teba Pering Raya Sukau	0	0	870	80	Destinasi Baru
37	Lamban Pesagi	Rumah Tradisional Lamban Pesagi	Kenali Belalau	0	0	827	60	
38	Serege Pulau Manggis	Wisata Alam Dan Agro	Sinar Luas Kebun Tebu	0	0	1500	100	Destinasi Baru
Jumlah Total				10940 4	18240 8	15341 4	50	

Catatan

Tahun 2019 terdapat 19 Destinasi Wisata yang telah dikelola oleh Pokdarwis / Pengelola

Tahun 2020 terdapat 32 Destinasi Wisata yang telah dikelola oleh Pokdarwis / Pengelola

Tahun 2021 terdapat 38 Destinasi Wisata yang telah dikelola oleh Pokdarwis / Pengelola

Tabel 2.100.  
Rekapitulasi Obyek Wisata

Obyek Wisata	THn 2019	THn 2020	THn 2021	Satuan
1. Obyek Wisata Budaya	2	2	6	Objek
2. Obyek Wisata Bahari	3	3	0	Objek
3. Obyek Wisata Cagar Alam	-	-	5	Objek
4. Obyek Wisata Pertanian/ Perkebunan	4	4	4	Objek
5. Obyek Wisata Buru	5	13	-	Objek
6. Obyek Wisata Alam	7	17	23	Objek
7. Obyek Wisata Sejarah	1	1	31	Objek
8. Obyek Wisata Religi	-	-	13	Objek
9. Obyek Wisata Pendidikan	-	-	-	Objek
10. Obyek Wisata Kuliner	589	1980	1984	Objek

11. Objek Wisata Belanja	-	-	-	Objek
12. Objek Wisata Buatan	1	1	6	Objek

Sumber : Dinas Pora Pariwisata 2022

Tabel 2.101.  
Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Wisatawan Domestik	109404	180428	55448	Orang
2. Wisatawan Mancanegara	881	5	0	Orang
TOTAL	110285	180433	55448	Orang

Sumber : Dinas Pora Pariwisata 2022

Berdasarkan Rencana Induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 s.d 2013 sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2016. Tentang REPPDA sebanyak 77 spot destinasi Pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Barat mulai berkembang dengan peningkatan dari tahun ke tahun dilihat dari kunjungan wisata yang berkunjung ke Lampung Barat dan jumlah Komunitas Pendukung Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), sebagai Mitra Dinas Pariwisata yang ada dari mulai Tahun 2016 ada 4 Destinasi yang dikelola sampai Tahun 2022 sudah ada 37 Destinasi Pariwisata yang ada Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Lampung Barat.

### 3. Urusan Pertanian

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.. Kewenangan yang ditangani oleh Dinas adalah kewenangan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tanaman Pangan meliputi Padi (padi sawah dan padi ladang) dan Palawija (jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau). Hortikultura meliputi Hortikultura Semusim (Bawang merah, cabe, kubis, tomat dan lain-lain) dan Hortikultura Tahunan (Durian, alpukat, jeruk, pisang, jambu, duku, nangka, petai, jengkol dan lain-lain)

Tabel 2.102.  
Capaian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Jumlah produksi padi per tahun	Ton	166.481	136.784	111.641
2	Jumlah produksi sayuran per tahun	Ton	54.946	58.839	45.187
3	Jumlah produksi buah-buahan per tahun	Ton	26.928	28.722	42.861

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Komoditas padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang (lahan kering). Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami penurunan dari 136.784 ton pada tahun 2020 menjadi 111.641 ton. Produksi padi mengalami penurunan dikarenakan adanya berkurangnya baku lahan sawah sebagai prasarana lahan produksi. Pada tahun 2021 diterapkan baku lahan sawah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawaah Nasional Tahun 2019 seluas 10.464 Ha. Baku lahan sawah tersebut merupakan hasil dari dilakukannya pemetaan lahan sawah secara geospasial berdasarkan citra satelit yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Pemetaan dilakukan secara mendetail dengan melakukan verifikasi luas lahan baik dengan kabupaten dan kecamatan. Diharapkan data yang sudah tersedia sekarang ini dapat seterusnya sebagai data baku lahan yang pasti sehingga menjamin kepastian dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Pencapaian produksi padi tahun 2021 di dukung oleh:

1. Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai yang menjamin ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada. Pada tahun 2021 dilakukan melalui pembangunan dam parit 3 unit, embung 4 unit, pembangunan irigasi tanah dangkal/irigasi perpompaan 3 Unit dan perbaikan jaringan irigasi untuk 12 kelompok tani.
2. Dalam rangka memperlancar mobilisasi sarana produksi, alat mesin pertanian dan hasil produksi dilakukan pembangunan jalan usahatani di kawasan tanaman pangan sebanyak 3 unit, dimana masing-masing unit sepanjang 1 km.
3. Penyediaan alat mesin pertanian dalam rangka mendukung mempercepat waktu pengolahan tanah dan mempercepat penanaman secara serempak, melalui bantuan Traktor R2 sebanyak 25 Unit.
4. Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi, baik melalui gerakan massal pengendalian bersama-sama dengan petani, melakukan pembinaan peningkatan pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida dalam rangka pengamanan produksi.
5. Pengembangan pupuk organik untuk tanaman padi dengan tujuan menjaga dan mengembalikannya unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman dan mengantisipasi kelangkaan pupuk organik. Dalam rangka pengembangan pupuk organik dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik skala kelompok di 3 kelompok tani.

Produksi hortikultura secara keseluruhan mengalami peningkatan 0,56%, dimana produksi pada tahun 2020 sebesar 87.561 ton menjadi 88.048 ton pada tahun 2021. Produksi Tanaman Hortikultura Semusim mengalami penurunan -23,20%, dimana pada tahun 2020 produksi sebesar 58.839 ton menjadi 45.187 ton pada tahun 2021. Produksi Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya mengalami peningkatan sebesar 49,23%, dimana

produksi tahun 2020 sebesar 28.722 ton menjadi 42.861 ton pada tahun 2021. Secara umum pencapaian produksi hortikultura didukung oleh :

1. Pengembangan kawasan buah untuk komoditas pisang seluas 40 Ha
2. Pengembangan kawasan sayuran (cabe besar) seluas 25 Ha
3. Pengembangan kawasan bawang merah seluas 15 ha.
4. Pengenalan dan pengembangan penggunaan benih unggul buah (durian, manggis dan alpukat) dengan luasan 58 Ha.
5. Pemasyarakatan dan Pengembangan kawasan buah-buahan melalui bantuan bibit buah-buahan yang tersebar di 15 kecamatan.
6. Bantuan sarana produksi cabe rawit dengan budidaya tumpang sari seluas 45 Ha.

Tabel 2.103.  
Kinerja Tanaman Pangan

Tanaman Pangan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
<b>1. Luas Lahan Pertanian</b>				
Lahan Sawah	13.443	11.692	10.464,64	Ha
Beririgasi	11.119	9.180	8.660,64	Ha
Tadah Hujan	2.324	2.512	1.804	Ha
Lahan Kering				Ha
Tegal/Kebun	21.800	21.965	21.965	Ha
Ladang/Huma	-	-	-	Ha
<b>2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan</b>				
Jumlah Produksi Padi	166.481	136.784	111.641	Ton
Jumlah Produksi Jagung	676	791	629	Ton
Jumlah Produksi Kedelai	750	1.667	413	Ton
Jumlah Produksi Ubi	9.071	9.354	8.323	Ton
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya	275	283	248	Ton

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Potensi penggunaan lahan di kabupaten Lampung Barat yang merupakan wilayah budidaya untuk lahan sawah seluas 10.464,64 hektar pada tahun 2021. Rincian dari baku lahan sawah adalah lahan sawah yang beririgasi seluas 8.660,64 hektar dan tadah hujan seluas 1.804 hektar. Potensi pertanaman yang ada di lahan sawah adalah padi. Untuk peningkatan Indeks Pertanaman dan perbaikan pola tanam dalam rangka memutuskan mata rantai hama dan penyakit dapat dilakukan pertanaman palawija seperti jagung dan kedelai. Sentra pertanaman padi di kabupaten Lampung Barat adalah kecamatan Bandar Negeri Suoh, Suoh, Sukau, Lumbok Seminung, Kebun Tebu dan Balik Bukit.

Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari lahan untuk Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat, Padang Penggembalaan, Hutan Negara dan Lainnya (tambak, kolam dan empang). Potensi lahan pertanian bukan sawah yang dapat dikembangkan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura adalah lahan tegal/kebun. Komoditas yang sebagian besar dikembangkan adalah hortikultura baik sayuran dan buah-buahan. Sayuran yang dibudidayakan sebagian petani di Lampung Barat antara lain Kubis, Wortel, Cabe Merah Besar, Cabai Rawit, Tomat, Sawi dan Labu Siam. Sentra sayuran di Lampung Barat adalah kecamatan Balik Bukit, Sekincau, Sukau dan Way Tenong. Buah-buahan yang dibudidayakan di Lampung Barat dan mulai dikembangkan adalah pisang, jeruk, alpukat, salak dan durian. Pisang merupakan komoditas yang sudah lebih intensif dibudidayakan. Sentra pisang di Lampung Barat adalah kecamatan Sumberjaya, Suoh, Kebun Tebu, Air Hitam dan Way Tenong.

Selain dari komoditas padi, dari sub sektor tanaman pangan berasal dari palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan tanaman sumber karbohidrat lainnya. Palawija tidak termasuk komoditas tanaman pangan yang prioritas untuk dibudidayakan. Palawija difungsikan untuk menjadi tanaman selingan, khususnya untuk petani yang membudidayakan hortikultura semusim. Budidaya palawija dilakukan untuk rotasi tanaman di lahan hortikultura semusim dengan tujuan memutus rantai pertumbuhan hama dan penyakit. Pada tahun 2020 produksi palawija sebesar 12.095 Ton. Terdiri komoditas kedelai sebesar 1.667 Ton, jagung 791 Ton, Ubi 9.354 ton dan Tanaman Pangan Lainnya 283 Ton.

Tabel 2.104.  
Kinerja Perkebunan

Perkebunan	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Satuan
1. Luas Areal Perkebunan				Ha
Luas Areal Tanaman Tahunan				Ha
Luas Areal Kelapa Sawit	30	35	36	Ha
Luas Areal Karet	106	107	107	Ha
Luas Areal Kelapa	512,1	512	511	Ha
Luas Areal Kopi	53.878,1	54.100	54.106	Ha
Luas Areal Teh	0	0	0	Ha
Luas Areal Lada	7.531,9	7.582	7.582	Ha
Luas Areal Kakao	1.476,3	1.608	1.698	Ha
Luas Areal Jambu Mede	0	0	0	Ha
Luas Areal Cengkeh	863,6	896	897	Ha
Luas Areal Kapas	0	0	0	Ha
Luas Areal Tanaman Semusim				Ha
Luas Areal Tembakau	24	10	10	Ha



Perkebunan		Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Satuan
	Luas Areal Tebu	0	0	0	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan					Ton
	Jumlah Produksi Tanaman Tahunan				Ton
	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	14	17	19	Ton
	Jumlah Produksi Karet	34	41	42	Ton
	Jumlah Produksi Kelapa	631,1	631	628	Ton
	Jumlah Produksi Kopi	52.572,3	57.815	57.930	Ton
	Jumlah Produksi Teh	0	0	0	Ton
	Jumlah Produksi Lada	3.216,6	3.320	3.325	Ton
	Jumlah Produksi Kakao	1.083,5	1.875	2.053	Ton
	Jumlah Produksi Jambu Mede	0	0	0	Ton
	Jumlah Produksi Cengkeh	73,0	82	85	Ton
	Jumlah Produksi Kapas	0	0	0	Ton
Jumlah Produksi Tanaman Semusim					Ton
	Jumlah Produksi Tembakau	2	4	6,8	Ton
	Jumlah Produksi Tebu	0	0	0	Ton

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, produksi kopi robusta merupakan komoditas terbesar yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1.138 kg/ha/th.

Peningkatan produksi dan produktivitas produk unggulan Kopi Robusta dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terpadu, antara lain melalui kebijakan:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas dengan penerapan teknologi anjuran sesuai agroekosistem, penyiapan bibit unggul dan bantuan alsintan.
2. Pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung dan jalan produksi.
3. Penganekaragaman komoditas perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani kelompok tani melalui pelatihan dan pendampingan

5. Peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dengan penerapan teknologi tepat guna.
6. Peningkatan akses pasar melalui kemiteraan, promosi dan pameran pada berbagai event.
7. Peningkatan kinerja dan integritas aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Secara umum untuk urusan peternakan terbagi menjadi ternak unggas dan ternak non unggas, rincian jenis ternak di Lampung Barat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.105.  
Produksi Ternak (Dalam Ekor)

NAMA TERNAK	TAHUN PRODUKSI (dalam Ekor)		
	2019	2020	2021*)
Sapi potong Lokal	1.054	935	946
Kerbau	-	11	14
Kambing	1.795	2.625	2.975
Domba	-	18	21
Ayam Buras	2.274.957	3.221.260	3.221.400
Ayam Ras Petelur Pejantan	-	-	94.948.256
Ayam ras Pedaging	-	5.383.500	-
Itik	44.009	41.176	41.340
Itik Manila	16.672	2.135	2.280
Puyuh	699	15.000	16.000
Kelinci	2.297	2.477	2.535

Tabel 2.106.  
Produksi Ternak (Dalam Kg)

NAMA TERNAK	TAHUN PRODUKSI (dalam Ekor)		
	2019	2020	2021*)
Sapi potong Lokal	237.788,00	226.286,25	228.948,44
Kerbau	-	2.294,09	2.919,76
Kambing	30.820,00	41.310,94	46.819,06
Domba	-	201,83	235,46
Ayam Buras	2.154.257,00	2.480.370,20	2.480.478,00
Ayam Ras Petelur Pejantan	-	-	93.998.773,44
Ayam ras Pedaging	-	6.312.692,10	-
Itik	50.698,00	43.028,92	43.200,30

NAMA TERNAK	TAHUN PRODUKSI (dalam Ekor)		
	2019	2020	2021*)
Itik Manila	20.556,00	2.348,50	2.508,00
Puyuh	77	1.650,00	1.760,00
Kelinci	1.436,00	1.548,13	1.584,38

Jika dibandingkan capaian produksi ternak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, peningkatan jumlah produksi terutama pada ternak ayam buras, ternak kambing, dan ternak puyuh. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan tingkat kemudahan dalam pengembangannya. Upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan urusan peternakan ditempuh antara lain melalui upaya peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana dan prasarana peternakan bagi para peternak.

#### 4. Urusan Perdagangan

Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah urusan Perdagangan dan Perindustrian. Sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat, sekaligus menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut kami sajikan data Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.107.

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat

Rincian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Adhb (miliar)	729.012,10	806.045,70	910.538,20	870.031,90	-
PDRB Adhk (miliar)	557.103,90	600.273,00	654.302,90	610.855,80	-
Distribusi terhadap Total PDRB Adhb (%)	11,92	12,23	12,83	12,19	-
Laju Pertumbuhan (%)	10,47	7,75	9,00	-6,64	-

Sumber: BPS Lampung Barat, 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, dengan kata lain terdapat trend positif aktivitas ekonomi sektor perdagangan. Berdasarkan data yang didapat dari BPS Lampung Barat transaksi paling

dominan yang mendukung pertumbuhan kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Lampung Barat adalah aktivitas perdagangan kendaraan bermotor roda dua. Selanjutnya jika dilihat dari persentase distribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, dengan laju pertumbuhan yang juga fluktuatif.

Akan tetapi pada tahun 2020 kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat mengalami kontraksi atau perlambatan pertumbuhan sebesar -6,64%. Kondisi ini merupakan dampak besar dari bencana non alam Pandemi Covid 19 yang sangat berdampak pada ekonomi dunia, ekonomi nasional hingga perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Kondisi pandemi covid 19 yang mengharuskan dilaksanakannya PPKM oleh Pemerintah, membuat iklim usaha menjadi tidak menguntungkan sehingga masyarakat lebih memilih menahan dananya untuk menghindari kerugian ekonomi lebih besar lagi.

Sementara untuk tahun 2021 hingga dokumen ini selesai disusun, data kontribusi Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat belum tersedia di Badan Pusat Statistik Lampung Barat atau sedang dalam tahap penghitungan.

Selanjutnya masih di sektor perdagangan, perkembangan usaha perdagangan di Kabupaten Lampung Barat bisa dilihat dari ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.108.  
Jumlah Sarana Perdagangan

Sarana Perdagangan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
Sarana Perdagangan				
Jumlah Pasar Tradisional				
Jumlah Dikelola Pemerintah	10	10	10	Unit
Jumlah Bangunan Permanen	333	335	337	Unit
Jumlah Bangunan Semi Permanen	80	74	74	Unit
Jumlah Pasar Modern				
Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba	0	0	0	Unit
Minimarket	30	31	44	Unit
Pasar Perkulakan/Grosir	0	0	0	Unit
Pertokoan	2.722	2.777	5.100	Unit
Jumlah Rumah Potong Hewan	1	1	1	Unit

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Sarana Perdagangan merupakan penunjang dalam aktivitas perdagangan baik secara tradisional maupun pasar modern. Sarana Perdagangan terdiri dari sarana perdagangan yang dikelola pemerintah dan juga yang merupakan milik swasta. Sarana perdagangan milik pemerintah adalah pasar tradisional yang tersebar di 10 tempat di Kabupaten Lampung Barat. Pasar Tradisional di Lampung Barat saat ini masih menopang ekonomi di pedesaan terutama di daerah-daerah yang jauh dari lokasi ibukota kabupaten. Sarana Perdagangan di pasar tradisional maupun yang berada diluar lokasi pasar tradisional dan dikelola pemerintah dari tahun 2019 mengalami fluktuasi, yakni ada penambahan bangunan permanen baik yang berasal dari rehabilitasi bangunan semi permanen yang ada ataupun bangunan baru.

Adapun pada pasar modern, tercatat bahwa di Kabupaten Lampung Barat terdapat tiga jenis pasar modern yaitu minimarket, pertokoan dan rumah potong hewan. Secara kuantitatif jumlah pasar modern mengalami kenaikan kecuali rumah potong hewan, hal ini menunjukkan bahwa geliat usaha perdagangan di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan trend positif.

Selanjutnya untuk jenis usaha perdagangan di Kabupaten Lampung Barat terdapat beberapa jenis usaha yang dominan antara lain penjualan jasa makanan/minuman dan penjualan cenderamata. Perkembangan kedua Jenis tersebut bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.109.  
Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman

Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Restoran	145	142	159	Buah
2. Jumlah Cafeteria/Cafe	2	2	2	Buah

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Tabel diatas menunjukkan ada pertumbuhan jumlah usaha makanan dan minuman di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021, meski ditahun sebelumnya terdapat penurunan jumlah restoran yakni sebesar -2,06%. Kenaikan sebesar 11,97% jumlah restoran pada tahun 2021 memiliki catatan tersendiri mengingat kondisi pandemi secara umum membuat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah yang membuat mobilitas masyarakat menurun, tetapi juga membuat pelaku usaha khususnya pelaku usaha kuliner beradaptasi dengan baik dimasa pandemi sehingga justru memunculkan habit baru di masyarakat yang meski banyak mengurangi aktivitas keluar rumah namun tingkat konsumsi makanan dan minuman justru meningkat ditambah layanan pembayaran dan pengantaran sampai ditangan konsumen oleh para pelaku usaha.

Tabel 2.110.  
Jumlah Penjualan Cenderamata

Penjualan Cenderamata	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Toko Cenderamata	2	2	2	Toko
2. Pedagang Cenderamata Non Toko	0	0	0	Orang

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari tabel diatas, berdasarkan data yang masuk di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan usaha penjualan cenderamata belum menunjukkan perkembangan, belum berbadang lurus dengan pertumbuhan destinasi wisata di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini memerlukan perhatian yang serius, mengingat salah satu dampak yang diharapkan muncul dengan perkembangan destinasi wisata adalah tumbuhnya UKM kerajinan atau cenderamata di sekitar lokasi wisata.

#### 5. Urusan Perindustrian

Urusan Pilihan selanjutnya adalah urusan perindustrian, dimana perindustrian adalah salah satu sektor yang saat ini cukup banyak diminati pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Barat. Sampai dengan saat ini, Industri di Kabupaten Lampung Barat belum berbicara masalah Industri Pengolahan yang terklasifikasi Industri Menengah dan Besar, melainkan masih skala industri kecil. Adapun Sektor Perindustrian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat sekitar 5.29% pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.20% dari tahun 2019, sebagai dampak bencana non alam Pandemi covid 19.

Tabel 2.111.  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Lampung Barat  
Atas Dasar Harga Berlaku (AdHB) Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50.27	49.12	46.92	47.75	47.23
B.	Pertambangan dan Penggalian	2.51	2.57	2.71	2.61	2.43
C.	Industri Pengolahan	4.63	4.86	5.49	5.29	5.35
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	.01	.01	.01	.01	.01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	.11	.11	.11	.12	.11

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
F.	Konstruksi	3.84	4.00	4.24	3.99	4.29
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.92	12.23	12.83	12.20	12.85
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.66	2.69	2.73	2.63	2.58
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.30	1.35	1.42	1.35	1.29
J.	Informasi dan Komunikasi	2.92	2.97	3.01	3.22	3.18
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.93	1.88	1.82	1.86	1.95
L.	Real Estate	4.44	4.48	4.60	4.45	4.33
M.	Jasa Perusahaan	.19	.19	.19	.19	.18
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.43	6.53	6.60	6.80	6.81
O.	Jasa Pendidikan	4.12	4.20	4.33	4.50	4.47
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.40	1.40	1.41	1.55	1.56
Q	Jasa lainnya	1.32	1.42	1.56	1.47	1.38
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan rincian tabel di atas, lapangan usaha industri pengolahan menunjukkan peningkatan kontribusi pada capaian PDRB Lampung Barat, dimulai di tahun 2017 sebesar 4.63% lalu meningkat menjadi 4.86% di tahun 2018 dan sebesar 5.49% di tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 5.29% dan 5.35%. Kondisi ini disebabkan dampak dari pandemic *covid19* yang berdampak terhadap pertumbuhan industri pengolahan yang bukan saja terjadi pada sector industri kecil dan menengah namun juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan industri berskala besar. Meskipun pada tahun 2020 sektor industri pengolahan Lampung Barat mengalami penurunan namun di tahun 2021 terdapat peningkatan kinerja sector industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2021 sektor industri pengolahan telah kembali bergeliat dalam menggerakkan roda perekonomian Lampung Barat, di mana pada tahun 2020 sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar - 5.04% dan pada tahun 2021 kembali tumbuh positif sebesar 5.36%.

Tabel 2.112.  
Jumlah Jenis Industri Kecil

Jenis Industri Kecil	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
I. Jenis Industri Kecil				
1. Industri Pengolahan Pangan				
1. Jumlah Unit Industri	336	357	382	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	1.808	1.963	2.112	Orang
3. Jumlah Produksi	620.200	681.390	823.330	Ton
4. Nilai Produksi	14.789.162	15.107.701	15.820.276	Rp.000
2. Industri Tekstil				
1. Jumlah Unit Industri	23	24	25	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	59	62	63	Orang
3. Jumlah Produksi	47.104	50.166	51.426	Buah
4. Nilai Produksi	795.066	2.365.066	2.435.066	Rp.000
3. Industri Pengolahan Kayu				
1. Jumlah Unit Industri	83	83	88	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	230	230	239	Orang
3. Jumlah Produksi	37.412	37412	41.192	Unit
4. Nilai Produksi	7.467.034	7.467.037	7.7747.034	Rp.000
4. Industri Pengolahan Kertas				
1. Jumlah Unit Industri				Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja				Orang
3. Jumlah Produksi				Rim
4. Nilai Produksi				Rp.000
5. Industri Kimia Farmasi				
1. Jumlah Unit Industri	2	2	2	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	35	35	35	Orang
3. Jumlah Produksi	2.580	2.580	2.580	Kg
4. Nilai Produksi	105.000	105.000	105.000	Rp.000
6. Industri Pengolahan Karet				



Jenis Industri Kecil	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Unit Industri	18	18	18	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	33	33	33	Orang
3. Jumlah Produksi	6.777	6.777	6.777	Buah
4. Nilai Produksi	612.413	612.413	612.413	Rp.000
7. Industri Galian Bukan Logam				
1. Jumlah Unit Industri	28	28	28	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	78	78	78	Orang
3. Jumlah Produksi	2.121.916	2.121.916	2.121.916	Buah
4. Nilai Produksi	436.951	436.951	436.951	Rp.000
8. Industri Baja/Pengolahan Logam				
1. Jumlah Unit Industri	12	13	13	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	24	26	26	Orang
3. Jumlah Produksi	5.844	6.324	6.324	Buah
4. Nilai Produksi	794.000	894.000	894.000	Rp.000
9. Industri Peralatan				
1. Jumlah Unit Industri	9	9	9	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	37	37	37	Orang
3. Jumlah Produksi	1.591	1.591	1.591	Buah
4. Nilai Produksi	629.000	629.000	629.000	Rp.000
10. Industri Jasa				
1. Jumlah Unit Industri	121	122	122	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	386	388	388	Orang
3. Jumlah Produksi	169.055	170.255	170.255	Buah
4. Nilai Produksi	6.436.533	6.436.733	6.436.733	Rp.000
11. Industri Anyaman dari Bambu/Rotan				
1. Jumlah Unit Industri	62	63	63	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	190	192	192	Orang
3. Jumlah Produksi	23.336	23.516	23.516	Buah
4. Nilai Produksi	1.115.619	1.115.739	1.115.739	Rp.000
12. Industri Lainnya				

Jenis Industri Kecil	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
YTDL				
1. Jumlah Unit Industri	64	71	71	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	201	253	253	Orang
3. Jumlah Produksi	50.725	62.009	62.009	Buah
4. Nilai Produksi	4.188.021	4.341.242	4.341.242	Rp.000
JUMLAH	2019	2020	2021	Satuan
1. Jumlah Unit Industri	758	790	823	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	3.081	3.297	3.460	Orang
3. Jumlah Produksi	3.086.540	3.163.936	3.312.716	Buah/Ton /Unit
4. Nilai Produksi	37.368.799	39.510.879	40.713.454	Rp.000

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Secara umum terdapat kenaikan Jumlah unit Industri dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 Jumlah Industri Kecil adalah 758 unit meningkat menjadi 790 unit di tahun 2020. Pada tahun 2021 Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Lampung Barat adalah 823 unit, meningkat sebesar 4,1%. Kondisi ini terlihat sedikit kontradiktif dengan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat yang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi covid 19. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh menurunnya penjualan produk IKM, sehingga meskipun terjadi kenaikan pertumbuhan IKM sebesar 4,1% namun tidak lantas menaikkan kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat.

Namun demikian, bagaimana kondisi pertumbuhan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Lampung Barat pada tahun 2021 belum bisa tergambarkan secara riil, mengingat PDRB Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 sampai dokumen ini disusun belum dirilis oleh BPS Lampung Barat.

#### 6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.113.  
Kinerja Kelitbangan

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah Inovasi PD	61	156	271
2	Jumlah Kajian	5	0	2
3	Jumlah Rekomendasi	10	16	12

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Badan penelitian dan pengembangan dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut :

- Jumlah Inovasi Perangkat Daerah  
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang telah diverifikasi pengembangannya pada tahun 2021 sejumlah 271 jenis, hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Inovasi daerah yang sudah diverifikasi, dilaporkan ke Badan Penelitian dan pengembangan Kemendagri melalui <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Bagi Pemerintah daerah yang berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan pada kemajuan daerah, maka Kemendagri akan memberikan reward/penghargaan dan insentif untuk memotivasi daerah dalam melaksanakan inovasi.
- Jumlah Kajian  
Kajian yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berjumlah 7 (tujuh) kajian. Pada tahun 2020, kajian tidak dapat dilakukan mengingat pada tahun 2020 adalah awal pandemi Covid 2019. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.  
Balitbang saat ini belum memiliki Pegawai Fungsional Peneliti/Perekayasa sehingga untuk melaksanakan kajian masih mengandalkan Pihak Ketiga dengan cara Swakelola Tipe 2.  
Untuk mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Balitbang, rekomendasi yang dihasilkan berasal dari kajian, Focus Group Discussion (FGD) dan Rekomendasi Tenaga Ahli kelitbangan. Sehingga meskipun pada tahun 2020 tidak ada kajian, namun rekomendasi bisa dihasilkan dari FGD dan hasil rekomendasi Tenaga Ahli Kelitbangan.

Kajian yang telah dilakukan dari tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

- Kajian Model Pengembangan Agribisnis Kopi Berdaya Saing dan Berkelanjutan
- Design Penahan Longsor Di Kabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal
- Analisis Pemetaan Data Potensi PAD Dari Opd Penghasil Di Kabupaten Lampung Barat
- Penguatan Kerjasama Kelitbangan Dalam Rencana Pembentukan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Khusus Kopi Di Kabupaten Lampung Barat
- Penguatan Konsep Kabupaten Lampung Barat Sebagai Kabupaten Berbasis Konservasi
- Kajian Pengembangan Tata Kelola Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Melalui Kelembagaan
- Kajian Design Pengolahan Kualitas Air Minum di Kabupaten Lampung Barat

- Jumlah Rekomendasi  
 Pada Tahun 2021, Rekomendasi Kelitbangan yang dihasilkan adalah 12 Rekomendasi. Total Rekomendasi dari tahun 2019 adalah 38 Rekomendasi. Rekomendasi Kelitbangan berasal dari Kajian, FGD dan Tenaga Ahli. 38 Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
  - Model Pengembangan Agribisnis Kopi Berdaya Saing dan Berkelanjutan
  - Design Penahan Longsor Di Kabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal
  - Analisis Pemetaan Data Potensi PAD Dari Opd Penghasil Di Kabupaten Lampung Barat
  - Penguatan Kerjasama Kelitbangan Dalam Rangka Rencana Pembentukan Program Studi Diluar Kampus Utama (Psdku) Khusus Kopi Di Kabupaten Lampung Barat
  - Penguatan Konsep Kabupaten Lampung Barat Sebagai Kabupaten Berbasis Konservasi
  - Rencana Aksi Kabupaten Literasi
  - Pengelolaan Lamban Baca "Beguai Jejama"
  - Strategi Penguatan Inovasi Daerah
  - Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Lampung Barat
  - Dokumen Induk Kabupaten Tangguh Bencana
  - Pengembangan Kawasan Geopark Konservasi Suoh
  - Perancangan Buku Panduan Wisata Kabupaten Lampung Barat
  - Kabupaten Lampung Barat Menyusun Buku 100 Inovasi Lampung Barat Hebat, dimana isinya terdiri dari kumpulan Inovasi-Inovasi Yang dikumpulkan oleh seluruh OPD dan Kecamatan.
  - Upaya Persiapan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat
  - Kebijakan Pencegahan dan Penindakan Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat
  - Jalan Baru UMKM Kopi Lampung Barat di Masa Pandemi Covid-19
  - Membumikan Pancasila, Membangun Ke Indonesiaan dan Memperbaharui Hukum Bersama Menuju Tatanan Normal Baru
  - Potensi Pengembangan Sorgum Sebagai Sumber Pangan Alternatif di Kabupaten Lampung Barat
  - Taman Indria Sebagai Model Pendidikan Anak di Kabupaten Lampung Barat
  - Lamban Baca dan Gerakan Sosial ( Gerakan Literasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat)
  - Menyusun Pedoman Peraturan Bupati tentang Penetapan Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana 2021 - 2030 yang akan menjadi acuan OPD dalam melaksanakan Komitmen Tangguh Bencana
  - Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lampung Barat dengan leading sektor BPBD
  - Menyusun Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengerahan Logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Barat dengan leading sektor BPBD

- Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan komitmen Kabupaten Konservasi di tiap Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Balitbang
- OPD yang belum mempunyai replikasi di dalam Inovasi yang diusulkan atau disampaikan supaya di laksanakan dengan cara –cara yang sangat simple.
- Replikasi Inovasi telah dilakukan oleh OPD namun belum terdokumentasi dengan baik. Diharapkan tiap replikasi Inovasi oleh OPD terdokumentasi sebagai eviden dalam pelaporan IGA
- Pengembangan Tata Kelola Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Melalui Kelembagaan
- Design Pengolahan Kualitas Air Minum di Kabupaten Lampung Barat
- Ketahanan Pangan Masyarakat
- Persiapan Rencana Kajian Integrasi Ternak Kambing dengan Tanaman Kopi
- Persiapan Rencana Model Kemitraan Konservasi di Kabupaten Lampung Barat
- Penyusunan Grand Design Zonasi Produk Unggulan Daerah Tiap Pekon Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata
- Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pengembangan Kepariwisata khususnya pekan wisata
- Memperkuat peran Daerah menghadapi Covid-19 di Era New Normal
- Gagasan Pengembangan Kawasan Geopark Suoh
- Penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan budaya lokal di Kabupaten Lampung Barat
- Ketahanan Pangan dengan Inovasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

## 7. Kantor Kesbang dan Politik

Tabel 2.114.  
Kinerja Kesbangpol

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA yang terjadi	4	3	3
2	Jumlah LSM	272	335	353
3	Jumlah Parpol	16	16	16

Pada tahun 2019 terdapat 4 (tiga) konflik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Ke 3 potensi/gejala konflik tersebut antara lain :

- Keberadaan 43 bangunan liar termasuk di dalamnya 7 warung remang-remang/tempat hiburan di Pekon Puralaksana dan Kelurahan Fajar Bulan yang tidak berizin dan dijadikan sebagai tempat prostitusi. Pada tahun 2012 warung/tempat hiburan liar tersebut sempat mendapat protes dari warga masyarakat karena dianggap merusak moral dan mengganggu

ketertiban. Hingga saat ini tindakan yang telah dilakukan Pemkab Lampung Barat baru sebatas melakukan pendataan bangunan dan pemilikinya. Dari hasil pendataan tersebut terdapat 24 orang WTS yang beroperasi.

- Masalah status tanah suka pura, masyarakat sukapura telah lama menempati tanah suka pura, dilain pihak pemerintah pusat yaitu Kementerian kehutanan menganggap tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak bisa di eksplorasi, penyelesaian dari konflik ini Pemda dan masyarakat mengusulkan kepada Kementerian kehutanan agar menghapus sukapura sebagai daerah konservasi hutan lindung
- Pendirian rumah ibadah (Vihara) di Pemangku Bedeng, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Bali Bukit. Masyarakat sekitar menolak untuk didirikannya rumah ibadah tersebut dengan alasan tidak ada satupun masyarakat sekitar yang memeluk agama Konghucu/Budha, yang mau mendirikan Vihara bukan warga masyarakat Pekon Padang Cahya, Status tanah yang akan didirikan rumah ibadah tersebut tidak diketahui oleh aparat Pekon Keabsahannya. Perangkat Kecamatan dan Pekon akan menindaklanjuti pembangunan rumah ibadah asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/seluruh kriteria persyaratan terpenuhi.
- Konflik masalah kepemilikan pasar lama sekincau antara masyarakat, dan Pemda Lampung Barat. Pemda Lampung Barat meyakini bahwa eks pasar lama sekincau merupakan aset milik Pemda Lampung Barat dan Pemda bermaksud menjadikan eks pasae sekincau dialih fungsikan menjadi POM bahan bakar, sementara itu sebagian masyarakat meyakini jika eks pasar lama sekincau merupakan milik mereka, karena tidak ada titik temu maka masyarakat menggugat kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan.

Kemudian pada tahun 2020 tinggal terdapat 3(tiga) konflik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Masalah konflik Keberadaan 43 bangunan liar termasuk di dalamnya 7 warung remang-remang/tempat hiburan di Pekon Puralaksana dan Kelurahan Fajar Bulan yang tidak berizin dan dijadikan sebagai tempat prostitusi dapat diselesaikan dengan operasi yustisi yang melibatkan kerjasama antara oleh Satuan Pol.PP Lampung Barat dan Satuan Pol.PP Provinsi Lampung.

Diakhir Tahun 2021 masih terdapat 3 (tiga) konflik yang belum selesai dan sedang dicari jalan keluarnya yaitu Masalah status tanah suka pura, Pendirian rumah ibadah (Vihara) di Pemangku Bedeng Pekon Padang Cahya Kecamatan Bali Bukit. dan Konflik masalah kepemilikan pasar lama sekincau antara masyarakat dan Pemda Lampung Barat

Jumlah LSM

Jumlah LSM/Ormas di Lampung Barat dari tahun ketahun terus meningkat hal ini menunjukkan kesadaran berserikat dan berkumpul masyarakat Lampung Barat dari tahun ketahun terus bertambah. Kondisi ini bisa dilihat pada akhir tahun 2021 berjumlah 353 meningkat pesat dibanding tahun

tahun 2019 yang berjumlah 272. Pada tahun 2021 ini Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- ORMAS dengan jumlah 195
- OKP dengan jumlah 17
- PROFESI dengan jumlah 38
- PAGUYUBAN dengan jumlah 43
- LSM dengan jumlah 64

#### Jumlah Parpol

Jumlah Partai politik yang mempunyai kepengurusan di Lampung Barat sebanyak 16 Partai Politik, ke 16 Partai Politik itu adalah (1) Partai NASDEM; (2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ; (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); (5) Partai Golongan Karya (GOLKAR); (6) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); (7) Partai Demokrat (PD); (8) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 2 kursi; (9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); (10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ; (11) Partai Solidaritas Indoensia (PSI); (12) Partai Bulan Bintang (PBB); (13) Partai Berkarya; (14) Partai Garuda; (15) Partai perindo; (16) Partai Hanura kursi. sementara yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sehingga mendapat bantuan keuangan adalah 10 partai politik. yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Kesepuluh partai politik tersebut antara lain : (1) Partai NASDEM dengan 1 kursi; (2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 1 kursi; (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 2 kursi; (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 11 kursi; (5) Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan 5 kursi; (6) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan 5 kursi; (7) Partai Demokrat (PD) dengan 6 kursi; (8) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 1 kursi; (9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2 kursi; (10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 1 kursi.

**2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**  
**2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Tabel 2.115.  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5587.88	5588.00	5799.82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	206.14	199.72	212.62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1339.36	1331.18	1351.83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2677.40	2641.20	2866.88
5. Perubahan Inventori	10.56	14.81	17.76
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-2725.71	-2643.02	-2766.47
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7095.65	7131.89	7482.44

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2021

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran selama periode tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, terutama pada tahun 2020 dimana diakibatkan oleh adanya pandemi covid 19. Selanjutnya pada tahun 2021, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran bertambah sebesar Rp.350 juta lebih menjadi 7,48 miliar lebih.

Tabel 2.116.  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHK Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.948,94	3.874,27	3.920,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	137,71	131,14	136,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	829,71	807,75	809,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.863,07	1.783,66	1.877,77
5. Perubahan Inventori	5,24	4,81	4,71
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.800,53	-1.675,34	-1.695,33
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.984,13	4.926,30	5.053,32

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022



Selain dinilai atas dasar harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau ADH berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019–2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Lampung Barat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tahun 2021 hampir seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020, kecuali pada Net Ekspor Barang dan Jasa masih menunjukkan angka minus.

Dari gambar di bawah, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah diabaikan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT(PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Gambar 2.11.

Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat (Juta Rupiah), 2019 – 2021



Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

Tabel 2.117.

Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat,  
2019–2021

PDRB Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB pengeluaran (Persen)		
	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	78,75	78,35	77,51
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,91	2,80	2,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,88	18,67	18,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,73	37,03	38,31
5. Perubahan Inventori	0,15	0,21	0,24
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-38,41	-37,06	-36,97
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

Tabel 2.118.

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021

PDRB Pengeluaran	Laju PDRB ADHK Pengeluaran (Persen)		
	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4.640	-1.890	0.600
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.970	-4.770	4.160
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.080	-2.650	0.210
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.300	-4.260	5.280
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.180	-1.160	2.580

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

#### 2.1.5. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi jalan kabupaten Lampung Barat dengan total panjang 724 km dalam dimana jalan dalam kondisi baik sampai tahun 2021 sebesar 66,10 persen. Sedangkan panjang jalan desa 382,46 km, jalan desa kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,65 persen pada tahun 2021. Dan untuk target jalan mantap pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen.

### 2.1.6. Fokus Iklim Berinvestasi

Berdasarkan data investasi di Lampung Barat, diketahui bahwa jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 sebanyak 282 investor dengan jumlah investasi sebesar Rp.112.921.542.189 dengan jumlah usaha sebanyak 282 perusahaan.

### 2.1.7. Fokus Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih dari Kementerian Dalam Negeri semester I, tahun 2021, penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tercatat sebanyak 307.294 jiwa (159.552 laki-laki dan 147.742 perempuan). Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu 42.159 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Semining 8.357 jiwa.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pencapaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah di tampilkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU disusun berdasarkan misi Kepala Daerah dengan menentukan Indikator Kinerja bagi tiap sasaran misi. Berikut disampaikan Capaian dari Kinerja Utama Daerah tahun 2018 s.d 2021 dan target dari akhir Periode Akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 - 2022 :

Tabel 2.119.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
<b>I</b>	<b>MISI I</b>											
<b>1</b>	Persentase jalan dengan kondisi mantap (%)	51,21%	55,50 %	<b>60,42 %</b>	62,00 %	<b>62,18 %</b>	68,00 %	<b>63,43 %</b>	74,00 %	<b>68,10 %</b>	80,00 %	-
<b>2</b>	Persentase jembatan dengan kondisi mantap (%)	72,22%	75,22 %	<b>76,67 %</b>	78,22 %	<b>78,33 %</b>	81,22 %	<b>81,33 %</b>	84,22 %	<b>81,34 %</b>	87,22 %	-
<b>3</b>	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	30,88%	32,35 %	<b>32,35 %</b>	33,82 %	<b>34,35 %</b>	35,29 %	<b>35,86 %</b>	36,76 %	<b>36,76 %</b>	38,24 %	-
<b>4</b>	Persentase desa yang	97,79%	97,79 %	<b>68,36 %</b>	97,79 %	<b>97,79 %</b>	97,79 %	<b>98,58 %</b>	97,79 %	<b>98,58 %</b>	97,79 %	-

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet (%)											
5	Persentase desa yang dialiri listrik (Persen)	82,35%	86,03 %	93,38 %	89,71 %	98,53 %	93,38 %	98,53 %	97,06 %	98,53 %	100%	-
6	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	42,00%	45,00 %	47,10 %	49,00 %	49,10 %	53,00 %	53,10 %	56,00 %	55,68	60,00 %	-
7	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	9,06%	15,28 %	5,26%	25,93 %	78,27 %	36,66 %	82,19 %	47,40 %	49,2%	58,13 %	-
8	Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	90,91%	92,30 %	91,37 %	93,27 %	92,86 %	94,25 %	94,70 %	95,22 %	98,58 %	96,20 %	-
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,16	60,35	65,58	61,28	68,82	62,98	71,94	63,57	65,99	64,12	-
10	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (%)	80,00%	100%	100%	100%	100%	100%	93,30 %	100%	100%	100%	-
11	Persentase desa tangguh bencana (Persen)	1,47%	4,41%	1,47%	8,82%	3,67%	13,23 %	7,35%	17,64 %	11,76 %	22,05 %	-
12	respon time tanggap bencana (Jam)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	-
	<b>MISI II</b>											
1	Usia harapan hidup (Tahun)	66,64	66,94	66,86	67,24	66,86	67,54	67,58	67,84	67,65	68,14	-
2	angka kematian ibu (Per 1000 kelahiran)	105/10000	149	88,67	139	51,8	130	72,1	121	145,6	110	-

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	10.000 Kelahiran Hidup)	n hidup										
3	angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	1,6/1000 KH	4,7	3,01	4,5	3,6	4,3	2,9	4,1	4,55	3,9	-
4	Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK)											
5	- SD (Persen)	111,83	111,84	113,41	111,87	98,68	111,89	107,90	111,91	108,86	111,93	-
6	- SMP (Persen)	99,31	99,33	82,63	99,53	101,42	99,73	87,40	99,93	85,84	99,95	-
	Angka Partisipasi Murni (APM)											
7	- SD (Persen)	100	100	100	100	85,55	100	99,39	100	99,41	100	-
8	- SMP (Persen)	91,8	91,82	77,54	91,87	76,39	91,89	79,36	91,94	78,99	91,99	-
9	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,28	7,3	7,33	7,35	7,60	7,37	8,06	7,42	8,07	7,44	-
10	Angka harapan lama sekolah (Tahun)	12,17	12,27	12,19	12,29	12,24	12,31	12,25	12,33	12,26	12,35	-
11	Angka melanjutkan sekolah (Persen)	90,1	90,35	89,26	90,6	89,26	90,75	91,24	90,83	100%	90,85	-
	Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN)											
12	- SD (Poin)	209,91	209,96	209,91	210,01	220,15	210,11	0	210,21	0	210,31	-
13	- SMP (Poin)	235,81	235,91	235,81	236,01	213,89	236,11	0	236,21	0	236,31	-
14	Persentase pengunjung yang	1,74%	1,99%	1,39%	2,24%	3,97%	2,49%	1,22%	2,74%	2,74%	2,99%	-

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	menjadi anggota perpustakaan											
15	pendapatan perkapita (Rp)	19.080.000	20.917.404	20.620.000	22.931.750	23.170.000	25.140.078	23.412.341	27.561.067	24.710.000	30.215.198	-
16	Jumlah Pemuda yang beprestasi (Orang)	20	25	25	30	30	35	6	40	160	45	-
17	Persentase Cabang Olahraga yang beprestasi (Persen)	50%	55%	50%	60%	60%	65%	17,65%	70%	33%	75%	-
18	laju pertumbuhan penduduk (Persen)	01.17%	01.16%	0,95%	01.14%	0,98%	01.12%	0,93%	01.02%	0,98%	0,96%	-
19	Angka Kelahiran Total (%)	2.55%	2.51%	2,37%	2.44%	2,39%	2.38%	2,39%	2.27%	2,39%	2.26%	-
20	Skor pola pangan harapan (Poin)	87,5	88,4	89,9	89,1	89,4	90	91,62	91,1	91,16	92,4	-
	<b>MISI III</b>											
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Juta Rupiah)	2.767.567	2.985.690	2.344.192	3.197.847	3.192.131	3.410.004	3.210.755	3.622.160	-	3.834.317	-
2	Produk Domestik	125.064	137.058	158.141	150.202	160.070	164.606	165.673	180.392	-	197.691	-

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan (Juta Rupiah)											
3	Rata rata lama tinggal (Hari)	1	1,5	1,5	2	2	2	3	2,5	2	3	-
4	Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	16.449	16.778	17.027	17.114	110.285	17.456	292.698	17.805	153.414	18.161	-
5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri (Juta Rupiah)	245.242	247.694	283.349	250.171	364.662	252.673	351.349	255.200	250.460	257.752	-
6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan (Juta Rupiah)	643.154	649.586	731.676	656.081	948.405	662.642	870.031	669.269	665.110	675.961	-
7	Nilai investasi (Rupiah)	3.167.204.246	3.325.564.458	25.947.491.049	3.491.842.681	142.671.854.207	3.666.434.815	113.483.975.551	3.849.756.556	58.351.234.885	4.042.244.384	-
8	Jumlah koperasi yang Sehat (Unit)	0	3	4	6	17	9	22	12	27	15	-
9	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	-13,65%	2,00%	4%	4,00%	9,94%	6,00%	67,72%	8,00%	14,08%	10,00%	-

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	<b>MISI IV</b>											
1	indeks reformasi birokrasi (Predikat)	-	-	-	C	CC	C	CC	C	CC	C	-
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	B	B	B	B	B	BB	B	BB	B	BB	-
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Predikat)	-	-	-	C	C	C	B	C	B	C	-
5	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	-
6	Persentase desa tertinggal (Persen)	29,00%	19,84 %	14,50 %	9,92%	10,68 %	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	-
	<b>MISI V</b>											
1	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Persentase Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-



No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani (Persen)											
4	Indeks pembangunan gender (Poin)	91.54.	91.60	<b>92,47</b>	91.64	<b>92,47</b>	91.70	<b>92,55</b>	91.74	-	91.80	-
5	indeks pemberdayaan gender (Poin)	49.16.	50.02.	<b>60,47</b>	51.02	<b>63,84</b>	52.02.	<b>68,21</b>	53.02.	-	54.02	-
6	Angka Kemiskinan (Persen)	14,32%	14,00 %	<b>13,54 %</b>	13,75 %	<b>12,92 %</b>	13,00 %	<b>12,52 %</b>	12,50 %	<b>12,82 %</b>	12,00 %	-
7	indeks gini (Poin)	0,36	0,34	<b>0,28</b>	0,32	<b>0,314</b>	0,3	<b>0,296</b>	0,28	<b>0,295</b>	0,26	-
8	tingkat pengangguran terbuka (Persen)	0,96%	0,90%	<b>2,72%</b>	0,85%	<b>1,66%</b>	0,80%	<b>2,13%</b>	0,75%	<b>2,83%</b>	0,71%	-

#### RANGKUMAN HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Hasil evaluasi yang dilakukan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Lampung Barat. Kebijakan refocussing kegiatan mengharuskan realokasi anggaran dilakukan oleh masing-masing satuan kerja pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pergeseran APBD di realokasi kepada kegiatan dan pengadaan barang jasa yang mendukung pencegahan dan penyelesaian pandemi Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini tentu berdampak pada penurunan kinerja pemerintah Lampung Barat karena banyak kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian di refocussing. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berikut ini adalah laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran: 1. 43 indikator sasaran memperoleh predikat sangat tinggi (capaian 91<100%); 2. 8 indikator sasaran berpredikat tinggi (capaian 76<90%); 3. 2 indikator sasaran berpredikat sangat rendah (capaian<50%). Capaian kinerja dari 31 sasaran strategis dan 55 indikator kinerja didominasi

oleh capaian kinerja berpredikat sangat tinggi, artinya pencapaian kinerja berada dalam rentang nilai 91 sampai dengan lebih dari 100. Selanjutnya indikator dengan predikat tinggi berjumlah 8 indikator, dan 2 indikator lainnya mencapai predikat sangat rendah. Kedua indikator ini adalah capaian indikator persentase desa tangguh bencana yang realisasi pembentukan desa tangguh bencana belum sesuai target. Kedua adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang jumlahnya di tahun 2021 melebihi target, yang artinya jumlah TPT lebih banyak dari jumlah minimum TPT yang menjadi target.

Sementara itu, ada 2 indikator yang tidak dapat dicapai karena pelaksanaannya telah dihentikan. Kedua indikator tersebut adalah nilai rata-rata ujian nasional jenjang SD dan SMP. Ujian nasional telah dihapuskan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Corona Virus Disease (Covid-19).

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

#### Strategi dan Arah Kebijakan

##### Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Kabupaten Lampung Barat. Secara konseptual strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan tujuan membutuhkan kesatuan tujuan untuk untuk mendapatkan kesatuan tindak.

Penentuan alternatif strategi dilakukan dengan analisis SWOT (Strenght, weakness, Opportunity, Threat) dengan bahan utama permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan. Permasalahan dan isu strategis tersebut diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal.

Strategi Pembangunan pencapaian untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yaitu :

Tujuan		Sasaran		Strategi
Tujuan 1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Sasaran 1.1	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Peningkatan Produktifitas sektor Pertanian meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan,
				Peningkatan Produktifitas sektor Perikanan
				Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan, dan Pengembangan usaha industri kreatif.
		Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata,
		Penumbuhan dan pemantapan kemandirian wisata desa,
		Penguatan fungsi pasar tradisional,
		Pengendalian indeks perubahan harga,
		Peningkatan UMKM yang kompetitif,
		Pengarusutamaan produk UMKM lokal, dan
		Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal dan Penguatan pemasaran wisata.
		Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
		Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD
		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan
	Sasaran 1.2 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan,
		Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi PMKS,

Tujuan		Sasaran		Strategi
				Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja,
				Peningkatan investasi untuk perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
				Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
				Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.
				Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan
				Bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi.
				Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya
				Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
				Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan
Tujuan 2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Sasaran 2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, dan Peningkatan minat dan budaya baca

Tujuan		Sasaran		Strategi
				masyarakat.
				Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan, dan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan
				Peningkatan jaminan pelayanan dan kepesertaan keluarga berencana
				Peningkatan kewirausahaan pemuda
				Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi / nasional
Tujuan 3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana	Sasaran 3.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap dan Percepatan Infrastruktur pemukiman yang layak
				Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta
				Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
				Meningkatkan akses sanitasi dan air minum
				Meningkatkan kapasitas saluran drainase
				Meningkatkan keselamatan berlalulintas.
				Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah

Tujuan		Sasaran		Strategi
				hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten.
				Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku
				Meningkatkan ketersediaan lahan
		Sasaran 3.2	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Pemantauan dan pengendalian kualitas air dan kualitas udara
				Pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
				Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).
				Meningkatkan pengurangan sampah
				Meningkatkan penanganan sampah
				Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
		Sasaran 3.3	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, dan
				Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel.
Tujuan 4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Sasaran 4.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal.
				Penyediaan layanan pada Sistem Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Berbasis Elektronik (SPBE).
	Sasaran 4.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
		Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.
		Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
		Meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
		Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penerapan Sistem Merit.
		Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa.
		Peningkatan Kualitas Inovasi Daerah dan kualitas Penelitian dan Pengembangan.
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan

Tujuan		Sasaran		Strategi
Tujuan 5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai	Sasaran 5.1	Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota
				Peningkatan pencegahan dan fasilitasi penanganan konflik.
				Peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama,
				Penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga.
				Peningkatan kesadaran politik masyarakat.
				Peningkatan upaya penegakan perda.
				Peningkatan Pengarusutamaan Gender
				Peningkatan Pemenuhan hak anak-anak dan perlindungan khusus.
		Sasaran 5.2	Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan
				Peningkatan promosi seni budaya

### Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan tahun 2023 di arahkan pada :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
3. Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
8. Meningkatkan mitigasi bencana



9. Meningkatkan indeks inovasi daerah
10. Meningkatkan jumlah aparat fungsional
11. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
12. Meningkatkan profesionalitas aparatur

### 2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan Daerah untuk tahun 2023 terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lampung Barat serta sesuai hasil evaluasi pembangunan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pendapatan perkapita tahun 2021 sebesar Rp.24.610.000
2. Pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan menjadi 2,58 pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi covid19.
3. Meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2021 menjadi 2,83%
4. Masih tingginya angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 12,82%
5. Rendahnya harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,26 tahun.
6. Rendahnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 8,07 tahun.
7. Usia Harapan Hidup tahun 2021 masih di angka 67,65 tahun
8. Masih rendahnya kondisi jalan mantap, pada tahun 2021 sebesar 66,10%.
9. Masih banyaknya rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebanyak 6.294 unit
10. Banyaknya jumlah kejadian bencana tahun 2021 sebanyak 77 bencana
11. Belum Maksimalnya indeks RB Lampung Barat Tahun 2020 sebesar 55,06 poin
12. Belum maksimalnya nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 67,15 poin.
13. Masih rendahnya indeks SPBE pada tahun 2021 sebesar 1,91 poin.
14. Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat, tahun 2021 IKM sebesar 77,25 poin

#### Isu Strategis

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD serta arah kebijakan RPD maka terdapat beberapa isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### Bidang Ekonomi

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian  
Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian

Sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar dan penyumbang PDRB kedua tertinggi setelah industri pengolahan. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Lampung Barat tetap perlu

mengarustamakan sektor pertanian untuk mendukung pembangunan sektor lainnya. Industri pertanian dapat mendorong terciptanya pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan investasi dan sebagai cara yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Strategi yang dapat dilakukan adalah perubahan orientasi pembangunan pertanian yang bernilai rendah (low value added) ke yang bernilai tinggi (high value added). Tantangan pembangunan nilai tambah sektor industri pertanian ke depan adalah bagaimana memproduksi hasil-hasil pertanian yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumber daya alam komoditas dunia seperti : kopi, lada, sayur mayur dan hortikultura, ikan. Beberapa produk tersebut harus diproses secara berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai. Penguatan rantai nilai produk unggulan dilakukan dengan aktivitas operasi, logistik, pemasaran dan penjualan, jasa, aktivitas pendukung, pengadaan, dan pengembangan teknologi.

Namun tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten belum meningkat terutama kesejahteraan petani. Terkadang petani masih terikat Kontrak Farming kepada pengumpul. Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengendalikan sistem distribusi tata niaga tersebut, mulai dari petani sampai dengan konsumen dan bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menjadikan komoditas andalan kabupaten menjadi referensi harga dunia.

## 2. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;

Kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya tiga penyebab, diantaranya yaitu Rendahnya Taraf Pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Rendahnya Derajat Kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Terbatasnya Lapangan Kerja. Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Secara khusus penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat akan berfokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem yang pelaksanaannya merujuk langsung pada wilayah-wilayah dengan kemiskinan eskترم yang tinggi.

## 3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;

Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya sektor UKM harus menjadi komitmen nasional demi masa depan bangsa. Peran sektor UKM di era reformasi cukup mempunyai posisi yang strategis. Selain sebagai sektor yang paling tahan dilanda krisis juga mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup besar diluar sektor formal. Keberadaan sektor ini yang tidak terikat pada rumitnya sistem birokrasi memungkinkan bagi siapa saja untuk berusaha disektor ini. Apalagi kalau ditunjang dengan berbagai keahlian dan ketrampilan khusus, maka sektor UKM akan sangat menjajikan keuntungan yang besar, lebih-lebih bila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang canggih.

Selanjutnya dari data yang ada, bahwa perkembangan sektor UKM dari tahun ke tahun menunjukkan tren adanya kenaikan baik dari jenis usaha yang ditekuni maupun kualitas usahanya. Dengan kondisi ini bila dikembangkan diseluruh lapisan masyarakat kita, maka tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bekerja, kecuali bagi mereka yang sejak awal memang dasarnya pemalas. Paradigma yang kurang bagus ini tampaknya harus dihapus dan tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern dengan prinsip time is money .

Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan memberikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaanya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya dan faktor-faktor produksi lainnya .

Dalam perencanaan penyerapan tenaga kerja, bahwa dengan melalui pertambahan modal dalam setiap aktifitas pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan penyediaan lapangan kerja secara total. Perubahan atau peningkatan investasi tentunya akan diikuti atau diimbangi dengan pertambahan tenaga kerja, dengan demikian setiap penambahan investasi tentu akan mengubah kuantitas tenaga kerja.

4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;

Mengembangkan kewirausahaan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan kewirausahaan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan. Mengembangkan kewirausahaan untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

### **Bidang Sumberdaya Manusia**

#### **1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;**

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satu ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan secara perspektif jarak dan keterjangkauan layanan. Di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2020, teridentifikasi masih ada beberapa layanan pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Seperti cakupan akses layanan PAUD dan pendidikan dasar belum mampu tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya : aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana dan non fisik seperti sosial, budaya dan kapasitas finansial. Untuk itu, perlu adanya perwujudan aksesibilitas dan cakupan akses layanan bidang pendidikan, agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;**

Upaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, membutuhkan ketersediaan sumber daya (petugas kesehatan yang profesional, sarana dan prasarana pendukung dan pembiayaan kesehatan) dan standar pelayanan.

Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi dan belum terdistribusi secara merata. Faktor pembiayaan seringkali menjadi penghambat masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas walaupun sudah ada asuransi kesehatan.

### **Bidang Infrastruktur**

#### **1. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;**

Alih fungsi lahan pertanian mempunyai pengaruh besar terhadap produksi bahan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah serius dan strategis yang harus dihadapi dalam kemantapan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat harus dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ini. Jika tidak dikendalikan akan berdampak pada produksi bahan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Barat akan terganggu.

Langkah yang tepat untuk mengantisipasi laju alih fungsi lahan ini adalah dengan meningkatkan luas tanam lahan pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan pertanian kaitannya dengan keberlanjutan kebutuhan pangan penduduk serta adanya penjaminan/ perlindungan lahan dari pemerintah.

## 2. Tapal Batas Kabupaten dan kecamatan

Tapal batas dengan Kabupaten tetangga perlu untuk diselesaikan agar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak terjadi kendala.

## 3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang di Provinsi Kepulauan Lampung Barat, yang mempunyai potensi berkembang karena posisi geografisnya yang sangat strategis. Untuk itu, perlu peningkatan dalam mendukung posisi geografis tersebut dengan pembangunan infrastruktur yang progresif agar dapat terintegrasi dengan baik semua sektor pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, perumahan dan kawasan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat diperlukan suatu sistem jaringan penghubung antar wilayah.

## 4. Ketersediaan air baku;

Pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan sarana penyediaan air minum yang ada dan ketersediaan airnya sangat terbatas. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku. Sedangkan sumber air baku terutamanya air permukaan mengalami pencemaran yang semakin meningkat akibat domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas.

Air baku di wilayah Kabupaten Lampung Barat sebenarnya tersedia dengan cukup, tetapi terancam keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun kerusakan alam yang menyebabkan terhambatnya konservasi air. disamping itu ada beberapa wilayah air baku sulit diperoleh karena kondisi alamnya sehingga masyarakat harus mengandalkan air hujan atau air permukaan yang tidak sehat.

#### 5. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;

Kondisi perumahan rakyat di Kabupaten Lampung Barat sudah tidak tertanggulangi lagi ketika angka kekurangan rumah terus bertambah setiap tahun. Diperparah urbanisasi yang cepat masih terus diiringi dengan bertambahnya permukiman kumuh. Program perumahan umumnya sudah ada tetapi kapasitasnya masih sangat terbatas sehingga masih menyisakan sebagian besar kelompok masyarakat yang tidak mampu menjangkau rumah sederhana atau bahkan pengeluaran rumah tangganya habis hanya untuk kebutuhan makan. Kondisi ini hanya membawa masyarakat hidup di lingkungan yang tidak sehat dan dipenuhi penyakit sosial, miskin, tidak produktif.

Penyediaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak bisa dilakukan hanya dengan cara konvensional seperti selama ini terjadi. Penanganan permukiman kumuh selain menyediakan sarana dan prasarana fisik juga harus mengupayakan adanya pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat. Hal itu selain untuk peningkatan kapasitas masyarakat, juga menyiapkan masyarakat terhadap perubahan kondisi sosial lingkungan. Sehingga, upaya penyediaan sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

#### 6. Lingkungan hidup;

Fungsi ekologis suatu kawasan sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Menurunnya fungsi ekologis di Kabupaten Lampung Barat ditandai dengan meningkatnya pencemaran tanah, air dan udara oleh sampah dan limbah kimia, menyusutnya tutupan hutan, berkurangnya daerah resapan air dan tangkapan air, alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya bencana lingkungan hidup seperti banjir dan kekeringan.

Di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2020, masih sulit untuk mengakomodir 20% RTH Publik dari 30% RTH dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Barat. Meskipun Kabupaten Lampung Barat telah mendapat penghargaan Adipura, namun tuntutan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup terutama dalam penanganan sampah harus menjadi perhatian penting bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

#### 7. Pengendalian pemanfaatan ruang;

Pengendalian penataan ruang merupakan salah satu bagian penting dalam tata ruang, akan tetapi seringkali di dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu permasalahan terhadap pengendalian penataan ruang adalah belum seluruh wilayah/daerah memiliki peraturan

daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah terlebih hanya beberapa wilayah/daerah yang memiliki peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Sementara pengendalian penataan ruang dapat dilakukan apabila sudah ditetapkan RTRW di dalam peraturan daerah. Belum tersedianya RTRW yang update maupun belum disusunnya RDTR seringkali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha/industry yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung. Kondisi inilah yang menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan daya dukung lingkungan, atau terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanah yang berujung pada degradasi/rusaknya lingkungan.

#### 8. Kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana

Prioritas nasional penanggulangan bencana juga masih memerlukan kerja keras untuk 136 kabupaten/kota yang menjadi sasaran penurunan indeks rawan bencana Indonesia (IRBI) dari berbagai pihak baik Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Proses penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Penanggulangan Bencana) masih memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya: belum terwujudnya regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana, belum optimalnya dukungan anggaran bencana, lambatnya mekanisme proses dana penanggulangan bencana lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Masyarakat masih kurang paham dengan bencana. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya mitigasi bencana. Sistem peringatan dini hingga budaya mitigasi belum menjangkau seluruh masyarakat, bahkan di lingkungan aparatur pemerintahan. Masih kurangnya mitigasi bencana dapat dilihat dari kurangnya upaya Pemerintah mengurangi risiko bencana, baik pembangunan fisik maupun penyadaran masyarakat melalui sosialisasi terus menerus dan berkelanjutan tentang bencana menyebabkan informasi kebencanaan belum tertanam. Kurangnya upaya mitigasi bencana ini tidak dapat dibiarkan, mengingat Indonesia berpotensi mengalami berbagai jenis bencana alam yang membawa korban jiwa.

#### **Bidang Pemerintahan**

1. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus lebih serius dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Setiap aparatur di

Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat harus merubah pola pikir dan budaya pikir yang lebih seperti mentalitas, pelanggaran hukum, pemborosan anggaran, pelayanan publik yang kurang cepat, tepat dan profesional, penyalahgunaan wewenang, e-Government belum berjalan lancar, menuju tata pemerintahan yang baik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, bebas KKN, transparan dan akuntabel.

2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa belum mendukung dalam upaya mewujudkan otonomi desa. Hal itu disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa itu dari aspek sumber daya manusia, anggaran, kebijakan dan struktur birokrasi.

Pola penguatan kelembagaan Pemeritahan Desa dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pada aparatur, peningkatan peran aparatur dan peningkatan pembangunan yang partisipatif. Selain itu, aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penguatan kelembagaan Pemeritahan Desa itu dapat dilihat dalam bagan berikut ini;

### **Bidang Trantibum**

1. Ketertiban umum, tata kehidupan sosial, keagamaan dan pemberdayaan budaya lokal

Untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang memwadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkuat kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Implementasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

Masih ada potensi terjadinya konflik kemasyarakatan seperti konflik antar umat beragama yang kadang masih terjadi dimasyarakat serta . Di Kabupaten Lampung Barat dalam penciptaan kerukunan dalam sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama dipandang sangat harmonis



tetapi ada hal-hal tertentu yang masih ada beberapa perbedaan dari cara pandang, sehingga isu kerukunan umat beragama ini masih butuh perhatian.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, namun demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pembangunan seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya dan agama.

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.111  
Hubungan Arah Kebijakan RPD, Permasalahan Pembangunan RPD dengan Isu Strategis RKPD

Arah Kebijakan RPD	Permasalahan Pembangunan RPD	Isu Strategis RKPD
Peningkatan Ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal	Masih rendahnya pendapatan perkapita tahun 2021 sebesar Rp.24.610.000	Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian
	Pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan menjadi 2,58 pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi covid19.	Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
	Meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2021 menjadi 2,83%	Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;

Arah Kebijakan RPD	Permasalahan Pembangunan RPD	Isu Strategis RKPD
	Masih tingginya angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 12,82%	Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;
Peningkatan jaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat dari segi akses dan mutu	Rendahnya harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,26 tahun.	Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;
	Rendahnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 8,07 tahun.	Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
	Usia Harapan Hidup tahun 2021 masih di angka 67,65 tahun	
Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya	Masih rendahnya kondisi jalan mantap, pada tahun 2021 sebesar 66,10%.	Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;
	Masih banyaknya rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebanyak 6.294 unit	Tapal Batas Kabupaten dan kecamatan
	Banyaknya jumlah kejadian bencana tahun 2021 sebanyak 77 bencana	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
		Ketersediaan air baku
		Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman
		Lingkungan hidup
		Pengendalian pemanfaatan ruang
		Kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana

Arah Kebijakan RPD	Permasalahan Pembangunan RPD	Isu Strategis RKPD
Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata kelola keuangan daerah	Belum Maksimalnya indeks RB Lampung Barat Tahun 2020 sebesar 55,06 poin	Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik
	Belum maksimalnya nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 67,15 poin.	Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat
	Masih rendahnya indeks SPBE pada tahun 2021 sebesar 1,91 poin.	
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berbudaya	Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat, tahun 2021 IKM sebesar 77,25 poin	Ketertiban umum, tata kehidupan sosial, keagamaan dan pemberdayaan budaya lokal

## 2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan jika dijabarkan sesuai dengan urusan pemerintahan, maka permasalahan dapat diuraikan berikut ini.

1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan
  - Rendahnya harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,26 tahun.
  - Rendahnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 8,07 tahun
2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan
  - Usia Harapan Hidup tahun 2021 masih di angka 67,65 tahun.
  - Masih tingginya angka kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 145,6/100.000 KH
  - Masih tingginya angka kematian bayi pada tahun 2021 sebesar 4,55/1.000 KH
  - Belum tercapainya target stunting, pada tahun 2021 sebesar 22,7%.
3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
  - Masih rendahnya kondisi jalan mantap, pada tahun 2021 sebesar 66,10%.
  - Masih tingginya idle capacity yaitu 151,9 liter/detik.

4. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
  - Masih banyaknya rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebanyak 6.294 unit.
  - Masih Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2021 seluas 15,498 Ha.
5. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  - Banyaknya jumlah kejadian bencana tahun 2021 sebanyak 77 bencana.
  - Banyaknya pelanggaran kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan pada tahun 2021 sebanyak 2.231 kasus.
6. Urusan pemerintahan bidang sosial
  - Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat 39.360 jiwa.
  - Tingginya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, sehingga mulai tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat menjadi lokus kemiskinan ekstrem dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 16.770 jiwa (5,38%).
  - Masih tingginya angka wanita rawan sosial ekonomi di Lampung Barat pada tahun 2021 sebanyak 915 orang.
  - Masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Pada tahun 2021 total penyandang disabilitas sebanyak 665 orang.
7. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
  - Meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2021 menjadi 2,83%.
8. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - adanya peningkatan jumlah kekerasan dari tahun 2020 , dari 4 kasus menjadi 8 kasus di tahun 2021
  - kurangnya pengetahuan kewirausahaan pada wanita yang berdampak pada penghasilan pada wanita
9. Urusan pemerintahan bidang pangan
  - Menurunnya Angka Kecukupan Energi pada tahun 2021 menjadi 91,16 poin.
10. Urusan pemerintahan bidang pertanahan
  - Masih terdapat 2 kasus sengketa tanah yang belum diselesaikan.
11. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
  - Terdapat 145 industri kecil dan menengah yang belum memiliki pengolahan limbah.

12. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - Masih belum maksimalnya Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2021 sebesar 80%.
  - Pelayanan online masih menggunakan media sosial Whats App, sehingga hanya beberapa operator saja yang dapat melakukan pelayanan online, mengakibatkan pelayanan online kurang maksimal.
  
13. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
  - Masih rendahnya Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon yang Sesuai Pedoman pada tahun 2021 sebesar 65%.
  - Masih rendahnya Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon yang Sesuai Pedoman pada tahun 2021 sebesar 65%.
  - Masih rendahnya Persentase Pekon yang Menyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban yang Sesuai Pedoman Dan Tepat Waktu pada tahun 2021 sebesar 75%.
  
14. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - tingginya kelahiran pada wanita kelompok umur 15-19 tahun ( 30 per 1000 kelahiran )
  - Masih rendahnya angka usia kwain pertama pada tahun 2021 rata-rata pada usia 19 tahun.
  - Masih rendahnya Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2021 sebesar 39%.
  
15. Urusan pemerintahan bidang perhubungan
  - Tidak tersedianya Angkutan Penumpang Pedesaan
  - Pelayanan uji kendaraan bermotor di lampung Barat masih tipe C
  - Masih kurangnya personil yang melakukan Rekayasa pengaturan lalulintas disaat kegiatan pemda
  - Banyaknya kegiatan tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
  - Kurang /Minimnya Rambu - rambu penunjuk arah pada jalan
  - Kurang tersedianya tempat tunggu penumpang
  - Tingginya mobilitas anak sekolah pada waktu masuk dan pulang sekolah
  - Tidak tersedianya Angkutan Penumpang Pedesaan
  - Pelayanan uji kendaraan bermotor di lampung Barat masih tipe C
  - Masih kurangnya personil yang melakukan Rekayasa pengaturan lalulintas disaat kegiatan pemda
  - Banyaknya kegiatan tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
  
16. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
  - Terbatasnya Insfrastruktur TIK dan sarana Prasarana Publikasi

- Belum adanya Regulasi Pengembangan E Government dan Master Plan Informasi Teknologi (IT)
  - Terbatasnya Insfrastruktur TIK dan sarana Prasarana Publikasi
  - Belum Optialnya Desiminasi Informasi dan terbatasnya SDM di Bidang Aplikasi Informatika
  - Terbatasnya Insfrastruktur TIK dan sarana Prasarana Publikasi
  - Belum Optialnya Desiminasi Informasi
  - Terbatasnya Insfrastruktur TIK dan sarana Prasarana Publikasi
17. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
    - Masih sedikitnya jumlah koperasi sehat pada tahun 2021 sebanyak 27 koperasi atau 32,09%.
    - Masih rendahnya Persentase UMKM yang mengakses permodalan pada tahun 2021 sebesar 45,37%.
  18. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
    - Menurunnya Jumlah Investor PMDN/PMA pada tahun 2021 menjadi 282 investor.
    - Menurunnya Nilai Investasi PMDN/PMA pada tahun 2021 sebesar Rp.112 milyar lebih.
  19. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
    - Masih rendahnya Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi pada tahun 2021 sebanyak 6 cabor.
  20. Urusan pemerintahan bidang statistik
    - Sumber Data masih bergantung pada data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS
  21. Urusan pemerintahan bidang persandian
    - Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah belum terlaksana secara maksimal sesuai amanah Undang -undang
  22. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
    - Menurunnya jumlah pengunjung ke situs budaya pada tahun 2021 sebesar 12.500 orang.
  23. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan
    - Masih sedikitnya judul buku di perpustakaan umum, pada tahun 2021 sebanyak 30.841 judul.
    - Masih rendahnya Jumlah pemustaka ke perpustakaan umum pada tahun 2021 sebanyak 7.154 orang.
    - Masih rendahnya jumlah anggota perpustakaan umum pada tahun 2021 sebanyak 6.868 orang.

24. Urusan pemerintahan bidang kearsipan
  - Belum tersedianya perangkat elektronik berupa aplikasi digitalisasi arsip
25. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
  - Menurunnya volume dan nilai ekspor pada tahun 2021 volume export 5.366,24 ton.
  - Masih rendahnya keuntungan pembudidaya air tawar pada tahun 2021 sebesar Rp. 117.544.650.000
26. Urusan pemerintahan bidang pariwisata
  - Menurunnya jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 sebanyak 55 448 wisatawan.
  - Belum maksimalnya SDM pariwisata (Pokdarwis). Tahun 2022 jumlah destinasi yang ada Pokdarwis sebanyak 37 Destinasi Pariwisata.
27. Urusan pemerintahan bidang pertanian
  - Pertumbuhan ekonomi terjadi kontraksi 1,14% pada tahun 2020.
  - Masih rendahnya pendapatan perkapita tahun 2020 sebesar Rp.23.410.000
  - Menurunnya jumlah produksi padi pada tahun 2021 sebesar -18,13%.
  - Menurunnya Jumlah produksi sayuran per tahun pada tahun 2021 sebesar -23,20%.
28. Urusan pemerintahan bidang perdagangan
  - Menurunnya kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat
  - Kondisi tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok maupun harga komoditas hasil pertanian
29. Urusan pemerintahan bidang perindustrian
  - Menurunnya kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Perekonomian daerah merupakan penggambaran kondisi dan analisis perekonomian suatu daerah secara umum dalam kurun tertentu. Perekonomian di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 dan karakteristik serta prospek perekonomian pada tahun 2022-2023 merupakan rancangan kerangka ekonomi daerah. Kerangka ekonomi daerah juga membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Lampung Barat serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator kondisi ekonomi makro suatu daerah. Indikator yang diakui secara nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang secara nasional data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bermakna apabila peningkatan PDRB per kapita dapat terdistribusi merata menjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduknya.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 kemungkinan semakin membaik jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang masih terdampak akibat adanya pandemi covid 19. Adapun perkembangan indikator makro ekonomi Lampung Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2021 sebesar RP.5.053,32 milyar rupiah.  
  
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 sebesar RP.7.482,44 milyar rupiah.
- b. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Lampung Barat sebesar 2,58%, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebesar 4,6% - 5,3%.
- c. Inflasi  
Tingkat Inflasi tahun 2019 Lampung Barat mencapai 3,53%, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebesar 2 - 3 %



d. Penduduk Miskin

Penduduk Miskin tahun 2021 Lampung Barat mencapai 12,82%, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebesar 12,50%

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT tahun 2021 Lampung Barat mencapai 2,83%, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebesar 1,60%

f. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita tahun 2021 Lampung Barat mencapai Rp. 23,71 juta lebih, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebesar Rp.24,19 juta.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM tahun 2021 Lampung Barat mencapai 67,90 poin, dan proyeksi pencapaian sesuai dengan target pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebesar 69 poin.

### **Kebijakan Ekonomi Nasional**

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (scarring effect).

Luka memar tecermin juga dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan,

likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (leverage) meningkat sejak pandemi baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah dan kerentanan likuiditas.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprakirakan kenaikan Fed Funds Rate lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4 persen dari 4,9 persen pada tahun 2022, yang utamanya didorong oleh risiko seperti perkembangan varian Omicron, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 4,1 dan 4,5 persen.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih.

Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami terkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan learning loss dan earnings penalty. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekali pun terdapat base effect). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diperkirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021, (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer, (c) harga komoditas yang diperkirakan tidak setinggi di tahun 2021, dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-demand beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.

## Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat

Identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang.

Tantangan Pembangunan ekonomi daerah tahun 2023 adalah :

1. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah.
2. Fluktuasi harga jual produk unggulan daerah.
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi daerah.
4. Masih rendahnya tingkat produksi dan mutu terhadap sektor unggulan daerah.
5. Masih rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan perekonomian.

Dalam rangka pemulihan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebagai akibat dampak dari pandemi *covid19*, arah kebijakan sector ekonomi diutamakan pada upaya pemulihan perekonomian, langkah kongkrit yang diambil diantaranya dengan mengalokasikan rencana anggaran tahun 2023 sebesar 25% yang diarahkan untuk mendukung arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penguatan infrastruktur dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat akibat dari pandemi covid-19 guna menjawab tantangan Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi daerah.
2. Stabilisasi harga jual produk unggulan daerah guna menjawab tantangan Fluktuasi harga jual produk unggulan daerah.
3. Mendorong peningkatan produksi dan mutu terhadap sektor unggulan daerah guna menjawab tantangan Masih rendahnya tingkat produksi dan mutu terhadap sektor unggulan daerah.
4. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan perekonomian guna menjawab tantangan Masih rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan perekonomian.
5. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menjawab tantangan Masih rendahnya pendapatan daerah.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kondisi Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

#### Kondisi Pendapatan Daerah Tahun 2021

##### 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

###### 1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang sudah ada. Meskipun belum memuaskan dari segi kuantitas, namun Pemda dari tahun ke tahun berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor yang potensial, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Tim Intensifikasi PAD dan PBB, Tim Terpadu Perizinan, dan Tim Penagih PAD.

Tim yang sudah terbentuk tersebut telah melaksanakan tugas secara rutin. Salah satunya adalah Tim Penagih PAD yang melakukan penagihan PAD secara langsung kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

Selain melaksanakan penagihan langsung, Pemda juga berupaya untuk menaikkan pendapatan dengan perubahan struktur tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini telah dilakukan dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Beberapa Peraturan Perundangan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain :

1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Bupati Lampung Barat No. 37 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
4. Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang PBB P2 (11 Perbup).
5. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
7. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada APBD TA. 2021 menganggarkan penerimaan dari PAD sebesar Rp.67.978.328.317,00. Pos Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.919.267.433.436,00.

## 2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi PAD, yaitu suatu cara peningkatan PAD dengan menggali dan mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial dan belum dimanfaatkan namun tidak bertentangan dengan hukum. Sumber-sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari pihak ketiga, serta penanaman modal (andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan menguntungkan.

Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bersifat closed list, artinya Pemerintah Daerah hanya boleh memungut jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, upaya ekstensifikasi PAD hanya mungkin dilaksanakan dengan upaya penanaman modal (investasi), pembentukan dan/atau peningkatan kapasitas produksi usaha daerah (dapat dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah), atau pengelolaan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.

## 2. Realisasi Pendapatan

Tabel 3.1  
Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2017 - 2021

No	Uraian	Realisasi tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.069.132.043.140</b>	<b>1.124.189.349.605</b>	<b>1.122.307.632.189</b>	<b>1.011.011.754.760</b>	<b>1.007.111.687.817</b>	-1,33%
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>46.789.226.369</b>	<b>50.471.541.309</b>	<b>65.267.416.665</b>	<b>61.219.465.454</b>	<b>71.466.961.447</b>	11,93%
1.1.1	Pajak Daerah	10.144.981.620	11.617.377.709	13.376.645.930	11.794.800.883	13.052.711.728	7,12%
1.1.2	Retribusi Daerah	1.887.059.285	2.014.962.790	2.227.953.290	3.018.063.766	3.516.611.279	17,33%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	3.213.618.614	3.409.190.603	4.431.364.496	4.809.979.700	5.923.153.837	16,94%
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.543.566.851	33.430.010.207	45.231.452.948	41.596.621.105	48.974.484.603	12,75%
<b>1.2</b>	<b>DANA TRANSFER</b>	<b>932.965.864.531</b>	<b>854.830.511.647</b>	<b>791.712.917.260</b>	<b>707.243.876.702</b>	<b>899.997.134.370</b>	0,21%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	29.580.799.339	25.691.277.900	16.206.254.867	18.130.197.914	21.899.946.244	-4,35%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	519.160.196.000	521.743.958.000	543.777.950.000	497.587.974.000	491.712.483.000	-1,24%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	224.328.822.017	307.395.275.747	231.728.712.393	191.525.704.788	173.188.817.153	-3,63%
1.2.4	Dana Alokasi Desa/Pekon	103.628.820.000				126.378.047.000	21,95%

No	Uraian	Realisasi tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.2.5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	56.267.227.175				55.206.420.973	-1,89%
1.2.6	Dana Insentif Daerah (DID)					31.611.420.000	100,00%
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>89.381.952.240</b>	<b>218.887.296.649</b>	<b>265.327.298.264</b>	<b>242.548.412.604</b>	<b>35.647.592.000</b>	18,05%
1.3.1	Hibah	89.381.952.240	48.916.520.000	67.463.454.000	54.391.888.000	35.647.592.000	-15,30%
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		57.487.255.649	70.674.988.287	62.140.456.604		2,72%
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		112.483.521.000	127.188.855.977	126.016.068.000		3,04%

Sumber : LKPD Pemda

### 3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah, sudah barang tentu ada permasalahan yang menghadang. Khusus untuk pajak daerah dan retribusi daerah, permasalahan yang ada dapat dipetakan sebagai berikut :

#### 1). Faktor Eksternal

Tingkat pemahaman wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah terhadap pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak daerah terutang maupun retribusi terutang.

Oleh karena itu, Pemda harus memberikan pemahaman akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui sosialisasi yang efektif dan efisien. Media sosialisasi dapat berupa penyuluhan pajak/retribusi daerah, baik formal maupun non formal dalam berbagai waktu dan kesempatan, penyebaran pamflet, pemajangan slogan dan propaganda, penyampaian informasi dengan siaran radio, media cetak, dan media lain yang memungkinkan.

Di lain pihak, tindakan hukum atas pelanggaran Perda juga belum memberikan efek jera terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pada masa yang akan datang diharapkan agar instansi terkait terus menerus menegakkan peraturan yang ada kepada seluruh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

#### 2). Faktor Internal

Aparatur Pemda yang minim dalam kuantitas dan kualitas merupakan kendala internal dalam rangka peningkatan pendapatan. Ditambah pula dengan isu strategis tentang buruknya perilaku aparatur

pengelola pajak, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Untuk itu, solusinya adalah dengan menambah jumlah pegawai dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, termasuk menyediakan PPNS, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pendapatan.

Di lain sisi, Pemda juga perlu meningkatkan kredibilitas aparatur, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak/wajib retribusi daerah.

Secara umum, kebijakan pengelolaan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penguatan perpajakan daerah (*local taxing empowerment*).
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah.
- d. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan jujur dan bertanggungjawab.
- f. Terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD pengelola PAD dan pembinaan baik kepada aparatur kecamatan maupun masyarakat, untuk mewujudkan ketaatan membayar kewajiban pajak dan retribusi daerah dalam rangka mencapai target PAD.

#### **Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022, maka Arah kebijakan pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung guna mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk membiayai belanja daerah.
3. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku
4. Penggunaan digitalisasi pembayaran Pajak-pajak dalam mempermudah pelayanan masyarakat.



**Tabel 3.3.**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2020 s.d tahun 2024**

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi /Target pada Tahun 2023	Proyeksi /Target pada Tahun 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.011.011.754.760	1.007.051.382.975	1.035.041.046.662	1.449.538.568.379	1.402.474.800.573
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.219.465.454	71.432.343.905	73.660.779.843	78.341.372.062	83.221.789.631
4.1.1	Pajak Daerah	11.794.800.883	13.052.929.433	13.038.206.178	13.823.090.796	14.857.399.541
4.1.2	Retribusi Daerah	3.018.063.766	3.449.143.716	2.289.310.896	2.498.177.200	2.623.079.780
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.809.979.700	5.923.153.837	6.623.153.836	7.020.543.066	7.441.775.650
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	41.596.621.105	49.007.116.919	51.710.108.933	54.999.561.000	58.299.534.660
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	895.400.401.306	899.997.134.370	961.380.266.819	1.371.197.196.317	1.319.253.010.942
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.259.944.702	844.790.713.397	885.434.520.817	1.290.694.705.617	1.233.920.370.800
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.140.456.604	55.206.420.973	75.945.746.002	80.502.490.700	85.332.640.142
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	54.391.888.000	35.621.904.700	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.391.888.000	35.621.904.700	-	-	-

## Kondisi Belanja Daerah Tahun 2021

### 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menganggarkan kegiatan pembangunan melalui alokasi Belanja Daerah sebesar Rp.1.097.181.392.100,06. Alokasi belanja tersebut digunakan untuk biaya pembangunan daerah yang meliputi Urusan Wajib Pelayanan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Alokasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan APBD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3

Alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1	Pendapatan Daerah	1.023.153.914.683,00
2	Belanja Daerah	1.097.181.392.100,06
	Surplus/(Defisit)	(74.027.477.417,06)
3	Pembiayaan Daerah : - Penerimaan Rp. 57.625.748.528,17 - Pengeluaran Rp. 3.598.271.111,11 Pembiayaan Netto	77.625.748.528,17

Sumber : Data Sementara LRA Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Unaudited), per Januari 2022

## 2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi Belanja Daerah TA. 2021 setelah Perubahan APBD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.4

Target dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target 2021	Realisasi 2021	%
5	BELANJA DAERAH	1.097.181.392.100	1.010.908.270.007	92,14%
5.1	BELANJA OPERASI	765.547.909.862	707.284.185.431	92,39%
5.1.1	Belanja Pegawai	430.408.095.914	399.747.370.644	92,88%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	307.589.822.121	281.314.280.638	91,46%
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	
5.1.5	Belanja Hibah	23.442.201.827	22.251.495.549	94,92%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.107.790.000	3.971.038.600	96,67%
5.2	BELANJA MODAL	145.484.284.767	132.283.188.276	90,93%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.004.410.571	2.220.535.100	55,45%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.004.410.571	2.220.535.100	55,45%
5.4	BELANJA TRANSFER	182.144.786.900	169.120.361.200	92,85%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.246.199.900	1.830.761.000	81,50%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	179.898.587.000	167.289.600.200	92,99%

Sumber : Data Sementara LRA Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Unaudited), per Januari 2022

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan APBD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5  
Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Lampung Barat  
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)
1	Pendapatan Daerah	1.007.051.382.975
2	Belanja Daerah	1.010.908.270.007
	Surplus/(Defisit)	(3.856.887.032)
3	Pembiayaan Daerah: - Penerimaan Rp. 77.278.865.778 - Pengeluaran Rp..145.433.068 Pembiayaan Netto	75.133.432.710
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>71.276.545.678</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Per Januari 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, terdapat defisit Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar Rp. 3.856.887.032, serta surplus Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 75.133.432.710, sehingga pada akhir tahun anggaran Kabupaten Lampung Barat memiliki SILPA sebesar Rp. 71.276.545.678 sebagai sumber penerimaan Pembiayaan Daerah untuk membiayai Belanja Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1) Regulasi.

Meski adanya peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.

2) Koordinasi dengan stake holder.

Perlunya koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui saat ini koordinasi antara stake holder masih belum baik, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas, misalnya adalah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang terhambat karena penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah yang belum tepat waktu dan tepat mutu.

Solusi yang dapat dilaksanakan sehubungan dengan permasalahan di atas adalah :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah maupun stake holder dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat menghasilkan output kegiatan yang tepat waktu dan akurat, dalam rangka mencapai target kinerja.
- 2) Melakukan rekonsiliasi secara rutin dalam pelaksanaan tugas, dalam rangka melakukan validasi data dan informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, sehingga tercapai target kinerja.

#### Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan memperhatikan realisasi Belanja daerah pada tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022, maka Arah kebijakan Belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian belanja guna mendukung pencapaian target sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.
2. Fokus belanja untuk melaksanakan prioritas pembangunan;
3. Penajaman belanja barang (belanja operasional, non operasional, perjalanan dinas, dan belanja yang diserahkan ke masyarakat/Pemda);
4. Memaksimalkan belanja urusan wajib pelayanan dasar.

Tabel 3.6.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2020 s.d tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi /Target pada Tahun 2023	Proyeksi /Target pada Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH	984.638.003.140	1.010.908.270.007	1.112.536.131.046	1.459.373.469.843	1.398.277.800.573
5.1	BELANJA OPERASI	636.827.545.344	707.284.185.431	753.345.910.113	988.204.341.552	946.833.844.644
5.1.1	Belanja Pegawai	424.325.254.536	399.747.370.644	439.557.838.884	576.591.654.534	552.453.040.425
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.758.705.808	281.314.280.638	286.861.840.345	376.292.102.007	360.538.891.271
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	3.964.805.812	5.200.848.991	4.983.119.016
5.1.5	Belanja Hibah	13.493.585.000	22.251.495.549	21.052.070.072	27.615.132.391	26.459.043.816
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000	3.971.038.600	1.909.355.000	2.504.603.629	2.399.750.116
5.2	BELANJA MODAL	140.869.506.620	132.283.188.276	181.964.428.161	238.692.525.575	228.699.826.721
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.108.088.093	2.220.535.100	4.839.003.972	6.347.581.728	6.081.844.573
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	22.108.088.093	2.220.535.100	4.839.003.972	6.347.581.728	6.081.844.573
5.4	BELANJA TRANSFER	184.832.863.083	169.120.361.200	172.386.788.800	226.129.020.987	216.662.284.635
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.317.346.400	1.830.761.000	1.532.751.800	2.010.592.960	1.926.420.865

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi /Target pada Tahun 2023	Proyeksi /Target pada Tahun 2024
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	183.515.516.683	167.289.600.200	170.854.037.000	224.118.428.027	214.735.863.770

### Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan;
3. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
4. Pembayaran Cicilan Pinjaman Daerah.

Tabel 3.7.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2020 s.d tahun 2024

No	PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi /Target pada Tahun 2023	Proyeksi /Target pada Tahun 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH	31.251.996.908	75.133.432.710	77.495.084.384	9.834.901.464	(4.197.000.000)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.251.996.908	77.278.865.778	90.462.469.000	35.148.901.464	20.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.251.996.908	57.625.748.528	31.850.000.000	35.148.901.464	20.000.000.000
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		19.653.117.250	58.612.469.000	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000	2.145.433.068	12.967.384.616	25.314.000.000	24.197.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		145.433.068	10.967.384.616	23.314.000.000	22.197.000.000

**BAB IV**  
**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran pada RPD Kabupaten Lampung Barat merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Lampung Barat yang ingin dicapai (desired future) dalam masa 4 (empat) tahun. RPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 disusun tanpa adanya visi dan misi dikarenakan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 tidak dipimpin oleh Kepala Daerah definitif hasil pemilu, tetapi dijabat oleh penjabat Kepala Daerah.

Penentuan Tujuan dan Sasaran RPD tidak terlepas dari Visi Misi RPJMN, Visi Misi RPJMD Provinsi Lampung dan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025. Tujuan dan Sasaran pada RPD adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	
		Meningkatnya Pendapatan Perkapita
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing
3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai	
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah

### Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Kabupaten Lampung Barat. Secara konseptual strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan tujuan membutuhkan kesatuan tujuan untuk untuk mendapatkan kesatuan tindak.

Penentuan alternatif strategi dilakukan dengan analisis SWOT (*Strenght, weakness, Opportunity, Threat*) dengan bahan utama permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Bab IV. Permasalahan dan isu strategis tersebut diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal. Strategi sesuai dengan RPD adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Sasaran 1.1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Peningkatan Produktifitas sektor Pertanian meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan,
		Peningkatan Produktifitas sektor Perikanan
		Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
		Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan, dan Pengembangan usaha

Tujuan	Sasaran	Strategi
		industri kreatif.
		Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata,
		Penumbuhan dan pematapan kemandirian wisata desa,
		Penguatan fungsi pasar tradisional,
		Pengendalian indeks perubahan harga,
		Peningkatan UMKM yang kompetitif,
		Pengarusutamaan produk UMKM lokal, dan
		Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal dan Penguatan pemasaran wisata.
		Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
		Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD
		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan
	Sasaran 1.2 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan,
		Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi PMKS,
		Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja,
		Peningkatan investasi untuk perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
		Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.
		Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan
		Bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi.
		Mendorong terciptanya lapanganpekerjaan baru berbasis padat karya
		Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
		Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan
Tujuan 2	Sasaran 2.1	
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, dan Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
		Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan, dan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan
		Peningkatan jaminan pelayanan dan kepesertaan keluarga berencana
		Peningkatan kewirausahaan pemuda
		Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi / nasional

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana	Sasaran 3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah
		Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap dan Percepatan Infrastruktur pemukiman yang layak
		Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta
		Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
		Meningkatkan akses sanitasi dan air minum
		Meningkatkan kapasitas saluran drainase
		Meningkatkan keselamatan berlalulintas.
		Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten.
		Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku
		Meningkatkan ketersediaan lahan
	Sasaran 3.2	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
		Pemantauan dan pengendalian kualitas air dan kualitas udara
		Pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
		Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).
		Meningkatkan pengurangan sampah
		Meningkatkan penanganan sampah
		Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Sasaran 3.3	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana
		Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, dan
		Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel.
Tujuan 4	Sasaran 4.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal.
		Penyediaan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
	Sasaran 4.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
		Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.
		Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
		Meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
		Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penerapan Sistem Merit.
		Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa.
		Peningkatan Kualitas Inovasi Daerah dan kualitas Penelitian dan Pengembangan.
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
Tujuan 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai	Sasaran 5.1 Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota
		Peningkatan pencegahan dan fasilitasi penanganan konflik.
		Peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama,
		Penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga.
		Peningkatan kesadaran politik masyarakat.
		Peningkatan upaya penegakan perda.
		Peningkatan Pengarusutamaan Gender
		Peningkatan Pemenuhan hak anak-anak dan perlindungan khusus.
	Sasaran 5.2 Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan
		Peningkatan promosi seni budaya

#### ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan jaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat dari segi akses dan mutu

Arah Kebijakan 3 : Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya

Arah Kebijakan 4 : Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata kelola keuangan daerah.

Arah Kebijakan 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berbudaya

#### **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat setelah turun langsung kelapangan melalui RESES bahwasanya di masyarakat masih banyak ditemukan permasalahan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat dan ketentraman. DPRD berpendapat sesuai dengan permasalahan yang terjadi, pemerintah daerah diperlukan Konsultasi ke Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada serta melakukan penjaringan aspirasi dari masyarakat secara turun langsung ke wilayah-wilayah bersama DPRD serta melelaui Pemerintahan Kecamatan dan Juga Pekon yang sangat berpengaruh yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Dari usulan yang disampaikan dalam aplikasi SIPD untuk tahun 2023 dan berdasarkan desk pembahasan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah dilaksanakan pada hari kamis tanggal 29 Maret 2022 dapat djabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023

No	OPD	Jumlah Usulan	Jumlah Diterima
1	Dinas PU PR	221	218
2	Dinas Pendidikan	35	34
3	Disbunnak	7	7
4	Dinas TPH	7	6
5	Dinkes	3	3
6	Setda	1	1
7	Dinas Sosial	1	1
8	Dinas Perikanan	1	1
	Total	276	271

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.2  
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	PD Penanggung-Jawab
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju pertumbuhan ekonomi	5%	Bappeda
		Meningkatnya Pendapatan Perkapita	pendapatan perkapita	26.786.367	Bappeda
			Gini Rasio	0,269	Bappeda
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,37%	Dinas Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%	Sekretariat Daerah
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		indeks pembangunan manusia (IPM)	68,95	Bappeda
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95	Bappeda
3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	82,17	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Resiko Bencana	0,015	BPBD
		Meningkatnya	Indeks Layanan	82,17	Dinas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	PD Penanggung-Jawab
		Kualitas Infrastruktur Daerah	Infrastruktur Daerah		Pekerjaan Umum dan PR
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	0,015	BPBD
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	57,05	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	57,05	Sekretariat Daerah
			Nilai SAKIP	70,25	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,51	Sekretariat Daerah
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	0,75	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	0,750	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

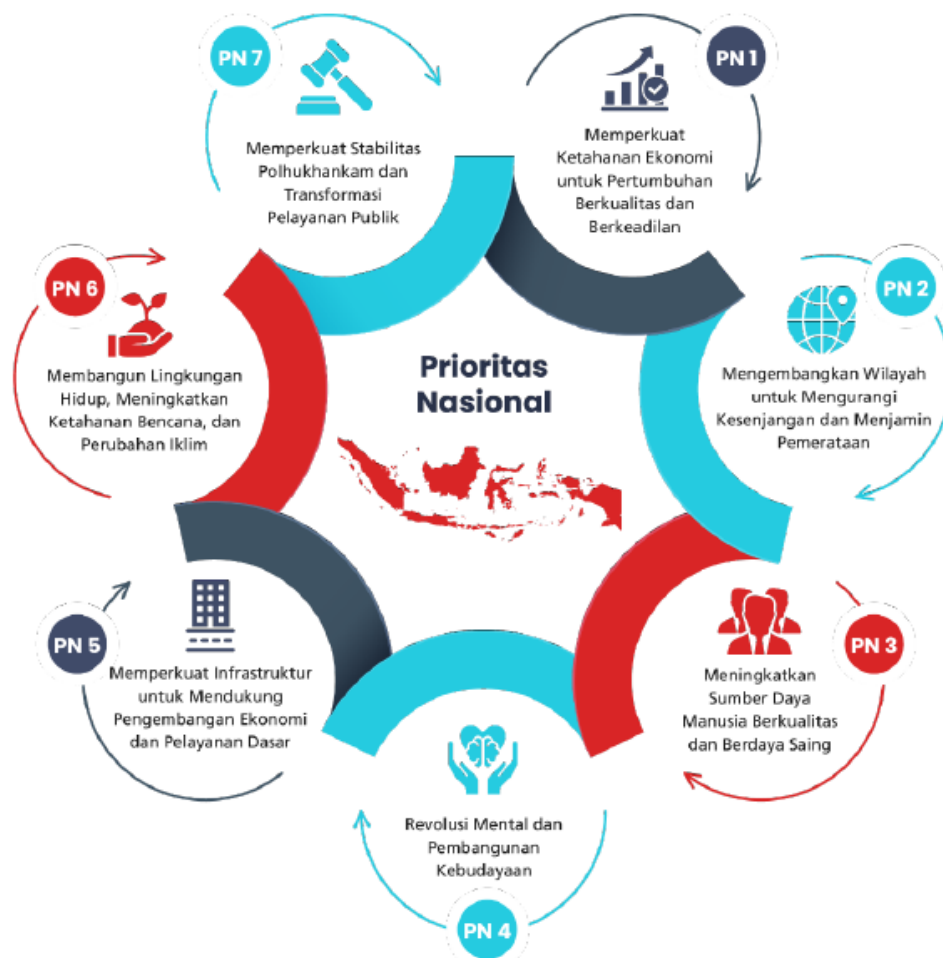
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	PD Penanggung-Jawab
			Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	2,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

### Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.



Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut.

**PN1**



**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

**Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:**

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

**PN2**



**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

**Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:**

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.



**Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:**

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.



**Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:**

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.



**Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:**

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;

- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).



#### Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

##### Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.



#### Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

##### Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
- (5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Major Project dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti pada Gambar 4.1 Penjelasan tiap PN akan mencakup pendahuluan yang memuat tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP).





## Sasaran Ekonomi Makro RKP Pusat Tahun 2023

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
<b>Perkiraan Besaran-Besaran Pokok</b>				
Pertumbuhan PDB (% <i>yo-y</i> )	3,7	5,0–5,5	5,7–6,0	5,3–5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yo-y</i> ): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3 ± 1
<b>Neraca Pembayaran</b>				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	144,9	151,6–152,4 <sup>c)</sup>	146,8	158,9–160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5–7,4 <sup>c)</sup>	6,8	7,5–7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)–(0,5) <sup>c)</sup>	(1,9)	(0,4)–(0,6)
<b>Keuangan Negara</b>				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4 <sup>a)</sup>	10,5–11,7	10,2–10,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,6)	(2,6) <sup>a)</sup>	0,2–0,0	(0,7)–(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(4,9) <sup>a)</sup>	(1,6)–(1,7)	(2,9)–(2,8)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8 <sup>a)</sup>	28,9–29,6	41,7–42,4

<b>PMTB/Investasi</b>				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4-6,0	7,2-7,8	6,1-6,7
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	1294,1	1.250-1.400
<b>Target Pembangunan</b>				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5-6,3	4,0-4,6	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5-9,0	7,0-7,5	7,5-8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376-0,378	0,374-0,377	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67-72,69 <sup>c)</sup>	74,77 <sup>c)</sup>	73,31-73,49
<b>Penurunan Emisi GRK</b>	<b>23,55</b>	<b>26,87</b>	<b>26,80</b>	<b>27,02</b>
<b>Indikator Pembangunan</b>				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103-105	104	103-105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69 <sup>b)</sup>	104-106	106	106-107

Selanjutnya tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah “Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Dengan prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan.
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia.
3. Pembangunan Infrastruktur.
4. Reformasi Birokrasi.
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya.
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, antara lain:

<b>INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN</b>	<b>TARGET 2023</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5-4,5
Inflasi (%)	3±1
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	43-44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0-4,3
Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-11,9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,3-70,6
Indeks Gini	0,302-0,319
Nilai Tukar Petani (NTP)	104-105
Pertumbuhan PAD (%)	4,74
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	77
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7.066



Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan sesuai dengan arah kebijakan pada RPD untuk tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan Ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal
2. Peningkatan jaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat dari segi akses dan mutu
3. Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya
4. Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata kelola keuangan daerah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berbudaya

Maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah  
**“Penguatan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik”**

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian  
Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian
2. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan pada tahun 2023 yaitu :

1. Masih rendahnya pendapatan perkapita tahun 2021 sebesar Rp.24.610.000
2. Meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2021 menjadi 2,83%
3. Masih tingginya angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 12,82%

Berdasarkan Arah Kebijakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan Ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan local.

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 1 yaitu **Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial.**

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2023 yaitu :

1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;
2. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan pada tahun 2023 yaitu :

1. Rendahnya harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,26 tahun.
2. Rendahnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 8,07 tahun.
3. Usia Harapan Hidup tahun 2021 masih di angka 67,65 tahun

Berdasarkan Arah Kebijakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan jaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat dari segi akses dan mutu

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 2 yaitu **Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia.**

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2023 yaitu :

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;
2. Tapal Batas Kabupaten dan kecamatan
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;
4. Ketersediaan air baku;
5. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;
6. Lingkungan hidup;
7. Pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan pada tahun 2023 yaitu :

1. Masih rendahnya kondisi jalan mantap, pada tahun 2021 sebesar 66,10%.
2. Masih banyaknya rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebanyak 6.294 unit
3. Banyaknya jumlah kejadian bencana tahun 2021 sebanyak 77 bencana

Berdasarkan Arah Kebijakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya.

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 3 yaitu **Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana.**

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2023 yaitu :

1. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
2. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan pada tahun 2023 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan menjadi 2,58 pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi covid19.

Berdasarkan Arah Kebijakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan Ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan local.

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 4 yaitu **Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata.**

Berdasarkan isu strategis pada tahun 2023 yaitu :

1. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Ketertiban umum, tata kehidupan sosial, keagamaan dan pemberdayaan budaya lokal

Berdasarkan Permasalahan Pembangunan pada tahun 2023 yaitu :

1. Belum Maksimalnya indeks RB Lampung Barat Tahun 2020 sebesar 55,06 poin
2. Belum maksimalnya nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 67,15 poin.
3. Masih rendahnya indeks SPBE pada tahun 2021 sebesar 1,91 poin.
4. Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat, tahun 2021 IKM sebesar 77,25 poin

Berdasarkan Arah Kebijakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata kelola keuangan daerah
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berbudaya

Maka Prioritas Pembangunan Daerah Ke 5 yaitu **Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas.**

Adapun Target Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yaitu :

Tabel 4.3

Indikator Sasaran pada Masing-Masing Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target
1	Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	5%
		Gini Rasio	0,269
2	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia	indeks pembangunan manusia (IPM)	68,95
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%
		Angka Kemiskinan	12,37%

No	Prioritas Pembangunan RKP	Indikator Sasaran	Target
3	Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	82,17
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99
		Indeks Resiko Bencana	0,015
4	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	5%
5	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Nilai Reformasi Birokrasi	57,05
		Nilai SAKIP	70,25
		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	0,75

Tabel 4.4  
Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dengan Indikator Kinerja Program Prioritas

No	Prioritas Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	5%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Aktif	33,51 %	Dinas Sosial
		Gini Rasio	0,269	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	IKM	B Predikat	Dinas Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,23 %	Dinas Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	19,55 %	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro yang disusun	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	6 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar mendapat pekerjaan	5,00 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan hubungan industrial	5,00 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Energi dan Protein	2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	83,1 Point	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	33 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	2 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	10 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTP	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	7 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	7 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,04 %	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5,00 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	4,00 %	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3,00 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100 %	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT	17,60 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	8 KT	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Madya ke Utama	2 KT	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	200 KT	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani terbina	20,00 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia	indeks pembangunan manusia (IPM)	68,95	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,38 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	102,29 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kemiskinan	12,37%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	102,63 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	2 mata pelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah sastra Lisan yang terlestarikan	2 sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ALOS RSUD AU	4 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BOR RSUDAU	40 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian 5 pilar STBM	30 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian IDL	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	78 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	78 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPA Puskesmas	77 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPA RSUDAU	58 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITE	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat memiliki JKN	70 %	Dinas Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasyankes	95 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madya	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Balita Wasting	7,3 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes memenuhi SDM sesuai Standart	60,00 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM RSUDAU yang memenuhi standart	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman	100 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	75,00 %	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga berPHBS	35,00 %	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada APBD	3,00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	2,00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% keluarga berkualitas	20 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% data gender dan anak yang terupdate	60 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak-hak anak	madya madya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	60 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan	21 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% Pekon yang menjadi kampung KB	59 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif ( PA) MKJP	25 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need	17 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan Keluarga	52,52 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,17 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase jmlh Atlit berprestasi	3,14 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Prioritas Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
3	Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	82,17	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	0,915 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	0,75 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Indeks Resiko Bencana	0,02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	1,68 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluraan Drainase kondisi baik	25 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21,05 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	25 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	1,45 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	25 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	0,05 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh	24,26 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase kejadian bencana ditangani	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus yang Tertangani	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,54 point	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.04 point	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	45.38 point	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	1 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	3 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	11 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	95 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	5 %	Dinas Perhubungan
4	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	5%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	9 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi	3 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha pemula	0,75 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	20 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3,00 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	3,99 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	4,40 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	2 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	"Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat "	4,00 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	39 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	25,00 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekraf yang dibina	25 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25 %	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
5	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Nilai Reformasi Birokrasi	57,05	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Nilai SAKIP	70,25	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	89,65 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	0,75	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	40 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi Syarat penataan desa yang di tata	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Pekon untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	60 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60 Poin	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	20,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	36,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	12 WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	50 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	60 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	19 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang disusun	875 Dokumen	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	5 Kebijakan	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	3 Kebijakan	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	3 Kebijakan	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	90 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu dan Lengkap	100 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 %	Sekretariat DPRD
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100 %	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100,00 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PAD	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PBB	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	60 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	49 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	22 Laporan	Badan Penelitian dan Pengembangan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Inspektorat Daerah
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Inspektorat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumber Jaya
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	25,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kecamatan Balik Bukit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kecamatan Batu Brak
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Ketulis	100,00 %	Kecamatan Batu Ketulis
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kecamatan Belalau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kecamatan Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kecamatan Gedung Surian

No	Prioritas Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Kebun Tebu	100,00 %	Kecamatan Kebun Tebu
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kecamatan Lumbok Seminung
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	Kecamatan Sekincau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kecamatan Sukau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	1 pekon mandiri	Kecamatan Sumber Jaya
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Suoh	7 pekon mandiri	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Balik Bukit
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Brak	12 pekon mandiri	Kecamatan Batu Brak
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Ketulis	1 pekon mandiri	Kecamatan Batu Ketulis
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Belalau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian	1 pekon mandiri	Kecamatan Gedung Surian
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Kebun Tebu	1 pekon mandiri	Kecamatan Kebun Tebu
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Lumbok Seminung
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Pagar dewa

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kecamatan Sekincau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sukau	10 Pekon	Kecamatan Sukau
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kecamatan Way Tenong
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Air Hitam
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumber Jaya
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Suoh	0 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Balik Bukit
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Brak	25,00 %	Kecamatan Batu Brak
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Ketulis	25,00 %	Kecamatan Batu Ketulis
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Belalau
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kecamatan Gedung Surian
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Kebun Tebu	25,00 %	Kecamatan Kebun Tebu
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Lumbok Semining
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Pagar dewa

No	Prioritas Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sekincau	100,00 %	Kecamatan Sekincau
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau	25,00 %	Kecamatan Sukau
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Way Tenong
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumber Jaya
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Suoh
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Balik Bukit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	Kecamatan Batu Brak
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Batu Ketulis
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Belalau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Bandar Negeri Suoh
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	Kecamatan Gedung Surian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Kebun Tebu	100,00 %	Kecamatan Kebun Tebu
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Lumbok Seminung

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	Kecamatan Sekincau
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	Kecamatan Sukau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Air Hitam
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	Kecamatan Sumber Jaya
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Suoh	100,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Balik Bukit
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Brak	100,00 %	Kecamatan Batu Brak
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Ketulis	100,00 %	Kecamatan Batu Ketulis
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Belalau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Suoh
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surian	100,00 %	Kecamatan Gedung Surian
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Kebun Tebu	100,00 %	Kecamatan Kebun Tebu
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Lumbok Semining

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Pagar Dewa	100,00 %	Kecamatan Pagar dewa
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sekincau	100,00 %	Kecamatan Sekincau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau	100,00 %	Kecamatan Sukau
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Way Tenong
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	80,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	69,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	55,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	71,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi	1 Kegiatan	Sekretariat Daerah



No	Prioritas Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	7 Kegiatan	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Kegiatan	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	75,85 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,25 %	Badan Penelitian dan Pengembangan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,75 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	82,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,25 %	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,15 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	67.02 Poin	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,70 %	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,18 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	77,92 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,96 %	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	80,00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,28 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	79,87 %	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,78 %	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	81,00 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80,00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PU PR	83,05 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,75 %	Dinas Sosial
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	77,96 %	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	75,00 %	Kecamatan Air Hitam
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	75,00 %	Kecamatan Sumber Jaya
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	75,00 %	Kecamatan Suoh
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	75,00 %	Kecamatan Batu Brak
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	75,00 %	Kecamatan Batu Ketulis
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	75,00 %	Kecamatan Gedung Surian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	75,00 %	Kecamatan Kebun Tebu

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan	Target	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Perangkat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	75,00 %	Kecamatan Lumbok Seminung
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Pagar Dewa	75,00 %	Kecamatan Pagar dewa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	75,00 %	Kecamatan Sekincau
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	75,00 %	Kecamatan Sukau
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	75,00 %	Kecamatan Way Tenong
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,85 %	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	78,74 %	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80 %	Sekretariat DPRD

Tabel 4.5  
Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2023  
dengan sasaran PN RKP 2023

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target	sasaran PN RKP	
1	Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	5%	Rasio Gini (nilai)	0,375–0,378
		Gini Rasio	0,269	Pertumbuhan PDB (% , yoy)	5,3–5,9
				Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	3 ± 1
2	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia	indeks pembangunan manusia (IPM)	68,95	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3–6,0
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5–8,5
		Angka Kemiskinan	12,37%	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31–73,49
3	Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	82,17	Penurunan Emisi GRK	27,02
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99		
		Indeks Resiko Bencana	0,015		

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Indikator Sasaran	Target	sasaran PN RKP	
4	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	5%	Nilai Tukar Petani (NTP)	103-105
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106-107
5	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Nilai Reformasi Birokrasi	57,05	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
		Nilai SAKIP	70,25		
		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	0,75		

Tabel 4.6

Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan PN RKP

No	Prioritas Pembangunan RKPD	PN RKP
1	Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia	PN 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

No	Prioritas Pembangunan RKPD	PN RKP
3	Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.  PN 5. Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.  PN 6. Membangun lingkungan hidup, meingkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
4	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata	PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
5	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.  PN 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tabel 4.7  
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023

URAIAN	NASIONAL	KABUPATEN
<b>TEMA</b>	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Penguatan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan bekeadilan.	Prioritas 1 Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial  Prioritas 4 Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang

URAIAN	NASIONAL	KABUPATEN
		inovatif dan Sektor Pariwisata
	PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	Prioritas 3 Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana
	PN 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.	Prioritas 2 Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia
	PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.	Prioritas 5 Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas
	PN 5. Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	Prioritas 3 Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana
	PN 6. Membangun lingkungan hidup, meingkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Prioritas 3 Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana
	PN 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Prioritas 5 Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas



Tabel 4.8  
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Provinsi

URAIAN	PROVINSI	KABUPATEN
TEMA	Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Penguatan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik
PRIORITAS PEMBANGUNAN	Prioritas 1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan.	Prioritas 1 Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial
		Prioritas 4 Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata
	Prioritas 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia.	Prioritas 2 Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia
	Prioritas 3. Pembangunan Infrastruktur.	Prioritas 3 Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana
	Prioritas 4. Reformasi Birokrasi.	Prioritas 5 Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas
	Prioritas 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya.	Prioritas 5 Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas
	Prioritas 6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	Prioritas 3 Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana

Tabel 4.9  
Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Provinsi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Prioritas 1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Aktif	33,51 %	415.255.900	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	IKM	B Predikat	3.737.094.500	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,23 %	-	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	19,55 %	-	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24 %	1.966.150.800	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100 %	-	Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100 %	637.000.000	Dinas Sosial
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	75.645.000	Dinas Sosial
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro yang disusun	1 Dokumen	120.000.000	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	6 %	476.743.200	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar mendapat pekerjaan	5,00 %	121.457.500	Sekretariat Daerah
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan hubungan industrial	5,00 %	60.250.000	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Energi dan Protein	2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	762.224.800	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	83,1 Point	1.284.922.400	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	170.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PANGAN				
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %	227.185.000	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	33 %	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	2 %	45.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20 %	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	10 %	1.550.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	584.625.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00 %	326.122.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTP	100 %	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1 %	557.090.000	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5 %	847.000.000	Dinas Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	7 %	289.999.750	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	7 %	560.000.000	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,04 %	864.376.500	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5,00 %	2.195.086.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	4,00 %	1.107.330.600	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3,00 %	5.607.668.050	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100 %	1.677.500.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100 %	134.171.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT	17,60 %	43.214.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	8 KT	1.521.137.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Madya ke Utama	2 KT	-	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	200 KT	-	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani terbina	20,00 %	2.989.677.400	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	9 %	80.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi	3 %	572.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha pemula	0,75 %	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	20 %	595.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3,00 %	550.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	3,99 %	238.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	4,40 %	360.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	2 %	1.842.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	"Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat "	4,00 %	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	39 %	1.232.263.400	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	25,00 %	1.102.800.200	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekraf yang dibina	25 %	120.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25 %	478.750.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	Prioritas 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,38 %	136.747.185.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	102,29 %	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	102,63 %	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	2 mata pelajaran	409.021.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah sastra Lisan yang terlestarikan	2 sastra	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama	100 %	174.096.299.129	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ALOS RSUD AU	4 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BOR RSUDAU	40 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian 5 pilar STBM	30 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian IDL	100 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	78 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	78 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPA Puskesmas	77 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPA RSUDAU	58 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE	100 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat memiliki JKN	70 %	-	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasyankes	95 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	100 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madya	100 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Balita Wasting	7,3 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart	60,00 %	14.453.607.000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	100 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK RSUDAU yang memenuhi standart	100 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman	100 %	348.000.000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	75,00 %	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga berPHBS	35,00 %	2.866.345.000	Dinas Kesehatan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada APBD	3,00 %	333.031.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan teakhir	2,00 %	508.906.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% keluarga berkualitas	20 %	454.945.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% data gender dan anak yang terupdate	60 %	60.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak-hak anak	madya madya	565.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	60 %	621.657.300	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan	21 %	927.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% Pekon yang menjadi kampung KB	59 %	4.922.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif ( PA) MKJP	25 %	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need	17 %	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan Keluarga	52,52 %	2.238.690.380	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,17 %	1.122.573.300	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase jmlh Atlit berprestasi	3,14 %	2.137.939.500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	0	817.004.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	0	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0	0	139.599.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0	0	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Prioritas 3. Pembangunan Infrastruktur.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	0,915 %	52.431.533.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	0,75 %	3.100.000.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	1,68 %	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	25 %	4.021.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21,05 %	19.271.999.860	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	25 %	33.640.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	1,45 %	64.633.834.952	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100 %	149.997.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	100 %	569.698.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	25 %	558.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	0,05 %	4.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus yang Tertangani	100 %	114.850.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	100 %	693.755.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten	100 %	48.970.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100 %	871.729.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	3 %	716.179.979	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	11 %	-	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	95 %	-	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	5 %	13.113.000	Dinas Perhubungan
4	Prioritas 4. Reformasi Birokrasi.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	89,65 %	1.138.812.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97 %	233.861.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	40 %	213.877.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00 %	49.933.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi Syarat penataan desa yang di tata	100 %	330.628.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Pekon untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29 %	90.819.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100 %	2.846.613.850	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	60 %	1.484.554.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60 Poin	4.144.907.255	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	20,00 %	1.430.658.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	36,00 %	143.959.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100,00 %	438.880.950	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang disusun	875 Dokumen	17.674.505.300	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	5 Kebijakan	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan	100 %	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	3 Kebijakan	2.854.074.900	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	3 Kebijakan	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	90 %	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu dan Lengkap	100 %	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 %	25.979.408.800	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100 %	-	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	2.358.291.570	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	2.409.846.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 %	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien	100 %	189.968.220.012	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100 %	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100,00 %	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100 %	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100 %	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100 %	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	2.382.763.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PAD	100 %	2.625.216.900	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PBB	100 %	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	60 %	2.159.151.982	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	49 %	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	22 Laporan	1.125.995.000	Badan Penelitian dan Pengembangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0	0	-	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0	0	-	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	84.061.500	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	25,00 %	19.230.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	43.300.000	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	60.000.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Ketulis	100,00 %	20.000.000	Kecamatan Batu Ketulis
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	411.038.800	Kecamatan Belalau
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	17.500.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	24.608.300	Kecamatan Gedung Surian



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Kebun Tebu	100,00 %	19.671.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	54.000.000	Kecamatan Lumbok Seminung
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	86.040.000	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	34.500.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	1 pekon mandiri	443.635.200	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Suoh	7 pekon mandiri	27.110.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	821.240.560	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Brak	12 pekon mandiri	60.000.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Ketulis	1 pekon mandiri	30.000.000	Kecamatan Batu Ketulis
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	-	Kecamatan Belalau
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	15.000.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian	1 pekon mandiri	44.192.100	Kecamatan Gedung Surian

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Kebun Tebu	1 pekon mandiri	40.998.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	15.000.000	Kecamatan Lumbok Semining
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	6.475.000	Kecamatan Pagar dewa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	591.194.390	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sukau	10 Pekon	40.250.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	627.166.200	Kecamatan Way Tenong
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	54.755.000	Kecamatan Air Hitam
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	77.186.740	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Suoh	0 %	25.000.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	25.000.000	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Brak	25,00 %	30.000.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Ketulis	25,00 %	25.000.000	Kecamatan Batu Ketulis
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	-	Kecamatan Belau

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	30.075.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surian	100,00 %	31.924.200	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Kebun Tebu	25,00 %	39.649.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	24.000.000	Kecamatan Lumbok Semining
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	89.600.000	Kecamatan Pagar dewa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sekincau	100,00 %	60.237.000	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau	25,00 %	40.250.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	72.220.000	Kecamatan Way Tenong
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	37.351.200	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	18.190.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	20.000.000	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	15.000.000	Kecamatan Batu Brak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	-	Kecamatan Batu Ketulis
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	-	Kecamatan Belau
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	10.000.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	7.785.100	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Kebun Tebu	100,00 %	29.302.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	10.000.000	Kecamatan Lumbok Semining
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	60.237.000	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	34.500.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	62.690.000	Kecamatan Air Hitam
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	94.257.640	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Suoh	100,00 %	56.260.000	Kecamatan Suoh

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	55.000.000	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Brak	100,00 %	110.000.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Ketulis	100,00 %	55.000.000	Kecamatan Batu Ketulis
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	-	Kecamatan Belau
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	28.175.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surian	100,00 %	54.443.800	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Kebun Tebu	100,00 %	26.044.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	68.000.000	Kecamatan Lumbok Semining
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Pagar Dewa	100,00 %	58.003.000	Kecamatan Pagar dewa
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sekincau	100,00 %	101.382.900	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau	100,00 %	69.000.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	37.360.000	Kecamatan Way Tenong
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	80,00 %	546.601.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	69,00 %	1.764.707.272	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	55,00 %	545.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	71,00 %	1.468.739.620	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	1.437.487.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi	1 Kegiatan	97.796.312.328	#REF!
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	7 Kegiatan	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Kegiatan	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	75,85 %	2.338.716.237	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,25 %	2.423.347.300	Badan Penelitian dan Pengembangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	3.366.408.254	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,75 %	2.560.847.900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	82,00 %	2.952.579.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,25 %	27.232.002.360	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,15 %	3.667.964.010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	67,02 Poin	5.447.974.722	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,70 %	107.725.541.603	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00 %	2.935.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,18 %	3.133.751.970	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	77,92 %	3.883.199.900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,96 %	9.608.795.900	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	80,00 %	3.561.535.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,28 %	205.429.787.960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	79,87 %	3.500.706.792	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,78 %	3.415.862.500	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	81,00 %	4.471.812.612	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80,00 %	3.985.976.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PU PR	83,05 %	8.152.353.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,75 %	3.639.129.900	Dinas Sosial
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	77,96 %	9.022.984.700	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMTSP	78,80 %	3.033.996.300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	75,00 %	605.394.900	Kecamatan Air Hitam
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	75,00 %	856.770.500	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	75,00 %	543.500.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	75,00 %	674.100.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	75,00 %	554.253.000	Kecamatan Batu Ketulis
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	75,00 %	559.874.400	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	75,00 %	608.092.500	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	75,00 %	659.500.000	Kecamatan Lumbok Seminung
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Pagar Dewa	75,00 %	680.421.000	Kecamatan Pagar dewa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	75,00 %	1.015.041.100	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	75,00 %	777.313.850	Kecamatan Sukau

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	75,00 %	1.123.009.100	Kecamatan Way Tenong
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,85 %	9.010.128.200	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	78,74 %	-	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80 %	25.134.882.277	Sekretariat DPRD
5	Prioritas 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100,00 %	2.792.451.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	12 WBTB	2.975.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	50 Orang	1.575.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	60 Orang	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	19 Cagar Budaya	1.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Prioritas 6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh	24.26 %	3.464.545.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase kejadian bencana ditangani	100 %	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	2.564.747.200	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	157.626.000	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,54 point	1.031.063.760	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.04 point	-	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	45.38 point	9.102.199.512	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20 %	106.233.200	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0	0	109.228.675	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	1 %	102.909.610	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	95.000.075	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	149.825.005	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	8.897.520.200	Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 4.10**  
**Program Prioritas Pembangunan**  
**Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Potensial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Aktif	33,51 %	415.255.900	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	IKM	B Predikat	3.737.094.500	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,23 %		Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	19,55 %		Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24 %	1.966.150.800	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100 %		Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100 %	637.000.000	Dinas Sosial
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	75.645.000	Dinas Sosial
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro yang	1 Dokumen	120.000.000	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			disusun			
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	6 %	476.743.200	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar mendapat pekerjaan	5,00 %	121.457.500	Sekretariat Daerah
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan hubungan industrial	5,00 %	60.250.000	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Energi dan Protein	2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	762.224.800	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	83,1 Point	1.284.922.400	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	170.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %	227.185.000	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	33 %	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	2 %	45.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20 %	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	10 %	1.550.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00 %	584.625.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00 %	326.122.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTP	100 %	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1 %	557.090.000	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5 %	847.000.000	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	7 %	289.999.750	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	7 %	560.000.000	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,04 %	864.376.500	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5,00 %	2.195.086.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	4,00 %	1.107.330.600	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3,00 %	5.607.668.050	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100 %	1.677.500.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100 %	134.171.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT	17,60 %	43.214.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	8 KT	1.521.137.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Madya ke Utama	2 KT		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	200 KT		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani terbina	20,00 %	2.989.677.400	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,38 %	136.747.185.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	102,29 %		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	102,63 %		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	2 mata pelajaran	409.021.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah sastra Llisan yang terlestarikan	2 sastra	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD AU Utama	100 %	174.096.299.129	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ALOS RSUD AU	4 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BOR RSUDAU	40 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian 5 pilar STBM	30 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian IDL	100 %		Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan RKP	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	78 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	78 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPA Puskesmas	77 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPA RSUD	58 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRU	100 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat memiliki JKN	70 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasyankes	95 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	100 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi madya	100 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Balita Wasting	7,3 %		Dinas Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart	60,00 %	14.453.607.000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	100 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM RSUDAU yang memenuhi standart	100 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemeriksaan Laik Hygiene Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman	100 %	348.000.000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	75,00 %		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga berPHBS	35,00 %	2.866.345.000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada APBD	3,00 %	333.031.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	2,00 %	508.906.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% keluarga berkualitas	20 %	454.945.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% data gender dan anak yang terupdate	60 %	60.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak-hak anak	madya madya	565.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	60 %	621.657.300	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan	21 %	927.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% Pekon yang menjadi kampung KB	59 %	4.922.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif ( PA) MKJP	25 %		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need	17 %		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan Keluarga	52,52 %	2.238.690.380	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,17 %	1.122.573.300	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase jmlh Atlit berprestasi	3,14 %	2.137.939.500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			817.004.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			139.599.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	0,915 %	52.431.533.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	0,75 %	3.100.000.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	1,68 %	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluraan Drainase kondisi baik	25 %	4.021.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21,05 %	19.271.999.860	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	25 %	33.640.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	1,45 %	64.633.834.952	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100 %	149.997.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	100 %	569.698.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	25 %	558.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	0,05 %	4.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh	24.26 %	3.464.545.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase kejadian bencana ditangani	100 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	2.564.747.200	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus yang Tertangani	100 %	114.850.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	100 %	693.755.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten	100 %	48.970.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100 %	871.729.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %	157.626.000	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,54 point	1.031.063.760	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.04 point		Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	45.38 point	9.102.199.512	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20 %	106.233.200	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			109.228.675	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	1 %	102.909.610	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	95.000.075	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	149.825.005	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	8.897.520.200	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	3 %	716.179.979	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	11 %		Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	95 %		Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	5 %	13.113.000	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
4	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	9 %	80.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi	3 %	572.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha pemula	0,75 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	20 %	595.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3,00 %	550.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTPP tertera sah	3,99 %	238.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	4,40 %	360.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	2 %	1.842.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	"Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat "	4,00 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	39 %	1.232.263.400	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	25,00 %	1.102.800.200	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekraf yang dibina	25 %	120.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25 %	478.750.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100,00 %	2.792.451.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	89,65 %	1.138.812.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97 %	233.861.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	40 %	213.877.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00 %	49.933.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi Syarat penataan desa yang di tata	100 %	330.628.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Pekon untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29 %	90.819.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100 %	2.846.613.850	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	60 %	1.484.554.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60 Poin	4.144.907.255	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	20,00 %	1.430.658.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	36,00 %	143.959.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100,00 %	438.880.950	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	12 WBTB	2.975.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	50 Orang	1.575.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	60 Orang	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	19 Cagar Budaya	1.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang disusun	875 Dokumen	17.674.505.300	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	5 Kebijakan		Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %		Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan	100 %		Sekretariat Daerah



No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	3 Kebijakan	2.854.074.900	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	3 Kebijakan		Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	90 %		Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu dan Lengkap	100 %		Sekretariat Daerah
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 %	25.979.408.800	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100 %		Sekretariat DPRD
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00 %	2.358.291.570	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85 %	2.409.846.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien	100 %	189.968.220.012	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100 %		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100,00 %		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100 %		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100 %		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100 %		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	2.382.763.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PAD	100 %	2.625.216.900	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PBB	100 %		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	60 %	2.159.151.982	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	49 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	22 Laporan	1.125.995.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	84.061.500	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	25,00 %	19.230.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43.300.000	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	60.000.000	Kecamatan Batu Brak

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Ketulis	100,00 %	20.000.000	Kecamatan Batu Ketulis
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			411.038.800	Kecamatan Belalau
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.500.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	24.608.300	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Kebun Tebu	100,00 %	19.671.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			54.000.000	Kecamatan Lumbok Seminung
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	86.040.000	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	34.500.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	1 pekon mandiri	443.635.200	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kecamatan Suoh	7 pekon mandiri	27.110.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			821.240.560	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Brak	12 pekon mandiri	60.000.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Batu Ketulis	1 pekon mandiri	30.000.000	Kecamatan Batu Ketulis

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Kecamatan Belalau
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15.000.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian	1 pekon mandiri	44.192.100	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Kebun Tebu	1 pekon mandiri	40.998.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15.000.000	Kecamatan Lombok Seminung
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			6.475.000	Kecamatan Pagar dewa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	591.194.390	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Sukau	10 Pekon	40.250.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	627.166.200	Kecamatan Way Tenong
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			54.755.000	Kecamatan Air Hitam
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	77.186.740	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Suoh	0 %	25.000.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			25.000.000	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Brak	25,00 %	30.000.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Ketulis	25,00 %	25.000.000	Kecamatan Batu Ketulis

No	Prioritas Pembangunan RKP	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Belalau
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			30.075.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surian	100,00 %	31.924.200	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Kebun Tebu	25,00 %	39.649.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			24.000.000	Kecamatan Lombok Seminung
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			89.600.000	Kecamatan Pagar dewa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sekincau	100,00 %	60.237.000	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau	25,00 %	40.250.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			72.220.000	Kecamatan Way Tenong
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	37.351.200	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			18.190.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			20.000.000	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00 %	15.000.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Batu Ketulis

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Belalau
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10.000.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00 %	7.785.100	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Kebun Tebu	100,00 %	29.302.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10.000.000	Kecamatan Lumbok Seminung
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00 %	60.237.000	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00 %	34.500.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			62.690.000	Kecamatan Air Hitam
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Sumberjaya	100,00 %	94.257.640	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Suoh	100,00 %	56.260.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			55.000.000	Kecamatan Balik Bukit
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Brak	100,00 %	110.000.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Ketulis	100,00 %	55.000.000	Kecamatan Batu Ketulis

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Kecamatan Belalau
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			28.175.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surian	100,00 %	54.443.800	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Kebun Tebu	100,00 %	26.044.000	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			68.000.000	Kecamatan Lumbok Seminung
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Pagar Dewa	100,00 %	58.003.000	Kecamatan Pagar dewa
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sekincau	100,00 %	101.382.900	Kecamatan Sekincau
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau	100,00 %	69.000.000	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			37.360.000	Kecamatan Way Tenong
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	80,00 %	546.601.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	69,00 %	1.764.707.272	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	55,00 %	545.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		KEMASYARAKATAN				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	71,00 %	1.468.739.620	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	1.437.487.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi	1 Kegiatan	97.796.312.328	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	7 Kegiatan		Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Kegiatan		Sekretariat Daerah
					5.969.932.500	Inspektorat Daerah
					2.673.395.900	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
					1.309.864.440	Kecamatan Balik Bukit
						Kecamatan Belalau
					581.250.000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	75,85 %	2.338.716.237	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,25 %	2.423.347.300	Badan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79 %	3.366.408.254	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,75 %	2.560.847.900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	82,00 %	2.952.579.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,25 %	27.232.002.360	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,15 %	3.667.964.010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	67,02 Poin	5.447.974.722	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,70 %	107.725.541.603	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00 %	2.935.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,18 %	3.133.751.970	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	77,92 %	3.883.199.900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,96 %	9.608.795.900	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	80,00 %	3.561.535.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,28 %	205.429.787.960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	79,87 %	3.500.706.792	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,78 %	3.415.862.500	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	81,00 %	4.471.812.612	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80,00 %	3.985.976.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PU PR	83,05 %	8.152.353.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,75 %	3.639.129.900	Dinas Sosial
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	77,96 %	9.022.984.700	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTP	78,80 %	3.033.996.300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembangunan RPKD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	75,00 %	605.394.900	Kecamatan Air Hitam
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	75,00 %	856.770.500	Kecamatan Sumber Jaya
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	75,00 %	543.500.000	Kecamatan Suoh
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	75,00 %	674.100.000	Kecamatan Batu Brak
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	75,00 %	554.253.000	Kecamatan Batu Ketulis
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	75,00 %	559.874.400	Kecamatan Gedung Surian
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	75,00 %	608.092.500	Kecamatan Kebun Tebu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	75,00 %	659.500.000	Kecamatan Lumbok Seminung
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Pagar Dewa	75,00 %	680.421.000	Kecamatan Pagar dewa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	75,00 %	1.015.041.100	Kecamatan Sekincau

No	Prioritas Pembangunan RKPD	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	75,00 %	777.313.850	Kecamatan Sukau
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	75,00 %	1.123.009.100	Kecamatan Way Tenong
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,85 %	9.010.128.200	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	78,74 %		Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80 %	25.134.882.277	Sekretariat DPRD

### Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Secara rinci dukungan kegiatan pembangunan dalam RPJMD terhadap pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11  
Dukungan Kegiatan Terhadap SPM

NO	SPM	TARGET	SUBKEGIATAN
A	SPM Bidang Pendidikan		
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Sekolah Dasar (SD) :
			1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
			1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
			1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
			1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah
			1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
			1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Sekolah Menengah Pertama (SMP) :
			1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
			1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	SPM	TARGET	SUBKEGIATAN
			1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
			1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa
			1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
			1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
A	SPM Bidang Kesehatan		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

NO	SPM	TARGET	SUBKEGIATAN
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100%	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
A	SPM Bidang Perumahan		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	-	
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	-	

NO	SPM	TARGET	SUBKEGIATAN
	program Pemerintah Daerah provinsi		
B	SPM Bidang Pekerjaan Umum		
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
A	SPM Bidang Trantibumlinmas		
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
			1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	0



NO	SPM	TARGET	SUBKEGIATAN
			1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
			1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
			1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Indikator : Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Indikator : Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator : Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	SPM Bidang Sosial		

NO	SPM	TARGET	SUBKEGIATAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu
		100%	1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		100%	1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		100%	0
		100%	1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan
2	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NPAZA diluar panti sosial	100%	1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		100%	1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
3	Perlindungan sosial korban Bencana alam dan sosial Kabupaten/kota	100%	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100%	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN  
DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19*  
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Program PEN merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan, sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN. Program PEN dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengamanatkan pelaksanaan Program PEN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pada tanggal 9 Mei 2020 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pada RKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023, telah direncanakan berbagai Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dalam Penanganan Dampak Pandemi secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.12  
Dukungan Subkegiatan Tahun 2023 terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Penanganan Dampak Covid 19

No.	Program/ Kegiatan(3)	Anggaran(4)
(a)	(b)	(c)
I. Bidang Kesehatan		
A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19		
1	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.896.511.000
2	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	121.732.500
3	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	79.184.000
4	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	85.190.000
5	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	114.370.000

No.	Program/ Kegiatan(3)	Anggaran(4)
(a)	(b)	(c)
6	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	53.906.900
7	3.25.04.2.01.02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	55.000.000
8	3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000
9	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
10	3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
11	3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
12	3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000
13	3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	55.000.000
14	3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	40.000.000
15	3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30.000.000
16	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000
17	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	200.000.000

No.	Program/ Kegiatan(3)	Anggaran(4)
(a)	(b)	(c)
18	3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	89.999.750
19	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
20	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	250.000.000
21	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000
22	3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	118.393.000
23	3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	52.000.000
	Subsub Total	4.211.287.150
B. Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH		
1.	Koordinasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	
2.	Dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	
	1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.700.000.000
3.	Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19	
	1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100.000.000
4.	Distribusi dan transportasi ke fasilitas kesehatan	

No.	Program/ Kegiatan(3)	Anggaran(4)
(a)	(b)	(c)
dst.	Kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis	
	Subsub Total	2.800.000.000
	Total DAU atau DBH	
	Persentase belanja untuk dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH	
	Total Bidang Kesehatan	7.011.287.150
<b>II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi</b>		
1	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	450.948.000
2	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	30.525.000
3	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	485.090.000
4	2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	73.585.000
5	2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25.950.000
6	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.550.000.000
7	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	325.691.500
8	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	377.728.000
9	3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	184.097.000
10	3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	249.999.000
11	3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.409.902.000

No.	Program/ Kegiatan(3)	Anggaran(4)
(a)	(b)	(c)
12	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	134.171.000
13	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	115.904.000
14	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	170.999.000
15	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	203.641.000
16	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	105.000.000
17	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	167.000.000
18	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	45.000.000
19	3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30.000.000
20	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	500.000.000
21	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	350.000.000
22	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	375.645.500
23	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	656.881.000
24	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	600.000.000
25	2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	64.999.800
26	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	110.000.000
27	2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	100.000.000
28	2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100.000.000



No.	Program/ Kegiatan(3)	Anggaran(4)
(a)	(b)	(c)
29	2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	80.000.000
30	2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	29.109.000
31	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	415.466.000
32	2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	56.785.500
33	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	60.000.000
34	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30.000.000
35	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	82.182.000
36	2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	54.676.000
	Total Penanganan Dampak	11.800.975.300
<b>III. Bantuan sosial safety net/jaring pengaman social</b>		
1	1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	2.860.000.000
2	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	146.000.000
3	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.197.855.100
	Total Bantuan Sosial	7.203.855.100
<b>Total</b>		<b>26.016.117.550</b>

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung pencapaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, maka melalui pelaksanaan Program sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Program Pada RPD Tahun 2023

Berdasarkan Pemetaan Rencana Program Prioritas pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka program, indikator dan target untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[DASAR] Visi RPJPD ,Misi RPJPD ,Sasaran Pokok RPJPD ,Arah Kebijakan RPJPD ,Isu Strategis Aktual			
[ TUJUAN ] Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			
[ SASARAN ] Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing			
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
Indeks pembangunan Keluarga	52,52%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.238.690.380
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Persentase Keluarga berPHBS	35,00%	Dinas Kesehatan	2.866.345.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
% Pekon yang menjadi kampung KB	59%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need	17%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
Persentase Peserta KB Aktif ( PA) MKJP	25%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.922.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Presentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	5,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.466.533.780
Presentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan sesuai Standar	55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Terpenuhinya Hak-hak anak	madya madya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	565.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Akreditasi RSUD AU Utama	100%	Dinas Kesehatan	-
ALOS RSUD AU	4%	Dinas Kesehatan	-
BOR RSUDAU	40%	Dinas Kesehatan	-
Persentase capaian 5 pilar STBM	30%	Dinas Kesehatan	-
Persentase Capaian IDL	100%	Dinas Kesehatan	-
Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	78%	Dinas Kesehatan	-

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	78%	Dinas Kesehatan	-
Persentase Capaian SPA Puskesmas	77%	Dinas Kesehatan	173.676.299.129
Persentase Capaian SPA RSUD/DAU	58%	Dinas Kesehatan	-
Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITE	100%	Dinas Kesehatan	-
Persentase Masyarakat memiliki JKN	70%	Dinas Kesehatan	-
Persentase persalinan di fasyankes	95%	Dinas Kesehatan	-
Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	100%	Dinas Kesehatan	-
Persentase Puskesmas terakreditasi madya	100%	Dinas Kesehatan	-
Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100%	Dinas Kesehatan	-
Prevalensi Balita Wasting	7,30%	Dinas Kesehatan	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Persentase ARG pada APBD	3,00%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	333.031.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	5,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	706.072.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,38%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107.483.762.900
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	102,29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	102,63%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
% data gender dan anak yang terupdate	60%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
Jumlah sastra Lisan yang terlestarikan	2 sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	775.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Persentase jmlh Atlit berprestasi	3,14%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.472.443.500
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,17%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.327.624.600
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	2 mata pelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	409.021.000

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan	21%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	927.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart	60,00%	Dinas Kesehatan	14.453.607.000
Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	100%	Dinas Kesehatan	-
Persentase SDMK RSUDAU yang memenuhi standart	100%	Dinas Kesehatan	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
% keluarga berkualitas	20%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	454.945.500
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelamat Arsip Daerah	5 arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	280.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	60%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	621.657.300
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	2,00%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	508.906.500
[ PROGRAM ] PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Persentase Pemeriksaan Laik Hygiene Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman	100%	Dinas Kesehatan	-
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	75,00%	Dinas Kesehatan	348.000.000
[ TUJUAN ] Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana			
[ SASARAN ] Meningkatnya kesiapsiagaan bencana			
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Persentase desa tangguh	24.26 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.464.545.200
persentase kejadian bencana ditangani	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.365.000.000
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah			
[ PROGRAM ] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			



Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
Persentase peningkatan rumah Layak Huni	0,05%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.600.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	25%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.400.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	50.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	1,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.000.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	25%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.100.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	0,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.600.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Persentase Sarana dan Prasarana Dermaga Sesuai Standar	5%	Dinas Perhubungan	13.113.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	0,92%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	41.947.067.100

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.130.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	150.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21,05%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.511.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	25%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	558.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	1,45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	64.633.833.880
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	3%	Dinas Perhubungan	-
Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	11%	Dinas Perhubungan	716.179.979
Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	95%	Dinas Perhubungan	-

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	575.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	700.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
Persentase Kasus yang Tertangani	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	120.000.000
[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan	80%	Dinas Lingkungan Hidup	650.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	1%	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indeks Kualitas Lahan	45.38 point	Dinas Lingkungan Hidup	13.800.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>			
Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20%	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
Indeks Kualitas Air (IKA)	58,54 point	Dinas Lingkungan Hidup	1.480.000.000
Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.04 point	Dinas Lingkungan Hidup	-
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			
Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10%	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			
Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	Dinas Lingkungan Hidup	700.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100%	Dinas Lingkungan Hidup	1.450.000.000
<b>[ TUJUAN ] Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai</b>			
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat</b>			

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	55,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	545.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	71,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.545.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	80,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	583.600.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.387.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.500.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	69,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.514.708.000
[ SASARAN ] Meningkatkan pemajuan kebudayaan dan Pelestarian cagar budaya			
[ PROGRAM ] PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	19 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.600.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	60 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	12 WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.975.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	50 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.575.000.000
[ TUJUAN ] Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
[ SASARAN ] Meningkatnya Pendapatan Perkapita			
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	25,00%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.801.182.700
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	9%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	80.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Persentase UMKM terfasilitasi	3%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	602.000.000
Persentase wirausaha pemula	0,75%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			
Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	2%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	45.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			
Persentase Koperasi aktif	33%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	7%	Dinas Perikanan	290.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			
Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
Persentase realisasi PAD	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.625.216.900
Persentase realisasi PBB	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5%	Dinas Perikanan	847.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1%	Dinas Perikanan	577.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Persentase Pelaku Ekraf yang dibina	25%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	250.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	478.750.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	134.171.000
Persentase pengendalian OPT	17,60%	Dinas Perkebunan dan Peternakan	150.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100%	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.100.000.000



Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	345.997.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	4,40%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	360.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	7%	Dinas Perikanan	560.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	39%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.639.860.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	20%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	595.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	4,00%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.107.330.600
Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3,00%	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.645.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,04%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	864.376.500
Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5,00%	Dinas Perkebunan dan Peternakan	

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
pertanian			2.195.086.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	8 KT	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	-
Peningkatan kelas Madya ke Utama	2 KT	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	-
Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	200 KT	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.521.137.000
Persentase kelembagaan petani terbina	20,00%	Dinas Perkebunan dan Peternakan	800.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
"Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat "	4,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000.000
Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	2%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Persentase Peningkatan Minat Investasi	10%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.800.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	550.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
% Alat UTTP tertera sah	3,99%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	238.500.000

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ SASARAN ] Menurunnya Tingkat Kemiskinan			
[ PROGRAM ] PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Persentase peningkatan hubungan industrial	5,00%	Sekretariat Daerah	60.250.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	6%	Sekretariat Daerah	476.743.200
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Persentase PSKS yang Aktif	33,51%	Dinas Sosial	415.255.900
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100%	Dinas Sosial	637.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	2 Pekon	Dinas Ketahanan Pangan	480.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Persentase pencari kerja yang terdaftar mendapat pekerjaan	5,00%	Sekretariat Daerah	121.457.500
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %	Dinas Ketahanan Pangan	660.000.000

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
Ketersedian Energi dan Protein	2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	Dinas Ketahanan Pangan	1.260.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
Presentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57%	Dinas Sosial	75.645.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Skor PPH Konsumsi	83,1 Point	Dinas Ketahanan Pangan	3.140.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro yang disusun	1 Dokumen	Sekretariat Daerah	120.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24%	Dinas Sosial	-
Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100%	Dinas Sosial	1.966.150.800
[ PROGRAM ] PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
IKM	B Predikat	Dinas Sosial	-
Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,23%	Dinas Sosial	-
Persentase Penyandang disabilitas yang	19,55%	Dinas Sosial	

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
direhabilitasi			3.737.094.500
[ TUJUAN ] Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan			
[ SASARAN ] Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
[ PROGRAM ] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	584.605.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang disusun	875 Dokumen	Sekretariat Daerah	-
Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	5 Kebijakan	Sekretariat Daerah	-
Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	Sekretariat Daerah	17.674.505.300
Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan	100%	Sekretariat Daerah	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	538.023.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	89,65%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.045.799.500

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	737.787.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65.000.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	3 Kebijakan	Sekretariat Daerah	2.854.074.900
Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	3 Kebijakan	Sekretariat Daerah	-
Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	90%	Sekretariat Daerah	-
Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu dan Lengkap	100%	Sekretariat Daerah	-
[ SASARAN ] Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan			
[ PROGRAM ] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Persentase Pekon Tertib Administrasi	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	2.846.613.850
[ PROGRAM ] PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00%	Sekretariat DPRD	23.630.630.500
Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100%	Sekretariat DPRD	2.730.000.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			
Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	60%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	702.632.000
Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	49%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.456.519.982
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.458.635.150
Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Air Hitam	25,00%	Kecamatan Air Hitam	54.755.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Balik Bukit	25,00%	Kecamatan Balik Bukit	25.000.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Brak	25,00%	Kecamatan Batu Brak	30.000.000

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Batu Ketulis	25,00%	Kecamatan Batu Ketulis	24.930.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Belalau	25,00%	Kecamatan Belalau	30.206.800
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec BNS	25,00%	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	30.075.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surian	100,00%	Kecamatan Gedung Surian	31.924.640
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Kebun Tebu	25,00%	Kecamatan Kebun Tebu	39.649.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Lumbok Seminung	25,00%	Kecamatan Lumbok Seminung	25.500.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Pagar Dewa	25,00%	Kecamatan Pagar dewa	68.600.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sekincau	100,00%	Kecamatan Sekincau	60.237.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau	25,00%	Kecamatan Sukau	40.250.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Way Tenong	25,00%	Kecamatan Way Tenong	61.220.000
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya	100,00%	Kecamatan Sumber Jaya	77.186.000



Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Suoh	0%	Kecamatan Suoh	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	60%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	1.484.554.300
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Jumlah pekon mandiri Kec Balik Bukit	1 pekon mandiri	Kecamatan Balik Bukit	821.239.960
Jumlah pekon mandiri Kec Batu Brak	12 pekon mandiri	Kecamatan Batu Brak	60.000.000
Jumlah pekon mandiri Kec Batu Ketulis	1 pekon mandiri	Kecamatan Batu Ketulis	30.000.000
Jumlah pekon mandiri Kec Belalau	1 pekon mandiri	Kecamatan Belalau	29.979.800
Jumlah pekon mandiri Kec BNS	1 pekon mandiri	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	15.000.000
Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian	1 pekon mandiri	Kecamatan Gedung Surian	44.193.314
Jumlah pekon mandiri Kec Kebun Tebu	1 pekon mandiri	Kecamatan Kebun Tebu	40.998.000
Jumlah pekon mandiri Kec Lumbok Seminung	5 Pekon	Kecamatan Lumbok Seminung	15.000.000
Jumlah pekon mandiri Kec Pagar Dewa	1 pekon mandiri	Kecamatan Pagar dewa	5.475.000
Jumlah pekon mandiri Kec Sekincau	4 pekon mandiri	Kecamatan Sekincau	

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
			591.194.390
Jumlah pekon mandiri Kec Sukau	10 Pekon	Kecamatan Sukau	40.250.000
Jumlah pekon mandiri Kec Way Tenong	1 pekon mandiri	Kecamatan Way Tenong	427.166.200
Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya	1 pekon mandiri	Kecamatan Sumber Jaya	445.923.930
Jumlah pekon mandiri Kecamatan Suoh	7 pekon mandiri	Kecamatan Suoh	27.110.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Sumberjaya	100,00%	Kecamatan Sumber Jaya	94.256.000
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Air Hitam	100,00%	Kecamatan Air Hitam	46.042.600
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Balik Bukit	100,00%	Kecamatan Balik Bukit	55.000.000
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Brak	100,00%	Kecamatan Batu Brak	110.000.000
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Batu Ketulis	100,00%	Kecamatan Batu Ketulis	43.156.100
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Belalau	100,00%	Kecamatan Belalau	29.849.800
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec BNS	100,00%	Kecamatan Suoh	28.175.000

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surian	100,00%	Kecamatan Gedung Surian	57.041.820
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Kebun Tebu	100,00%	Kecamatan Kebun Tebu	26.044.000
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Lumbok Seminung	100%	Kecamatan Lumbok Seminung	55.000.000
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Pagar Dewa	100,00%	Kecamatan Pagar Dewa	54.235.500
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sekincau	100,00%	Kecamatan Sekincau	101.382.900
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau	100,00%	Kecamatan Sukau	69.000.000
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Way Tenong	100,00%	Kecamatan Way Tenong	7.610.000
Persentase desa yang dibina dan diawasi Kecamatan Suoh	100,00%	Kecamatan Suoh	56.260.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAAN DESA</b>			
Persentase Desa yang memenuhi Syarat penataan desa yang di tata	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	330.628.500
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			
Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	22 Laporan	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.585.903.000

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	20,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.519.704.876
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.382.763.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60 Poin	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.885.897.755
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-
Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-
Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	189.968.220.512
Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-
Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-

Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Pekon untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	90.819.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi	1 Kegiatan	Sekretariat Daerah	-
Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	7 Kegiatan	Sekretariat Daerah	-
Jumlah kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Kegiatan	Sekretariat Daerah	-
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	75,85%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.568.652.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,25%	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.491.806.400
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.638.246.754
Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,75%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.560.847.900
Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	82,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.952.579.700
Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,25%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	27.500.125.500

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,15%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.296.881.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	67,02 Poin	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.527.910.310
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,70%	Dinas Kesehatan	110.730.211.601
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00%	Dinas Ketahanan Pangan	3.694.500.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,18%	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.935.345.500
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	77,92%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.928.199.900
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,96%	Dinas Lingkungan Hidup	15.453.140.200
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	80,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	4.046.594.260
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,28%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	205.279.787.960
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	79,87%	Dinas Perhubungan	3.737.699.622
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,78%	Dinas Perikanan	3.498.356.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	81,00%	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.451.812.612

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,60%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.284.630.750
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80,00%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.985.976.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PU PR	83,05%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.966.009.650
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,75%	Dinas Sosial	3.639.129.900
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	77,96%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.022.984.700
Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.970.177.730
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah	82%	Inspektorat Daerah	6.828.374.200
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	75,00%	Kecamatan Air Hitam	660.292.500
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Balik Bukit	75,00%	Kecamatan Balik Bukit	1.309.865.040
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	75,00%	Kecamatan Batu Brak	683.350.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	75,00%	Kecamatan Batu Ketulis	513.288.900
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Belalau	75,00%	Kecamatan Belalau	595.152.100

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec BNS	75,00%	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	581.250.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	75,00%	Kecamatan Gedung Surian	556.512.755
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	75,00%	Kecamatan Kebun Tebu	608.092.500
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	75,00%	Kecamatan Lumbok Seminung	733.934.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Pagar Dewa	75,00%	Kecamatan Pagar dewa	528.064.500
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	75,00%	Kecamatan Sekincau	1.015.041.100
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	75,00%	Kecamatan Sukau	777.313.850
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	75,00%	Kecamatan Way Tenong	947.446.300
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	75,00%	Kecamatan Sumber Jaya	856.947.800
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	75,00%	Kecamatan Suoh	543.500.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,85%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13.179.000.000
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	78,74%	Sekretariat Daerah	97.796.312.328
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80%	Sekretariat DPRD	



Indikator	Target 2023	Perangkat Daerah	Pagu 2023
			25.445.481.370
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Balik Bukit	100,00%	Kecamatan Balik Bukit	43.300.000
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00%	Kecamatan Batu Brak	30.000.000
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Batu Ketulis	100,00%	Kecamatan Batu Ketulis	20.000.000
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00%	Kecamatan Belalau	27.220.900
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec BNS	100,00%	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	17.500.000
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00%	Kecamatan Gedung Surian	24.608.375
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Kebun Tebu	100,00%	Kecamatan Kebun Tebu	19.671.000
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Lumbok Seminung	100,00%	Kecamatan Lumbok Seminung	38.521.500

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00%	Kecamatan Sekincau	86.040.000
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau	100,00%	Kecamatan Sukau	34.500.000
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00%	Kecamatan Sumberjaya	84.061.000
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	25,00%	Kecamatan Suoh	19.230.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditidaklanjuti	83%	Inspektorat Daerah	2.835.791.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			
prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	590.315.275
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			
Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	36,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	131.046.000
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Balik Bukit	100,00%	Kecamatan Balik Bukit	20.000.000

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Brak	100,00%	Kecamatan Batu Brak	15.000.000
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Batu Ketulis	100,00%	Kecamatan Batu Ketulis	20.000.000
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Belalau	100,00%	Kecamatan Belalau	25.065.600
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec BNS	100,00%	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	10.000.000
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surian	100,00%	Kecamatan Gedung Surian	7.785.140
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Kebun Tebu	100,00%	Kecamatan Kebun Tebu	29.302.000
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Lumbok Seminung	100,00%	Kecamatan Lumbok Seminung	30.000.000
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sekincau	100,00%	Kecamatan Sekincau	60.237.000
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec	100,00%	Kecamatan Sukau	34.500.000

<b>Indikator</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pagu 2023</b>
Sukau			
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya	100,00%	Kecamatan Sumber Jaya	37.350.600
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan Suoh	100,00%	Kecamatan Suoh	18.190.000
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.358.291.570
[ PROGRAM ] PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target bobot penilaian akuntabilitas kinerja dengan nilai A	86,20%	Inspektorat Daerah	377.590.000

Total Belanja Daerah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.1.459.373.469.843 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Rekapitulasi Pagu Per Bidang Urusan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Anggaran
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	343.185.994.860
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	299.489.792.732
3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	191.971.216.462
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.158.000.000
5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.784.451.300
6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.470.276.100
7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	778.450.700
8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.543.540.300
9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.379.332.200
10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.729.304.000
11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	29.360.401.937
12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.304.447.510
13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.314.150.950
14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.073.666.380
15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.229.999.771
16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.709.317.225

No	Bidang Urusan	Anggaran
17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.680.199.900
18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.864.743.300
19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.708.487.522
20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	143.959.200
21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	438.880.950
22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.550.000.000
23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.490.400.500
24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	139.599.400
25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.669.952.250
26	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.933.813.600
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.634.957.862
28	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.743.500.000
29	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.842.700.000
30	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	118.324.892.528
31	4.02 SEKRETARIAT DPRD	51.114.291.077
32	5.01 PERENCANAAN	8.134.545.824
33	5.02 KEUANGAN	222.208.202.272
34	5.03 KEPEGAWAIAN	4.719.999.882
35	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.549.342.300
36	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	5.969.932.500
37	7.01 KECAMATAN	15.927.474.420
38	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.101.252.129
Total		1.459.373.469.843

Secara lengkap rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2023 dijabarkan pada Lampiran.

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**6.1. Indikator Kinerja Utama**

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dan prakiraan pencapaian pada tahun 2022 sehingga target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 adalah :

Tabel 6.1  
Penetapan IKU Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Tahun 2023	PD Penanggung-Jawab
1	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	pendapatan perkapita	26.786.367	Bappeda
		Gini Rasio	0,269	Bappeda
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,37%	Dinas Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%	Sekretariat Daerah
3	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95	Bappeda
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	82,17	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
5	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99	Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	0,015	BPBD
7	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	57,05	Sekretariat Daerah
		Nilai SAKIP	70,25	Sekretariat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Tahun 2023	PD Penanggung-Jawab
				Daerah
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,51	Sekretariat Daerah
9	Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	0,750	Sekretariat Daerah
10	Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	2,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



## 6.2. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 6.2  
Indikator Kinerja Bidang Urusan 2023

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
1	000 - Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	14	18	12	10	15	10	10	225.000.000
	Urusan Provinsi :								
	2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2	002 - Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4	4						

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
3	<b>003</b> - Terasilitasnya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor	65	70						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
4	004 - Pertumbuhan Wirausaha	3.0	3.5						
	Urusan Provinsi :								
	2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
5	013 - Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100	100	100	100	100	100	100	101.500.000
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
6	014 - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97	98	97.86	95	106.64	96	97	94.759.500
	Urusan Provinsi :								
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
7	<b>015</b> - Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	110.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
8	<b>016</b> - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	29.102.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
9	017 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	29.102.000
	Urusan Provinsi :								
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
10	02090 - Skor Pola Pangan Harapan		94	90	91	91.4	92.4	93	450.000.000
	Urusan Provinsi :								
	2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
11	02091 - Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	10	29930	50	10	-	10	-	250.000.000



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
12	<b>02093</b> - Persentase daerah rentan rawan pangan	14	12	20	20	20	20	20	300.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
13	02094 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85	85	98.99	80	99,89	80	80	135.000.000
	Urusan Provinsi :								
	2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
14	03271 - Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung)	2 (padi dan jagung)	2.78	-2.33	1.68	2.56	1.65	0.5	1.794.157.600

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
15	<b>03272</b> - Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (cabai dan bawang merah)	1.2	1.85	-1.35	1	-6.77	1	0.5	515.361.500
	Urusan Provinsi :								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
16	<b>03273</b> - Persentase peningkatan Produktivitas Perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	3.28 (kelapa sawit, kakao, kopi, jambu mete, kelapa, karet, teh, aren, sagu, tebu, lada, pala, cengkeh, nilam, serih wangi, vanili, tembakau)	2.05	0.04	1.45	-4,93	2.16	3.55	6.005.540.900
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
17	<b>03278</b> - Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)		4647800	2802	2800	2817	2917	3021	450.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
18	<b>03279</b> - Rasio Luas Serangan OPT yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)		71.87	100	100	100	100	100	177.385.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
19	<b>03280</b> - Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)		50.2						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
20	<b>03281</b> - Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		81	100	100	100	100	100	5.734.774.500
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
21	<b>03282</b> - Jumlah Produksi Susu		986370	38	40	38			

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
22	03283 - Jumlah Produksi Telur		5831500	10133	10000	10122	10482	10854	
	Urusan Provinsi :								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
23	08 - Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	75	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2021	-	-	-	-	3	333.031.000
	Urusan Provinsi :								
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
24	<b>088</b> - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	90						418.906.500
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
25	<b>100</b> - Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	27.1	100	58.05	100	100	550.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
26	<b>10015</b> - Persentase rumah terbangun yang memenuhi PBG dan SLF		100						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
27	<b>10017</b> - Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau		67.88						

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
28	<b>10019</b> - Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani		1459						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
29	<b>101</b> - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	19.1	100	28.1	100	100	300.000.000

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
30	1010030 - Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah		80	18,18	20,45	20,45	22,72	25	200.498.000
	Urusan Provinsi :								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
31	<b>1010031</b> - Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah		65						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
32	1010033 - Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan		100						
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
33	1010034 - Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas		2						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
34	<p><b>1010035</b> - Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi</p>		85						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
35	<b>1010036</b> - Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)		74						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
36	<b>1010037</b> - Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		100	100	100	100	100	100	611.641.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
37	<b>1010039</b> - Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas		10						
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
38	1010040 - Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		100						
	Urusan Provinsi :								
	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
39	<b>1010041</b> - Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar		100						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
40	<b>1010042</b> - Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah		100	100%	100%	100%	100%	100%	122.807.200

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
41	<b>1010044</b> - Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda		100						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
42	<p><b>1010046</b> - Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p>		80						

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
43	1011 - Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5.96 - 7.86	5.96 - 7.86						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
44	1012 - Persentase penanganan pengaduan konsumen	91	92		100	100	100	100	



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
45	<b>1013</b> - Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	50 - 75	50 - 75	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
46	<b>1014</b> - Tertib Usaha	55 - 75	75 - 90	2.8	2	2.9	6	10.2	238.500.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
47	<b>1015</b> - Persentase kinerja realisasi pupuk	90	90	98.5	100	92.6	100	100	111.425.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
48	<b>1017</b> - Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5.9	5.9	0.07	<5	0.412	<5	3	72.900.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
49	102 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	74.2	100	124.95	100	100	300.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
50	1020003 - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	18.4	16	11.2	24	5,57	22	10.94	4.322.855.100
	Urusan Provinsi :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
51	<b>1020015</b> - Jumlah Penurunan Kematian Ibu	-	3274	72.1	121	145	110	110	7.742.998.675
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
52	<b>1020018</b> - Persentase FKTP terakreditasi	80	90	100	100	100	100	100	846.000.000

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
53	1020019 - Jumlah Puskesmas yang dibangun di Kecamatan yang belum memiliki puskesmas	60	56						
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
54	<b>1020020</b> - Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV		90	76.4	100	83.69	100	100	144.894.500
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
55	<b>1020021</b> - Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)		90	36.3	100	71.06	100	100	304.511.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
56	<b>1020022</b> - Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		94.6	97.6	100	100	100	100	3.263.985.800
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
57	<b>1020024</b> - Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	<1/1000	<1/1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.488.889.200
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
58	<b>1020026</b> - Persentase posyandu aktif		80	100	100	100	100	100	1.313.228.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
59	<b>1020027</b> - Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)		7.3	11.5	11.5	10.9	10.9	10.9	4.548.090.900
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
60	<b>1020029</b> - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial		94	100	100	100	100	100	4.450.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
61	<b>1020032</b> - Presentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi		-	100	100	100	100	100	150.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
62	<b>1020035</b> - Persentase Tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		80	80	80	80	100	100	150.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
63	<b>1020038</b> - Persentase Capaian 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting		100	267	100	176.79	100	100	4.197.855.100
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
64	1020041 - Penurunan jumlah kematian ibu		22	180.20	100	80,17	100	100	7.742.998.675
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
65	1020042 - Presentase rumah sakit yang terakreditasi		95	100	100	100	100	100	150.000.000
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
66	103 - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	92.5	100	98.85	100	100	250.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
67	<b>1033</b> - Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	6.8	7.70	-3.2	3	6.24	5	5.5	2.000.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
68	<b>1034</b> - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	18.3	18.40	5.29	5.30	5.35	5.35	5.40	500.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
69	<b>1037</b> - Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	20.6 juta	21.34 juta	3295	3360	3473	3542	3612	500.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
70	<p><b>1081</b> - Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p> <p>1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p>	225842	220000						

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
71	<p><b>1082.1</b> - Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p> <p>2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</p>		72						
72	<p><b>1084</b> - Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p>		Meningkat minimal 0,1 point dari kondisi 2021	92.95	91.74	93	91.8	93.5	355.000.000

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
73	<b>1091</b> - Nilai Realisasi Penanaman Modal	968.4 triliun	1.128 - 1.200 triliun	1,13484E+11	90000000000	1,12922E+11	95000000000	95000000000	3.095.719.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.18-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.18-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
74	<p><b>1111111111</b> - Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>-</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p> <p>2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</p>		123						
75	<p><b>1114</b> - Jumlah Desa Mandiri.</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p>	3944	5444	10	10	40	15	20	625.297.500

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
76	<b>1120</b> - Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	85000	135000						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
77	<b>1122</b> - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.74	Meningkat minimal 2 point dari kondisi 2021	68.24	53.2	68.5	54.2	69	454.945.500

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
78	1126 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69.87	Provinsi menyesuaikan dengan hasil proyeksi tahun 2023; Kab/Kota meningkat minimal	-	-	-	-	64.0	955.357.000
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2 Point dari kondisi 2021						
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
79	<b>1134</b> - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	60	70	100	100	100	100	100	494.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
80	<b>115000</b> - Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	150	200	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
81	<b>115100</b> - Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	300	364				1	1	109.944.500
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
82	<b>115200</b> - Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	600	728	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
83	<b>1153</b> - Produksi Perikanan Tangkap	8320000	8735580	475.3	546.64	586.20	573.97	597	557.090.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
84	<b>115300</b> - Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3000	3000		45	45	45	45	60.000.000

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
85	<b>1154</b> - Produksi Perikanan Budidaya	20540000	21580000	6513.26	7262.05	9935.41	8120.45	9333	847.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
86	<b>115400</b> - Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	7230	7230	15	15	15	15	15	185.499.900
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
87	<b>115500</b> - Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	7000	15000	50	50	50	50	150	349.999.800
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
88	<b>1156</b> - Operasi kapal/speedboat pengawas	180	100	96	96	96	96	96	289.999.750
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
89	<b>115600</b> - Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	2500	3500	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
90	<b>115800</b> - Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	250	204330	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
91	<b>115900</b> - Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	358	250	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
92	<b>116000</b> - Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	375	375	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Urusan Kabupaten/Kota :								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
93	<b>116100</b> - Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	120000	50000	94	894	871	1000	1000	146.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
94	<b>116200</b> - Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1,2	1000	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
95	<b>116300</b> - Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	10000000	10000000	16845	17617	17617	17600	17600	729.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
96	<b>116400</b> - Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	150	39351	66	72	72	71	71	729.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
97	<b>116600</b> - Jumlah Lembaga di Didang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	4000	850		4	4	4	4	169.756.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
98	<b>116700</b> - Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	18000	38000	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
99	<b>116800</b> - Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	50,39	100	100	100	100	100	100	327.151.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
100	<b>116900</b> - Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	4,23	100	100	100	100	100	100	729.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
101	<b>117000</b> - Presentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	45,72	100	100	100	100	100	100	
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
102	<b>117100</b> - Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		100	20.30	20.30	20.30	20.30	19.55	1.496.150.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
103	<b>117200</b> - Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		100	48.60	48.60	48.60	49.37	49.37	2.860.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
104	<b>117300</b> - Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		100	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
105	<b>117400</b> - Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		100	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
106	<b>1174.1</b> - Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya		7.056.010						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
107	<b>1177</b> - Inflasi Pangan Bergejolak	03-May	03-May	2	02-Apr	2.14	02-Apr	02-Apr	365.675.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
108	<b>1178</b> - Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani		100	100	100	100	100	100	1.896.511.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
109	<b>1181</b> - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12	55.31						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
110	<b>11899</b> - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36.00	36.00	22	36	20	36	36.05	1.100.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
111	<b>11900</b> - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12.00	12.00	10	12	5	12	12.5	102.642.000

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
112	<b>11902</b> - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.96	1.99	1	2	1.5	2	2	350.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
113	<b>11903</b> - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.58	22.82	22.5	22.7	22.5	22.8	22.9	857.056.800
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
114	<b>11904</b> - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	55.76	58.86	20	25	23	56	59	939.713.430
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
115	<b>11905</b> - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.14	0.46				10	12	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
116	<b>11906</b> - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31	0.50				2	2	1.575.000.000
	Urusan Provinsi :								
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
117	<b>1195</b> - Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100	100						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
118	<b>1196</b> - Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	13	3						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
119	<b>1197</b> - Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	200	100						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
120	<b>1198</b> - Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59		69,2						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
121	<b>1207</b> - Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	425.3 Triliun	544.59 Triliun	37.988 milyar	18.841 milyar	16.664 milyar	19.218 milyar	19.603 milyar	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
122	<b>1208</b> - Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	151.9	160.64						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
123	<b>1212</b> - Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	10000	10000						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
124	<b>1212121212</b> - Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	63939	8051						
	Urusan Provinsi :								
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
125	<b>1213</b> - Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	194763	291400						
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
126	<b>1214</b> - Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah	154310	241415						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
127	<b>1215</b> - Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	7500	9000						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
128	<b>1230</b> - Jumlah Desa Berkembang	56791	58291						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
129	<b>1237</b> - Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	42.03	44.08						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
130	<b>1245</b> - Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya		100	55	65	65	75	100	357.500.500
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
131	<b>1255</b> - Jumlah Desa Tertinggal	14402	11652	-	-	-	-	-	

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
132	<b>1270</b> - Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang		270	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
133	<b>1285</b> - Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	#####	#####					25 persen	277.744.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
134	<b>1313131313</b> - Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	380273	411095						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
135	<b>1329</b> - Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	152510	208765						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	<i>1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>								
136	<b>1330</b> - Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	40000	62500						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	<i>1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	<i>1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>								
137	<b>1331</b> - Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	5779	1000						

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b> 1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b> 1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
138	<b>1332</b> - Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	4	8						
	<b>Urusan Provinsi :</b> 1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
139	1456 - Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan		20		62	62		294	798.754.000
	Urusan Provinsi :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
140	1511 - Pertumbuhan implementasi SRG (Sistem Resi Gudang)		33 % (utk daerah yg belum terdapat kelembagaan SRG); 5 - 15 % (utk daerah yg sudah terdapat kelembagaan SRG LENGKAP)						
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
141	<b>1999</b> - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57.00	59	-	-	52.51	-	52.52	468.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
142	<b>2000</b> - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21.00	20						175.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
143	<b>2145</b> - Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota		20	15	18	18	20	25	79.184.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
144	<b>220201</b> - Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		100		100	65,15	100	100	422.188.040
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
145	<b>220202</b> - Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100		100	98,26	100	100	59.556.919.000

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
146	220203 - Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		1.90			1,64	1,74	1,74	8.774.580.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
147	220204 - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		1.80			1,49	1,59	1,59	8.774.580.000

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
148	220205 - Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.90			1,58	1,68	1,68	1.875.411.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
149	220206 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.80			1,57	1,67	1,67	1.875.411.000
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	<i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>								
150	<b>220207</b> - Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		63.64			52,83	52,86	52,86	2.433.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	<i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>								
151	<b>220208</b> - Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV		69.00			61,48	62,88	62,88	0
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	<i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>								
152	<b>220209</b> - Rasio pengawas dan penilik PAUD		3.20			1,96	3	3	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	<i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>								
153	<b>2411</b> - Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani		100	100	100	100	100	100	85.190.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
154	<b>2445</b> - Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana		100	100	100	100	100	100	724.889.000
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
155	<b>2451</b> - Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional		50						
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
156	<b>2452</b> - Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan		10						

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
157	<b>292</b> - Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		208764	2124	3359	2281	4119	6294	4.200.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
158	294 - Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		100	100	100	100	100	100	114.370.000
	Urusan Provinsi :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
159	3421 - Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan		1						
	Urusan Provinsi :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
160	3451 - Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS		5	4	4	4	4	4	73.798.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
161	3456 - Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota		20				200	150	225.000.000
	Urusan Provinsi :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
162	<p><b>3641</b> - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana</p>		100					100	931.385.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	<p>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</p>								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
163	390 - Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		133000	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
164	<b>391</b> - Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan		133000		2	2	2	2	42.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
165	<b>392</b> - Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan		1000	2	3	3	3	3	0
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
166	<b>393</b> - Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		1000	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
167	<b>394</b> - Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia  Urusan Provinsi : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  Urusan Kabupaten/Kota :  1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		10230	223	223	223	223	223	0
168	<b>400</b> - Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki  Urusan Provinsi :	100	100				1	1	109.944.500

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
169	401 - Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		200	87	87	87	92	130	494.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
170	<b>402</b> - Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		514	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
171	<b>403</b> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota :  1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		200	87	87	87	92	130	1.094.301.000
172	<b>404</b> - Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota :		514	4	4	4	4	4	

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
173	405 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemakanan sesuai standar gizi		100	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
174	<b>406</b> - Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		514	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
175	<b>407</b> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		100	-	-	-	-	-	
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
176	408 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		50	17	20	20	15	30	98.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
177	409 - Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		514	-	-	-	-	-	

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
178	410 - Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		514	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
179	<b>411</b> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		50	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
180	<b>4125</b> - Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial		20						
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
181	<b>413</b> - Jumlah pekerja sosial profesional profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		2	223	223	223	223	223	0
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
182	<b>414</b> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		200	50	50	50	50	50	0
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
183	<b>415</b> - Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial  Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota :  1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		136900	-	-	-	-	-	
184	<b>416</b> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		200	-	-	-	-	-	

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
185	417 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		50	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
186	418 - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		50	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
187	<b>419</b> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		50	-	-	-	-	-	
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
188	<b>420</b> - Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		25	-	-	-	10	20	0
	Urusan Provinsi :								
	-								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
189	<b>42152</b> - Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur		1						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
190	426 - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	10,56	100	20.30	20.30	20.30	20.30	19.55	0
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
191	<p><b>427</b> - Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>-</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p> <p>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</p>		100	100	100	100	100	100	146.000.000
192	<p><b>444444</b> - Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa</p> <p>Urusan Provinsi :</p>	380273							

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
193	<b>461.1</b> - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		7.056.010						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
194	470.1 - Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	17.800	45.000						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
195	470.2 - Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja		227.500						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
196	484.2 - Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya		1.546.370						
	Urusan Provinsi :								
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
197	512111 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	100	100	150.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
198	<b>5123123</b> - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	100	76.4	100	83.69	100	100	144.894.500
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
199	<b>51231231</b> - Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15	-	80.20	100	80,17	100	100	7.742.998.675
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
200	<b>512323</b> - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	36.6	100	83.69	100	100	304.511.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
201	<b>512413</b> - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100	100	27.1	100	58.05	100	100	250.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
202	<b>5124231</b> - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91	93	97.8	100	93.9	100	100	574.329.375
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
203	<b>514123</b> - Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	49	79	100	100	100	100	100	48.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
204	<b>515232</b> - Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	40	40	100	100	100	100	100	150.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
205	<b>54321</b> - Persentase Sarana Produksi UMOT	60	80	100	100	100	100	100	48.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
206	555125 - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59	83	60	60	60	60	60	6.987.002.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
207	555555 - umlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	63939							
	Urusan Provinsi :								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
208	<b>561</b> - Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	50	75	-	-	-	-	60	621.657.300
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
209	<b>601</b> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.22	69.48	64.12	64.74	65.99	65.36	65.99	19.751.606.037
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
210	602 - Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	1700 Lembaga	1800 Lembaga (target pusat) 20-30% ketaatan penanggung jawab usaha dari 75% usaha yang dilakukan pengawasan						
	Urusan Provinsi :								
	2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
211	603 - Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	1700 Lembaga (75%)	1800 Lembaga (target pusat) 75% penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dari total izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah						
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
212	<b>629</b> - Pemanfaatan data kependudukan	80	80	-	17.6	29.4	29.4	47.05	35.385.900
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
213	<p><b>6512</b> - Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p> <p>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</p>		25	20	20	20	20	25	147.318.400

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
214	<b>656</b> - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun  Urusan Provinsi : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  Urusan Kabupaten/Kota : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.21	2.19	2.39	2.27	2.39	2.26	2.35	1.075.000.000
215	<b>657</b> - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)  Urusan Provinsi :	62.54	62.92	74.4	73.17	73.63	75.17	69	1.922.000.000

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
216	<b>658</b> - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.00	7.7	-	-	-	-	17	1.250.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
217	<b>662</b> - Rasio konektivitas Provinsi	0.695	0.725						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
218	<b>663</b> - Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0.695	0.725	4.900	5.810	5.810	16.000	16.490	374.980.349
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
219	<b>665</b> - Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan	28.85	26.39	0.0116	0.0132	0.0132	0.0044	0.0042	254.105.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
220	<p><b>6741</b> - Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan</p>		50						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	<p>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</p>								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	<p>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</p>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
221	<b>777777</b> - Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan e-Arsip terintegrasi		165						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
222	<b>7778</b> - On Time Performance Layanan Transportasi	78.44	80.26	60.98	65.55	65.55	70.00	75.50	189.625.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
223	<b>7780</b> - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85.00	88.4	60.50	63.50	63.50	64.00	65.00	215.475.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
224	<b>788</b> - Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab		300						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
225	<b>790</b> - Jumlah Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk Pelatda		100	3	70	26	75	25	1.848.277.500
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
226	<p><b>794</b> - Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Kab/Kota</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>-</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p> <p>2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p>		1						
227	<p><b>796</b> - Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota</p> <p>Urusan Provinsi :</p> <p>-</p> <p>Urusan Kabupaten/Kota :</p>		50						

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
228	798 - Persentase Wirausahawan Muda ditingkat Kabupaten/Kota		0.5						
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
229	800 - Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	122.807.200
	Urusan Provinsi :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
230	<b>852</b> - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	14						310.020.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.23-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.23-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
231	<b>858</b> - Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63.3	67.3						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.23-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
2.23-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
232	<b>903</b> - Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	260.000.000-280.000.000	300.000.000-315.000.000	292.698	17.805	136.943	18.161	153.414	2.355.207.600
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
233	92 - Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1	1.4	0.4	0,736111111	0.4	0,736111111	0,736111111	92.382.218.182
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
234	93 - Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	90	-	100	100	100	100	100	150.000.000
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
235	94 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	87.5	100	92.44	100	100	2.595.814.200
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
236	95 - Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100	100	85.1	100	93.93	100	100	574.329.375
	Urusan Provinsi :								
	-								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
237	<b>96 - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>	100	100	86.6	100	92.04	100	100	213.750.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
238	<b>97 - Pelayanan Kesehatan Balita</b>	100	100	82.5	100	50.32	100	100	350.235.800
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
239	<b>98</b> - Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	52.9	100	58.05	100	100	250.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
240	<b>999999</b> - Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas		32						
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								
	2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
241	<b>BM2</b> - Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	60	63	63.43	66.09	66.10	68.09	63.45	64.633.834.952
	Urusan Provinsi :								
	-								
	Urusan Kabupaten/Kota :								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
242	<b>CK1</b> - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95.1	97.55	83.75	85.75	85.75	87.75	89	3.100.000.500
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
243	<b>CK12</b> - Persentase angka BABS di tempat terbuka	2.98	1.49						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	<i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	<i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>								
244	<b>CK14</b> - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	84.41	92.21						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
245	<b>CK2</b> - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	13.45	14.22						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
246	<b>CK4</b> - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	25.57	28.01						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
247	<b>CK6</b> - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	83.60	91.80						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
248	<b>CK7</b> - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	69.53	69.54						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	-								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
249	<b>CK9</b> - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82.07	86.03	97.04	90.82	98.52	92.3	92.94	6.000.000.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
250	<b>P1</b> - Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421	355157						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
251	<b>P2</b> - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	129523	144200						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
252	<b>PR1</b> - Penyelesaian Materi Teknis RTRW	125	43						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
253	<b>PR10</b> - Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Alih Fungsi Lahan Sawah		12						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
254	<b>PR2</b> - Penyelesaian Materi Teknis RDTR	1153	189						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
255	<b>PR5</b> - Penetapan RTRW		43		1		1	1	569.698.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
256	<b>PR6</b> - Penetapan RDTR		132						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
257	<b>PR7</b> - Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada DAS		6						



No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Provinsi :</b> <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b> <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>								
258	<b>PR8</b> - Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)		15						
	<b>Urusan Provinsi :</b> <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
259	<b>PR9</b> - Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah		6						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
260	<b>SDA2</b> - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	30447	30447						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
261	<b>SDA3</b> - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	110672	110672	6075.97	6407.8	6407.8	6865.5	6551.4	52.431.533.000
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

No	Indikator	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Jumlah Pagu 2023
262	<b>SDA4</b> - Tambahan Debit Air Baku	2.86	2.86						
	<b>Urusan Provinsi :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	<b>Urusan Kabupaten/Kota :</b>								
	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

### 6.3. Inovasi Daerah

Tabel 6.2  
Daftar inovasi pada tahun 2021

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
1	PENGEMBANGAN PEKON WISATA	Non Digital	pariwisata	150.00
2	Wisata Edukasi Tematik Pengolahan Kopi	Non Digital	pariwisata	150.00
3	Wisata Air Terjun Ulu Way Upang	Non Digital	pariwisata	150.00
4	Wisata Air Terjun Tirtomoyo	Non Digital	pariwisata	150.00
5	Kawasan Wisata Air Waterboom Berlian Muda	Non Digital	pariwisata	150.00
6	LEMBAH SERIBU KAWAH	Non Digital	pariwisata	150.00
7	NEGERI DI ATAS AWAN "BUKIT KABUT BAWANG BAKUNG"	Non Digital	pariwisata	150.00
8	PEKON WISATA SUKABANJAR	Non Digital	pariwisata	150.00
9	PEKON WISATA PAGAR DEWA SUKAU	Non Digital	pariwisata	150.00
10	PEKON WISATA SUKARAME BELALAU	Non Digital	pariwisata	150.00
11	PEKON WISATA / KELURAHAN SEKINCAU	Non Digital	pariwisata	150.00
12	PEKON WISATA GUNUNG RATU	Non Digital	pariwisata	150.00
13	PEKON WISATA SUKAJAYA	Non Digital	pariwisata	150.00
14	SPT-FKUB ( Silaturahmi Memperkuat Toleransi melalui Forum Kerukunan Umat Beragama )	Digital	sosial	150.00
15	PEKON WISATA PAMPANGAN	Non Digital	pariwisata	149.00
16	PEKON WISATA SUKA RAJA WAY TENONG	Non Digital	pariwisata	149.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
17	PELANGI PESAGI (PERencanaan LANGsung Integrasi dengan PENGanggaran menjadi SATu sinerGI)	Digital	Perencanaan	148.00
18	PAYU MIDOKH MID LAMPUNG BARAT (AYO BERWISATA KE LAMPUNG BARAT)	Non Digital	pariwisata	148.00
19	Inovasi Hebat	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	148.00
20	Optimalisasi Taman Kota Hamtebiu	Non Digital	lingkungan hidup	148.00
21	BPPM (BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA)	Non Digital	pendidikan	148.00
22	Wisata Danau Asam	Non Digital	pariwisata	148.00
23	Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort	Non Digital	pariwisata	148.00
24	Wisata Air Terjun Trisno	Non Digital	pariwisata	148.00
25	Wisata Taman Hambekhos	Non Digital	pariwisata	148.00
26	Ekowisata Hutan Pinus	Non Digital	pariwisata	148.00
27	BAZNAS LAMPUNG BARAT	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	148.00
28	SEKOLAH LAPANG KONSERVASI	Non Digital	lingkungan hidup	148.00
29	Grand Design Konservasi Berkelanjutan	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	148.00
30	Pemantauan dan Analisa Harga Pangan	Digital	pangan	148.00
31	BRIGADE KONSERVASI	Digital	pertanian	148.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
32	Usaha Lancar berkat KUR	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	148.00
33	Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan	Non Digital	pangan	148.00
34	PEKON WISATA KAGUNGAN	Non Digital	pariwisata	148.00
35	PEKON WISATA KUBU PERAHU	Non Digital	pariwisata	148.00
36	Kegiatan Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Non Digital	sosial	148.00
37	BAKSO BORAK ( Bakti Sosial Bantuan Operasi Katarak )	Non Digital	sosial	148.00
38	JAMIN HUMANIS (Jaminan Kesehatan Pangan Asal Hewan yang Halal Utuh Aman dan Sehat)	Digital	pertanian	148.00
39	Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Pangan	Non Digital	pangan	148.00
40	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Non Digital	pangan	148.00
41	WISATA RELEGIUS GUNUNG PESAGI	Non Digital	pariwisata	148.00
42	PEKON WISATA KENALI	Non Digital	pariwisata	148.00
43	PEKON WISATA PURALAKSANA	Non Digital	pariwisata	148.00
44	PEKON WISATA WAY PETAI	Non Digital	pariwisata	148.00
45	PEKON WISATA SINDANG PAGAR	Non Digital	pariwisata	148.00
46	Penanganan Pasca Panen Tanaman Padi	Non Digital	pertanian	148.00
47	DIKLAT EXTRA PADI (Pendidikan dan Pelatihan Bagi Ex Trauma dan Penyandang	Non Digital	sosial	148.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
	Disabilitas)			
48	PELIKAN (Penangkap Maling Ikan)	Non Digital	kelautan dan perikanan	148.00
49	Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Covid-19 melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Non Digital	kesehatan	148.00
50	CERITA INDAH BANTUAN RUMAH SWADAYA DI BUMI SEKALA BEKHAK	Digital	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	148.00
51	PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	148.00
52	PEKON WISATA TAMBAK JAYA	Non Digital	pariwisata	147.00
53	KONSER HEBAT (Kabupaten Konservasi untuk Lampung Barat Hebat)	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	146.00
54	SOSIS (Sai Opd Sai Inovasi)	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	146.00
55	KATANA (Kabupaten Tangguh Bencana)	Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	146.00
56	Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex Situ Kebun Raya Liwa	Non Digital	pariwisata	146.00
57	PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana)	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	146.00
58	Pengembangan Usaha Tani Berbasis Konservasi	Non Digital	pertanian	146.00
59	Wisata Bumi Perkemahan	Non Digital	pariwisata	146.00



No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
60	PENUMBUHAN WISATA PENGAMATAN BURUNG	Non Digital	lingkungan hidup	146.00
61	OBOR PANGAN LESTARI (OPAL)	Non Digital	pangan	146.00
62	Puber (Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat)	Non Digital	kelautan dan perikanan	146.00
63	Gerakan Pangan Mandiri	Non Digital	pangan	146.00
64	Kawasan Mandiri Pangan	Non Digital	pangan	146.00
65	Optimalisasi SIKS-NG di Kabupaten Lampung Barat	Digital	sosial	146.00
66	SEKOLAH PENGGERAK WISATA	Non Digital	pariwisata	146.00
67	Stimulan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Cacat	Non Digital	sosial	146.00
68	Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)	Non Digital	pangan	146.00
69	PM INDAH (Pamong Membangun Inovasi Daerah)	Digital	Penelitian dan Pengembangan	146.00
70	Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana	Non Digital	lingkungan hidup	146.00
71	PENTAS PM (Penertiban Fasilitas Umum Polpp Melayani)	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	146.00
72	SISTEM INFORMASI ORGANISASI MASYARAKAT (SIORMAS)	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	146.00
73	DATA AKURAT GAKIN SEJAHTERA (Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS)	Non Digital	sosial	146.00
74	SEDANG ASRI	Digital	lingkungan hidup	146.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
75	PENGEMBANGAN WISATA OLAH RAGA MINAT KHUSUS (BERSEPEDA)	Non Digital	kepemudaan dan olah raga	145.00
76	PETE (Pemeriksaan Terintegrasi )	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	144.00
77	Pekon Tertib	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	144.00
78	BEGUAI BETIK	Non Digital	sosial	144.00
79	Festival Kopi Lampung Barat	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	144.00
80	Wisata Air Terjun Segening	Non Digital	pariwisata	144.00
81	Negeri Diatas Awan Temiangan Hill	Non Digital	pariwisata	144.00
82	PENGEMBANGAN TAMAN ARACEAE	Non Digital	lingkungan hidup	144.00
83	PolPP Hebat dalam penanganan ODGJ	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	144.00
84	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) Kabupaten Lampung Barat	Digital	sosial	144.00
85	PEKON WISATA TURGAK	Non Digital	pariwisata	144.00
86	KUBEGAKIN (Kelompok Usaha Bersama bagi keluarga miskin)	Non Digital	sosial	144.00
87	POEBER (Pekon Youtuber)	Digital	komunikasi dan informatika	144.00
88	BANK DARAH	Non Digital	kesehatan	144.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
89	PATROLI	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	144.00
90	PESAN PM (Optimalisasi Penegakan Perda dan Perbup Poll pp Melindungi)	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	144.00
91	RAMP CEK	Digital	perhubungan	144.00
92	Si Handak Bergetar	Non Digital	perhubungan	144.00
93	SAMPAH MEMBAWA BERKAH (SAMBER)	Non Digital	lingkungan hidup	144.00
94	OPTIMALISASI BUDIDAYA PERIKANAN	Non Digital	kelautan dan perikanan	143.00
95	PALU BAPAK (Pantang Lupa Bayar Pajak)	Non Digital	Keuangan	143.00
96	Pelayanan Poliklinik Online RSUD Alimuddin Umar	Digital	kesehatan	142.00
97	PM SERASI (Pendidikan Merata Seragam Siswa/i)	Non Digital	pendidikan	142.00
98	ADA PM (Ada Polpp Melayani Masyarakat)	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	142.00
99	DESA WISATA RIGIS JAYA	Non Digital	pariwisata	142.00
100	PEKON WISATA HUJUNG	Non Digital	pariwisata	142.00
101	DAMKAR HEBAT	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	142.00
102	MASTER PM (Masyarakat Sehat Tanpa Asap Rokok)	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	142.00
103	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan	Non Digital	kesehatan	140.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
	Tuberkulosis			
104	GERAKAN PEKON MEMBACA	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	140.00
105	KOORDINASI JARLIT BIDANG IPTEK	Non Digital	Penelitian dan Pengembangan	140.00
106	JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN POKOK DI TINGKAT PEKON	Non Digital	pangan	140.00
107	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Alimuddin Umar	Non Digital	kesehatan	140.00
108	PEKON WISATA SUKAMARGA	Non Digital	pariwisata	140.00
109	Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) di Laboratorium RSUD Alimuddin Umar	Non Digital	kesehatan	140.00
110	JARLIT LITERASI (Jaringan penelitian dan pengembangan kabupaten literasi)	Non Digital	Penelitian dan Pengembangan	140.00
111	POJOK BACA	Non Digital	perpustakaan	140.00
112	SLLB (Save Lalu Lintas Lampung Barat	Non Digital	perhubungan	140.00
113	EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON DAN KELURAHAN	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	140.00
114	Pengelolaan Limbah Medis Ramah Lingkungan	Non Digital	kesehatan	139.00
115	PIK-R (PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA	Non Digital	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	139.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
116	Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Non Digital	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	139.00
117	KABUPATEN LITERASI	Non Digital	perpustakaan	138.00
118	PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BUDIDAYA ANGGREK	Non Digital	lingkungan hidup	138.00
119	PM GANTA (Pembinaan Monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial Tanggap Anak)	Non Digital	sosial	138.00
120	Pelayanan Donor Darah	Non Digital	kesehatan	138.00
121	OPTIMALISASI PROPIL PEKON/KELURAHAN	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	138.00
122	Sistem Informasi Kepuasan Pelayanan (SIKEP) RSUD Alimuddin Umar	Digital	kesehatan	138.00
123	INBUKER (INFORMASI BURSA KERJA)	Non Digital	tenaga kerja	137.00
124	Sistem Informasi Harga Komoditi (SIHK)	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	137.00
125	Pembayaran Uang Jasa Pelayanan dengan cara non tunai	Non Digital	kesehatan	137.00
126	OPTIMALISASI LAYANAN PERPUSTAKAAN	Non Digital	perpustakaan	137.00
127	Fasilitasi Layanan Partai Politik (Si ITIK)	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	137.00
128	GERAKAN SENAM MENUJU LAMPUNG BARAT SEHAT DAN SEJAHTERA	Non Digital	kepemudaan dan olah raga	136.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
129	JURNAL KELITBANGAN	Non Digital	Penelitian dan Pengembangan	136.00
130	Peningkatan Kecepatan Informasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (PAKISPEN Covid-19)	Non Digital	kesehatan	136.00
131	ADA UPAH	Digital	lingkungan hidup	136.00
132	Tuman Balita ( Pemantauan pertumbuhan balita dirumah )	Non Digital	kesehatan	136.00
133	SISTEM DOKUMENTASI KEUANGAN ONLINE (SI DOEL) DI SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA	Digital	penanaman modal	136.00
134	SIMADU (SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN DATA TERPADU)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	135.00
135	Dengan Whatsapp Satu Hari Jadi Surat Tanda lapor Keberadaan (Dewi Sari Janda Lara)	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	134.00
136	DISKON HEBAT (Datang, Investasi Langsung Kontruksi Dengan Hemat, Benar dan Cepat	Digital	penanaman modal	134.00
137	PEMANFAATAN ANDROID UNTUK PEMBELAJARAN SISWA DI SEKOLAH	Digital	pendidikan	134.00
138	PENGKAYAAN KOLEKSI KEBUN RAYA	Non Digital	lingkungan hidup	134.00
139	RATI SIKOP (Gerakan Tingkatkan Produksi Kopi)	Digital	pertanian	134.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
140	GAPAI PM (Keluarga Harapan Solusi Perekonomian maju )	Non Digital	sosial	134.00
141	JAMKESDA HEBAT	Non Digital	kesehatan	134.00
142	perpustakaan keliling (Pusling)	Non Digital	perpustakaan	134.00
143	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEKON	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	134.00
144	PERCEPATAN PERUBAHAN STATUS PEKON TERTINGGAL	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	134.00
145	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN / KOTA	Digital	lingkungan hidup	134.00
146	JELITA TBC (Jemput, Layani Penyakit TBC)	Non Digital	kesehatan	134.00
147	JEMPING BUFAS ( Jemput dan dampingi ibu bersalin di fasilitas kesehatan)	Non Digital	kesehatan	134.00
148	PM AKSI (Perencanaan Mantap, Akuntabel, Kredibel, Sistematis, Informatif)	Non Digital	kesehatan	134.00
149	BERHIAS UKS (Belajar Hidup Indah Asik dan Sehat bersama Usaha Kesehatan Sekolah)	Digital	pendidikan	134.00
150	Optimalisasi Tim Bankom ( Bantuan Komunikasi )	Non Digital	komunikasi dan informatika	133.00
151	SIP ONLINE	Non Digital	Kepegawaian	133.00
152	PERALATAN CUCI TANGAN INOVATIF	Non Digital	pendidikan	133.00
153	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( Germas) Dengan Senam dan Makan Buah Bersama	Non Digital	kesehatan	133.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
154	PITa BRI ( Peningkatan Iman dan Taqwa melalui Bantuan Rumah Ibadah	Non Digital	sosial	133.00
155	PM BERAKSI (Pendidikan Merata Biaya Operasional Sekolah Siswa)	Non Digital	pendidikan	132.00
156	Nayah PM (Bina Wilayah Puskesmas Maju)	Non Digital	kesehatan	132.00
157	KACAR KUCUR ( PERKAWINAN LANCAR DOKUMEN MELUNCUR)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	132.00
158	PEKON SADAR ADMINDUK GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK (GISA)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	132.00
159	SATUAN KARYA PRAMUKA BHAKTI PRAJA	Non Digital	pendidikan	131.00
160	LAKOMPOL (Diklat Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja)	Non Digital	Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan	131.00
161	Lamban Baca Kabupaten Lampung Barat	Non Digital	perpustakaan	131.00
162	BUDI SELANCAR(BUKU DIGITAL AKSES LITERASI LANCAR) / E-BOOK	Non Digital	perpustakaan	131.00
163	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN PEKON	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	131.00
164	PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU DALAM KONVERGENSI STUNTING	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	131.00



No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
165	DOKTER HEBAT (Pengangkatan dan Penempatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di RSUD AU Kab Lampung Barat)	Non Digital	kesehatan	130.00
166	Analisis pemetaan data potensi PAD dari seluruh OPD penghasil di Kabupaten Lampung Barat	Non Digital	Keuangan	130.00
167	KARSUMEY (Kartu Surat Menyurat)	Non Digital	Kepegawaian	130.00
168	PINDAH ONLINE (PELAYANAN PENERBITAN SURATKETERANGAN PINDAH WARGA NEGARA INDONESIA(SKPWNI) SECARA ONLINE)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	130.00
169	PM PASTI (PELAYANAN MASYARAKAT PENCATATAN SIPIL AKTA KELARIHAN)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	130.00
170	Pelayanan Administrasi kependudukan Keliling (PELANDUK)	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	129.00
171	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Non Digital	sosial	129.00
172	SEPAKAD(Sistem Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah)	Digital	Keuangan	129.00
173	PEMBINAAN IKM BERSAMA TENAGA PENYULUH LAPANGAN (TPL-IKM)	Non Digital	perindustrian	129.00
174	SURAT MOCE (SULAM RAJUT MOTIF CELUGAM)	Digital	perindustrian	129.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
175	GERAKAN GOTONG ROYONG MEMELIHARA KEBERSIHAN PASAR BERSAMA PENGELOLA PASAR DAN PEDAGANG	Non Digital	perdagangan	129.00
176	PMT BUMITA (Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil dan Balita Miskin)	Non Digital	kesehatan	129.00
177	PEDAL ONLINE	Digital	lingkungan hidup	129.00
178	MUDA PM LB (Mutakhir Data PBB Mandiri, Lengkap dan Benar)	Non Digital	Keuangan	128.00
179	PERAWAN (Pengawasan Produk Hewan)	Digital	pertanian	128.00
180	Geber Tani Iri Tangkal (Gerakan Bersama Petani Irigasi Tanah Dangkal )	Non Digital	pertanian	128.00
181	Pendirian Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Khusus Kopi di Kabupaten Lampung Barat	Non Digital	pendidikan	128.00
182	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Non Digital	kesehatan	128.00
183	GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	128.00
184	PAKET PADI (Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	128.00
185	KIA KESLAH (KARTU IDENTITAS ANAK KE SEKOLAH SEKOLAH)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	128.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
186	Lamban Prestasi	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	127.00
187	KODE ETIK	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	127.00
188	Publikasi Produk Hukum Melalui Website	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	127.00
189	PM BERBAGI (PEDULI, MELAYANI BEREMPATI BANTU ADMINISTRASI KELUARGA IMPIAN	Non Digital	kesehatan	127.00
190	SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SLPHT) HOLTIKULTURA	Non Digital	pertanian	127.00
191	PEDANG (Pelayanan di Kandang)	Digital	pertanian	127.00
192	CELUGAM	Non Digital	perindustrian	127.00
193	PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP (PENJARETA)	Non Digital	perpustakaan	127.00
194	BENTOR SMART (BENTOR PERPUSTAKAAN KELILING UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT)	Non Digital	perpustakaan	127.00
195	RATA TIFFIS (REALISASI ADMINISTRASI TERENCANA AKURAT, EFEKTIF DAN EFISIEN)	Digital	perpustakaan	127.00
196	Survey Perizinan Online (SUPER ON)	Digital	penanaman modal	127.00
197	PASKIBRAKA	Non Digital	kepemudaan dan olah raga	126.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
198	PENGEMBANGAN WISATA JASA LINGKUNGAN	Non Digital	lingkungan hidup	126.00
199	PETA PM (Petani Sejahtera Penyuluhan Mantap)	Digital	pertanian	126.00
200	PKK RSUD (Pelayanan Kesehatan Khusus)	Non Digital	kesehatan	126.00
201	Pembangunan Merata Pelayanan Kesehatan Dasar Terpenuhi (PM SEHATI)	Non Digital	kesehatan	126.00
202	PITULAS KTP-EL KU KATHONG	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	126.00
203	SUPER MANIS (SKRINING UNTUK HIPERTENSI DAN KENCING MANIS)	Non Digital	kesehatan	126.00
204	Bersama Bupati Menabung (BBM)	Non Digital	koperasi, usaha kecil, dan menengah	125.00
205	PM-PENYALUR UMKM ( Peningkatan Monitoring Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Bagi UMKM)	Digital	koperasi, usaha kecil, dan menengah	125.00
206	PROGRAM KETERSEDIAAN STOK BARANG	Non Digital	perdagangan	125.00
207	KOLABORASI PSC 119 DAN AMBULAN HEBAT	Non Digital	kesehatan	125.00
208	MANKOK BAJA (Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	125.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
209	SPERPAT PORANG (STRATEGI PENINGKATAN PERCEPATAN PELAPORAN KEUANGAN)	Digital	perpustakaan	125.00
210	BKU JAMAN KUPAT (BIMTEK KEARSIPAN UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN DOKUMEN KABUPATEN)	Non Digital	perpustakaan	125.00
211	PEMBENTUKAN PKK KOPI (KOMPAK, PROAKTIF DAN INOVATIF)	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	125.00
212	Pembentukan Badan Usaha Milik Pekon Bersama (BUM Pekon Bersama)	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	125.00
213	Pengelolaan Data Informasi Kesehatan (PROFIL RSUDAU)	Digital	kesehatan	125.00
214	Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Non Digital	pertanian	124.00
215	PENGEMBANGAN INFORMASI BARANG KEBUTUHAN POKOK MELALUI DIGITAL BERBASIS WEB	Digital	perdagangan	124.00
216	PETIK LATAP (Peta Tematik Lahan Mantap)	Digital	pertanian	124.00
217	PETIS (Pengobatan Gratis)	Digital	pertanian	124.00
218	BARET TRANSFER (BAYAR RETRIBUSI PAD, YA TINGGAL TRANSFER AJA)	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	124.00
219	Pembinaan Produksi Tanaman Bawang Putih	Non Digital	pertanian	124.00
220	SOSIS TADI (Sosialisasi Intensifikasi Tanaman Padi)	Non Digital	pertanian	124.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
221	E-Formasi	Digital	Kepegawaian, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	124.00
222	BIAS (BERBAGI INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	124.00
223	SISTEM PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT	Digital	pertanian	124.00
224	MP3 - LB (Menjalin Persatuan Pemuda Pemudi Lampung Barat)	Digital	kepemudaan dan olah raga	124.00
225	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa	Non Digital	Perencanaan	123.00
226	Permohonan Kenaikan Gaji Berkala PNS Melalui Google Drive	Digital	Kepegawaian	123.00
227	PUSAT RAON (Pelayanan Usulan Satya Lencana Secara Online)	Digital	Kepegawaian	123.00
228	Pemantauan Harga Komoditas Tanaman Pangan	Non Digital	pertanian	123.00
229	Optimalisasi Data Pokok Pendidikan (SIDATI)	Non Digital	pendidikan	123.00
230	KESRAK PKK	Non Digital	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	123.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
231	PELAKU HEBAT DAN CEPAT (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	123.00
232	DAPAT MAJU (Data Pendapatan yang Mutakhir, Akurat, dan Jujur)	Non Digital	Keuangan	122.00
233	BERLAGU (Bersihkan Lahan dari Gulma)	Digital	pertanian	122.00
234	Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Segar	Non Digital	pangan	122.00
235	GERDAL (pengendalian hama terpadu tanaman padi)	Non Digital	pertanian	122.00
236	ASTER (Asuransi Ternak Sapi)	Digital	pertanian	122.00
237	KAWAN (Kader Kesehatan Hewan)	Digital	pertanian	122.00
238	JULIKU (Juru Sembelih Kurban)	Digital	pertanian	122.00
239	GETAS NGUPI (Gerakan Brantas Pengganggu Kopi)	Digital	pertanian	122.00
240	BISIKAN SENI (BEASISWA PENDIDIKAN KESENIAN)	Non Digital	kebudayaan	122.00
241	SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	Digital	Perencanaan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	122.00
242	Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).	Non Digital	pertanian	122.00
243	PENTAS HERBAL (PENINGKATAN IMUNITAS DENGAN RAMUAN HERBAL "HEBAT")	Non Digital	kesehatan	122.00

No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
244	POSBINDU RELA ( Pos Pembinaan Terpadu Remaja Sekolah )	Non Digital	kesehatan	122.00
245	DISPENSOR (DISIGN PENAHAN LONGSOR)	Non Digital	lingkungan hidup	122.00
246	PM Narsis (Pembinaan Melekat Tenaga Kesehatan Teregistrasi dan Teradministrasi)	Non Digital	kesehatan	122.00
247	Tim Reaksi Cepat (TEKAT) Penerangan Jalan Umum	Non Digital	lingkungan hidup	121.00
248	MESRA SEJOLI (Mesin Sekam Jo Liwa)	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa	121.00
249	PM Gak Keder	Non Digital	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	121.00
250	POSLING (Pengobatan dan Vaksinasi Keliling)	Digital	pertanian	121.00
251	PUSAT KULINER LIWA	Non Digital	perdagangan	121.00
252	MACAN RANTING (Team Pokja Rembuk Stunting)	Digital	kesehatan	121.00
253	Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Arsip	Non Digital	perpustakaan	121.00
254	SAI MASSA PAK (SATU DAPAT EMPAT)	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	121.00
255	Daya Guna Lahan Perkebunan	Non Digital	pertanian	120.00
256	LAMBAN KEMASAN	Digital	koperasi, usaha kecil, dan menengah	120.00
257	Sekolah Lapang Pembuatan Pupuk Organik Untuk Tanaman Padi	Non Digital	pertanian	120.00



No	Judul Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Kematangan
258	Pemberdayaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Digital	pangan	120.00
259	Kelompok Pangan Mandiri Dengan Memanfaatkan Pekarangan	Non Digital	pangan	120.00
260	ITERA (Inovasi Terasiring dan Rorak)	Digital	pertanian	120.00
261	IPTEK (Integrasi Perkebunan dan Ternak)	Digital	pertanian	120.00
262	SI IMUT (Aksi Tingkatkan Mutu)	Digital	pertanian	120.00
263	MENTARI (MELAYANI TERA SATU HARI)	Non Digital	perdagangan	120.00
264	PEKA PTK (PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)	Non Digital	pendidikan	120.00
265	Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dan Website Sebagai Media Informasi Artikel	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	120.00
266	ASMAN (Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur)	Non Digital	kesehatan	118.00

## BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan landasan, pedoman, dan acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.

Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2023 juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, karena dokumen yang lebih tinggi bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional. Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur, dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Ketaatan terhadap dokumen tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistensi kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat, kejujuran, dan disiplin kerja yang tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka koordinasi perencanaan pembangunan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023;
3. Masyarakat dapat berperanserta dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah. Berkaitan dengan pendanaan kegiatan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat

berperan serta dalam mendanai pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian sasaran dan target kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

**PAROSIL MABSUS**